



# MOBILITAS SOSIAL PENDUDUK KOTA BUKITTINGGI

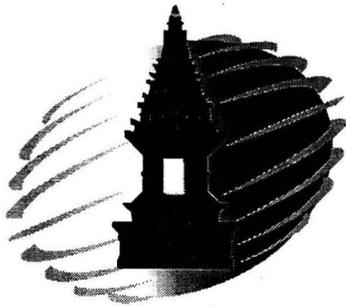
Direktorat  
Budayaan

3

BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL PADANG  
TAHUN 2003

Milik Depbudpar  
Tidak Diperdagangkan

## **MOBILITAS SOSIAL PENDUDUK KOTA BUKITTINGGI**



**BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL PADANG  
TAHUN 2003**

## **MOBILITAS SOSIAL PENDUDUK KOTA BUKITTINGGI**

### Tim Peneliti

Ketua : Lia Nuralia, SS  
Anggota : Drs. Refisrul  
Anggota : Dra. Zusnelli Zubir  
Penyunting : DR. M. Nur, MS

Hak Cipta  
Dilindungi Undang-undang

Gambar Sampul : PD. Intissar  
Disain : PD. Intissar  
ISBN : 979-9388-35-X

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi, Allah Yang Maha Suci, karena atas rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan laporan penelitian ini tepat pada waktunya.

Penelitian ini menggambarkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya mobilitas sosial penduduk dan proses mobilitas sosial yang terjadi di Kota Bukittinggi, baik horisontal maupun vertikal, pada kurun waktu 1980 – 1998. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa Kota Bukittinggi memiliki tingkat mobilitas yang relatif tinggi dibandingkan dengan kota-kota lain yang ada di Sumatera Barat (kecuali Kota Padang). Terjadinya mobilitas yang relatif tinggi mengakibatkan dampak positif dan negatif bagi perkembangan kota, khususnya terhadap tata lingkungan kota dan pariwisata.

Dalam melakukan proses penelitian dan penulisan hasil penelitian ini, kami banyak mendapatkan bantuan, baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ingin sampaikan ucapan terimakasih kepada Pimpinan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang.

Selanjutnya kami sampaikan terimakasih kepada teman-teman yang telah memberikan bantuan informasi dan penginapan selama di lapangan, dan juga telah meminjamkan buku-buku dan literatur-literatur lainnya, dan juga rekan-rekan sejawat yang telah memberi masukan yang berharga bagi lancarnya penelitian ini.

Selama melakukan penelitian ini kami juga telah mendapatkan layanan yang baik dari Bapak dan Ibu pada instansi-instansi yang kami kunjungi, keterangan-keterangan dari para narasumber dan informan, beberapa staf perpustakaan yang memudahkan dalam pencarian bahan-bahan penulisan. Kami mengucapkan terimakasih atas segala bantuannya.

Akhirnya ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung, yang tidak mungkin kami sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan imbalan rahmat dan karunia-Nya. Amin.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan yang perlu mendapat perbaikan dalam penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, kami meminta saran dan kritik kepada semua pihak yang membacanya. Semoga bermanfaat.

Padang, Juli 2001  
Ketua Tim

Lia Nuralia, S.S.  
NIP. 132259115

## KATA SAMBUTAN

Sejarah sosial kota merupakan kajian yang menarik untuk dilakukan, karena menyangkut proses kehidupan manusia di lingkungannya. Sejarah sosial kota meliputi berbagai kehidupan yang dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang dibahas. Salah satu sudut pandang yang menjadi perhatian dalam penelitian yang telah dilakukan ini adalah mobilitas sosial penduduk yang terjadi di Kota Bukittinggi pada kurun waktu 1980-1998.

Penelitian tentang mobilitas sosial penduduk di Kota Bukittinggi dapat memberi gambaran tentang proses perkembangan dan pertumbuhan penduduk serta keberadaan kota sebagai suatu habitat makhluk hidup yang modern. Kota sebagai penjelmaan lingkungan yang berbudaya dan berdaya guna bagi kelangsungan hidup manusia, tidak terlepas dari berbagai persoalan yang melingkupinya. Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian khusus adalah tingginya tingkat mobilitas sosial penduduknya, baik langsung maupun tidak langsung, mengakibatkan dampak positif dan negatif.

Saya menyambut baik hasil penelitian ini, karena dapat memberi gambaran tentang proses perkembangan dan pertumbuhan kota, khususnya Kota Bukittinggi. Kepada tim peneliti kami

mengucapkan terimakasih atas segala kerja keras yang telah dilakukannya. Demikian juga kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusinya bagi kelancaran penelitian ini. Mudah-mudahan penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna sebagai langkah awal untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Terutama bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang di masa yang akan datang dan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait, baik di Sumatera Barat maupun di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia.

Padang, Desember 2003  
Kepala BKSNT Padang

Dr. M. Nur M.S.  
NIP. 131811065

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
KATA SAMBUTAN .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Permasalahan .....	4
1.3. Ruang lingkup .....	5
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1.5. Landasan Teori ( Tinjauan Pustaka ) .....	6
1.6. Metode Penelitian .....	12
1.7. Sistematika Penulisan .....	13
BAB II GAMBARAN UMUM KOTA BUKITTINGGI .....	15
2.1. Keadaan Wilayah Geografis .....	15
2.1.1 Pemekaran Kota .....	19
2.1.2 Gambaran Penduduk .....	39
2.2. Sejarah Pemerintahan .....	45
BAB III MOBILITAS SOSIAL KOTA PENDUDUK BUKITTINGGI .....	53
3.1. Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Mobilitas Sosial .....	53
3.1.1 Faktor Fisik .....	53
3.1.2 Faktor Non-Fisik .....	62
3.2. Proses Mobilitas Sosial Horizontal .....	71

3.2.1	Mobilitas Permanen	71
3.2.2	Mobilitas Sirkuler	76
3.2.3	Mobilitas Ulang Alik	79
3.3	Proses Mobilitas Sosial Vertikal	92
3.3.1	Mobilitas Vertikal Naik	93
3.3.2	Mobilitas Vertikal Turun	96
3.3.3	Mobilitas Vertikal Tetap	100
3.4.	Dampak Mobilitas Sosial	102
3.4.1	Tata Lingkungan Kota	102
3.4.2	Pariwisata	109
BAB IV	Penutup	115
4.1.	Kesimpulan	115
4.2.	Saran	120
DAFTAR PUSTAKA		121
DAFTAR INFORMAN		127
LAMPIRAN		133

## DAFTAR TABEL

	Halaman
<b>Tabel</b> 1. Jumlah Kelurahan dan Luas Kota Bukittinggi Menurut Kecamatan. ....	17
2. Jarak Kota Bukittinggi dengan Kota-Kota di Sumatera .....	18
3. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid TK .....	30
4. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SD .....	30
5. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SMP .....	31
6. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SMA .....	31
7. Jumlah Perguruan Tinggi / Akademi, Dosen, Mahasiswa, dan Lulusan .....	32
8. Jumlah Pedagang Yang Berusaha pada Petak Toko, Los dan Kaki Lima .....	36
9. Luas Lokasi Pasar Menurut Penggunaan, Jumlah Petak Toko dan Daya Tampung Los .....	36
10. Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Persentase Penyebaran Penduduk menurut Kecamatan Tahun 1999 .....	40
11. Jumlah Penduduk Tahun 1980 sampai 1999 .....	40
12. Jumlah Penduduk Menurut Kewarganegaraan .....	42
13. Jumlah Penduduk Menurut Agama .....	42
14. Jumlah Tempat Ibadah .....	43
15. Jumlah Penduduk Menurut WNI dan WNA .....	44



## DAFTAR GAMBAR

### Gambar

1. Salah Satu Sudut Kota Bukittinggi	.....	133
2. Terminal dan Pasar Aur Kuning yang dibangun pada tahun 1980	.....	133
3. Pasar Atas Blok E Kota Bukittinggi	.....	134
4. Hasil-hasil kerajinan tangan yang dijual di kaki lima Pasar Atas Blok A Kota Bukittinggi	.....	134
5. Suasana Pasar Bawah Kota Bukittinggi bagian barat ( Jalan Tengah Sawah ) tampak dari jenjang gantung ( Viaduct )	.....	135
6. Suasana Pasar Bawah Kota Bukittinggi bagian Timur ( jalan A. Yani ) tampak dari Jenjang Gantung ( Viaduct )	.....	135
7. Salah satu Mesjid Raya yang ada di pusat kota Bukittinggi	.....	136
8. Salah satu Hotel berbintang di pusat kota Bukittinggi yang sering digunakan wisatawan domestik dan mancanegara	.....	136
9. Tugu "Jam Gadang" di pusat kota yang dijadikan lambang kota Bukittinggi dan merupakan kebanggaan masyarakat setempat	.....	137
10. Monumen Pahlawan tidak dikenal di Pusat kota Bukittinggi	.....	137
11. Benteng <i>Fort de Cock</i> yang terletak di atas Bukit Jirek. Didirikan pada tahun 1926 oleh Kapten Bauer yang berfungsi sebagai benteng pertahanan dan pengintai jarak jauh melawan kaum Paderi. Dibangun pada zaman Komandan de Roepen dan Wakil Gubernur Hindia Belanda Baron Hendrick Marcus de Cock	.....	138
12. Salah satu bekas "Meriam" yang terletak di salah satu sudut di lokasi Benteng <i>Fort de Cock</i>	.....	138
13. Jembatan gantung yang disebut Jembatan Limpapeh tampak dari bawah di sekitar Jalan Pemuda	.....	139

14. Pintu gerbang masuk Jembatan Limpapeh dari arah Bukit Cubadak Bungkok .....	139
15. Pintu gerbang masuk Taman Margasatwa dan Budaya "Kinantan" .....	140
16. Prototype Rumah Adat MinangKabau, "Rumah Adat Baanjung", yang sekaligus berfungsi sebagai museum. Terletak di lokasi Taman Margasatwa dan Budaya "Kinantan" .....	140
17. Sederetan anak tangga yang disebut Jenjang 40 adalah salah satu sarana yang menghubungkan Pasar Atas, Pasar Lereng dengan Pasar Bawah dan Pasar Banto .....	141
18. Jembatan gantung yang disebut Jenjang Gantung (Viaduct) yang menghubungkan Pasr Atas, Pasar Lereng dengan Pasar Bawah. Dibangun pada tahun 1932 sewaktu Catur,Controleur Agam Tuo berkuasa .....	141
19. Bapak H. Akmal Siddik, Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi .....	142
20. Bapak Drs. Faisal Basir, Pegawai Pemda kota Bukittinggi Bagian Pemerintahan .....	142
21. Siska Sulistia, Pedagang batik di Pasar Aur Kuning kota Bukittinggi .....	143
22. Nisridawati, pedagang sandal/sepatu di kaki lima Pasar Atas Blok A kota Bukittinggi .....	143
23. Sisnawati, pedagang/pengrajin bordir di toko Pasar Atas Blok A lantai II kota Bukittinggi .....	144
24. Didiarti, pedagang sandal/sepatu di Pasar Atas lantai I kota Bukittinggi .....	144
25. Naro Nuriswan, Pedagang aneka kerajinan tangan di kaki lima Pasar Atas Blok A kota Bukittinggi .....	145
26. Novrizal, pedagang sandal di kaki lima Pasar Atas Blok A kota Bukittinggi .....	145
27. Armes, pedagang aneka topi di kaki lima Pasar Atas Blok A kota Bukittinggi .....	146
28. Syamsu Wirman, pedagang sandal/sepatu di toko Pasar Atas Blok A lantai I kota Bukittinggi .....	146

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang Masalah**

Penelitian tentang sejarah kota saat ini sudah mulai penting dilakukan oleh sejarawan. Ada beberapa kota yang telah ditulis sejarahnya, tetapi sejarah kota yang menitikberatkan kepada pertumbuhan dan perkembangan kota serta penduduknya kurang mendapat perhatian. Keadaan ini menyebabkan kota-kota yang ada di Indonesia dalam pelaksanaan pembangunannya tidak lagi memperhatikan aspek historisnya. Gedung-gedung yang dibangun tidak lagi memperhatikan kebudayaan lama, sehingga masyarakat tidak lagi mengenal kebudayaan masa lampau mereka.

Rencana pembangunan sering mengabaikan aspek kultural masyarakat, sehingga terjadi ketimpangan-ketimpangan yang merusak tatanan kehidupan yang ada. Dalam pelaksanaannya, pembangunan yang dilakukan juga tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan melupakan nilai-nilai budaya yang berlaku pada masyarakat setempat, sehingga masyarakat kehilangan jati dirinya. Misalnya, dari hasil pengamatan secara langsung, pembangunan non-fisik berupa usaha meningkatkan kualitas pendidikan generasi muda (anak-anak) lebih ditekankan pada kecerdasan atau kepintaran otak tanpa mempertimbangkan aspek mental (psikis) dan moral (akhlaq). Dalam hal ini, terlihat dari kurikulum pendidikan yang berlaku

sampai saat ini masih memiliki persentase jam pelajaran yang pendek untuk mata pelajaran agama dan moral. Juga fasilitas yang disediakan di sekolah-sekolah lebih dominan untuk pemenuhan kebutuhan fisik semata. Penulisan tentang sejarah kota merupakan suatu keharusan untuk mengetahui perkembangan kota dan penduduknya, baik secara fisik maupun non-fisik yang sangat diperlukan bagi penataan kota yang ideal.

Situasi seperti uraian tersebut, diyakini terjadi di setiap kota di mana pun, termasuk Kota Bukittinggi yang merupakan salah satu kota yang menonjol di Sumatera Barat. Bukittinggi merupakan sebuah kota yang dianggap memiliki mobilitas sosial yang relatif tinggi dibandingkan dengan kota-kota lain yang ada di daerah Sumatera Barat (kecuali Padang), karena banyaknya pendatang yang berkunjung ke sana. Dengan tingginya tingkat mobilitas sosial ini, Bukittinggi disinyalir memiliki penduduk yang heterogen, yaitu terdiri dari berbagai suku bangsa dengan beragam profesi, walaupun suku bangsa Minangkabau merupakan penduduk mayoritas. Dari data statistik<sup>1</sup> tahun 1998 tercatat sekitar 88335 jiwa penduduk berstatus sebagai WNI (Warga Negara Indonesia) dan 316 jiwa penduduk berstatus sebagai WNA (Warga Negara Asing). Penduduk WNI yang berjumlah 88335 jiwa tersebut diketahui tidak seluruhnya bersuku bangsa Minangkabau. Diantara mereka, terutama yang tinggal di kota, ada yang berasal dari etnis Melayu, Batak, Cina, Jawa, Sunda, dan lain-lain. Kondisi penduduk Kota Bukittinggi yang heterogen tersebut menunjukkan bahwa Bukittinggi merupakan kota yang cukup terbuka, sehingga dapat berkembang lebih maju lagi di masa yang akan datang.

Kota Bukittinggi yang telah terkenal dengan sebutan “kota jam gadang” merupakan salah satu kota terpenting di Sumatera Barat. Di kota ini sering diadakan seminar nasional dan internasional, pertemuan-pertemuan ilmiah, serta kegiatan-kegiatan pemerintahan dan ketatanegaraan lainnya. Selain itu, Kota Bukittinggi juga dikenal

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Kotamadya Bukittinggi, “Bukittinggi Dalam Angka 1998”. 1998, hlm. 24.

memiliki potensi wisata dan potensi bisnis (perdagangan) yang cukup potensial. Objek wisata yang ada di Kota Bukittinggi diantaranya Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan, Benteng *Fort De Kock* yang sangat bersejarah, Tugu Jam Gadang, dan lain-lain. Kemudian Bukittinggi juga memiliki areal perdagangan berupa pasar yang cukup luas, yaitu Pasar Aur Kuning, Pasar Atas, dan Pasar Bawah. Selain sebagai tempat terjadinya kegiatan ekonomi (jual beli), pasar juga berfungsi sebagai sarana rekreasi para pengunjungnya.

Menurut Eko Alvarez Z<sup>2</sup> selain terkenal dengan julukan “kota jam gadang”, juga dapat dikatakan sebagai “kota seratus mesjid” atau *the city of hundred mosque*. Dalam hal ini dikatakan bahwa mesjid dengan jumlahnya yang relatif banyak tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah bagi kaum Muslimin, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, ekonomi, sosial, dan kegiatan-kegiatan administratif bagi penduduknya. Lebih lanjut disebutkan bahwa Kota Bukittinggi juga sebagai “Paris van Sumatera”, yaitu sebutan yang diberikan Pemerintah Hindia Belanda dengan alasan bahwa Kota Bukittinggi terlihat sangat cantik apabila dilihat dari udara. Juga disebut sebagai “triarga city” karena lokasi kota ini terletak diantara tiga gunung, yaitu Merapi, Singgalang dan Sago. Oleh karena itu, sudah sepantasnya Bukittinggi mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Sumatera Barat. Kemudian, apabila dikaitkan dengan pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah yang menuntut kemandirian suatu daerah dalam memenuhi kebutuhannya, Kota Bukittinggi dengan potensi wisata dan bisnisnya dapat dijadikan aset daerah yang penting.

Dari beberapa julukan tersebut, Bukittinggi juga merupakan kota bersejarah yang memiliki perjalanan sejarah panjang. Sejak proklamasi kemerdekaan RI 1945, wilayah administratif Bukittinggi ditetapkan sebagai wilayah *Atandsgemeente Fort De Kock*. Sesuai dengan ketetapan gubernur No. 391 tanggal 9 Juni 1947, Bukittinggi

<sup>2</sup> Eko Alvarez Z, “Bukittinggi, The City of Hundred Mosques (The Transformation of Minangkabau City)”, *Makalah*. Present for International Symposium And Workshops on Historic Cities in Islamic Societis. Yogyakarta 21-23 April 1998, hlm. 5.

diberi hak mengatur diri sendiri. Dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1956 dan jo Undang-Undang Pokok Pemerintahan Daerah No. 22 tahun 1948, Bukittinggi ditetapkan sebagai Kota Besar Bukittinggi di lingkungan Sumatera Tengah. Sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah No. 1 tahun 1957 yo Penpres No. 5 tahun 1960, Bukittinggi ditetapkan sebagai Kotapraja Bukittinggi. Kemudian, dalam Undang-Undang No. 18 tahun 1965 dan Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah, Bukittinggi ditetapkan sebagai Kotamadya Bukittinggi.

Perubahan status Kota Bukittinggi secara administratif yang beraneka ragam, memberikan pengaruh yang sangat besar bagi proses perencanaan pembangunan kota. Lebih lanjut, kondisi tersebut memicu tingginya tingkat mobilitas yang bisa berdampak positif bagi kemajuan kota. Juga bisa memberikan dampak negatif yang meniadakan semua yang telah dicapai. Oleh karena itu, penelitian sejarah sosial Kota Bukittinggi, khususnya mobilitas sosial sangat perlu untuk dilakukan.

## **1.2. Permasalahan**

Fokus penelitian ini adalah mobilitas sosial penduduk yang terjadi di kota Bukittinggi. Secara rinci pokok permasalahan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Apa yang mendorong terjadinya mobilitas sosial penduduk di Kota Bukittinggi?
2. Bagaimana proses mobilitas sosial horisontal dan vertikal itu terjadi?
3. Apa dampak positif dan negatif bagi tata lingkungan kota dan pariwisata?

### 1.3. Ruang Lingkup

Penelitian ini mencakup ruang lingkup materi (fokus), ruang lingkup temporal, dan ruang lingkup operasional (spasial). Ruang lingkup materi meliputi sejarah sosial sebuah kota, yaitu seputar mobilitas sosial, baik horisontal maupun vertikal. Pengertian mobilitas sosial (*social mobility*) atau gerak sosial adalah suatu gerakan dalam struktur sosial (*social structure*), yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencakup sifat-sifat hubungan antara individu dalam kelompok dan hubungan antar-individu dan kelompoknya. Kemudian pengertian mobilitas sosial horisontal adalah peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok ke kelompok sosial lainnya yang sederajat, seperti urbanisasi. Sedangkan mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan individu atau objek sosial dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Sesuai dengan arahnya, terdapat dua jenis mobilitas sosial vertikal yaitu, naik (*social climbing*) dan turun (*social sinking*)<sup>3</sup>.

Dalam konteks penelitian ini, yaitu kajian sejarah sosial tentang mobilitas sosial Kota Bukittinggi tersebut akan dicoba diteliti pada kurun waktu 1980-1998. Tahun 1980 merupakan tahun diadakannya sensus penduduk di Kota Bukittinggi, dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1980 tentang pembagian Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi ke dalam 3 kecamatan, yang realisasinya dilakukan pada tahun 1981, dan diresmikannya pendirian Pasar Aur Kuning. Kemudian dibatasi sampai tahun 1998, karena merupakan tahun terakhir periode Repelita.

Sedangkan ruang lingkup operasional meliputi wilayah administratif Kotamadya Bukittinggi yang terdiri dari tiga kecamatan, yaitu Guguk Panjang, Mandiangin Koto Selayan, dan Aur Birugo Tigo Baleh. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian sebagai berikut: 1.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, "Sosiologi Suatu Pengantar", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1998, hlm. 275-279.

Kota Bukittinggi sangat penting ditinjau dari segi historis, yaitu pernah menjadi ibukota Sumatera pada zaman revolusi fisik Indonesia. 2. Kota Bukittinggi memiliki perkembangan pesat. 3. Kota Bukittinggi terletak di persimpangan jalan antara satu kota dengan kota lain di Sumatera.

#### **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini merupakan usaha menulis sejarah sosial Kota Bukittinggi dengan mobilitas sosial penduduknya yang relatif tinggi. Secara rinci penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Memberi gambaran faktor-faktor penyebab terjadinya mobilitas sosial yang terjadi di Kota Bukittinggi.
2. Menjelaskan proses mobilitas sosial yang terjadi.
3. Mengungkapkan dampak positif dan negatif dengan adanya mobilitas sosial tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan kota dan penduduknya. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Memberi pengetahuan tentang kondisi mobilitas sosial penduduk di Kota Bukittinggi.
2. Memberi gambaran dampak mobilitas sosial penduduk, terutama terhadap tata lingkungan kota dan pariwisata, sehingga dapat dijadikan masukan untuk pembangunan di masa yang akan datang.
3. Memberi sumbangan bagi penulisan sejarah, khususnya sejarah sosial kota.

#### **1.5. Tinjauan Pustaka (Landasan Teori)**

Penulisan sejarah kota dalam penelitian ini merupakan bagian dari penulisan sejarah sosial. Dalam penulisan sejarah sosial,

penggunaan metodologi perlu dilakukan, yaitu dengan memakai ilmu bantu dari ilmu-ilmu sosial. Sejarah sosial sebuah kota, khususnya tentang mobilitas sosial penduduknya, dapat ditinjau dalam berbagai perspektif. Mobilitas sosial penduduk kota dalam perspektif sosiologi dan antropologi sosial merupakan salah satu aspek kehidupan kota yang menarik untuk dikaji. Untuk menjelaskan mobilitas sosial suatu kota tidaklah mudah, karena istilah “kota” itu sendiri terdapat banyak ragam pengertian.

Istilah “kota” menurut Brunn dan Williams<sup>4</sup> merupakan suatu penandaan politis yang merujuk pada tempat yang diperintah oleh sejumlah lembaga atau organisasi administratif. Menurut Daldjoeni<sup>5</sup> hakekat kota adalah adanya mobilitas sosial dengan taraf individualisasi yang tinggi serta sekulerisasi. Kemudian Max Weber<sup>6</sup> berpendapat bahwa kota adalah suatu tempat dengan penghuninya yang dapat memenuhi sebagian besar kebutuhannya di pasar lokal. Barang-barang itu harus dihasilkan oleh penduduk pedalaman dan diperjualbelikan di pasar itu. Dengan demikian, ciri kota adalah adanya pasar, mempunyai sistem hukum tersendiri, dan bersifat kosmopolitan.

Selain pengertian tentang kota, perlu juga dijelaskan pengertian tentang “sejarah sosial” dan “mobilitas sosial”. Dalam penelitian ini, pengertian sejarah sosial adalah suatu studi tentang struktur dan proses kegiatan manusia, serta interaksi mereka sebagaimana terjadi dalam konteks sosial yang dicatat di masa lampau. Sejarah sosial lebih menekankan kajian atau analisis terhadap faktor-faktor sosial bahkan ranah-ranah sosial yang mempengaruhi terjadinya peristiwa-peristiwa sejarah itu sendiri<sup>7</sup>.

<sup>4</sup> Nina Herlina Lubis, “Sejarah Kota-Kota Lama di Jawa Barat”, Bandung: Alqaprint. 2000, hlm. 1.

<sup>5</sup> Daldjeoni, “Seluk Beluk Masyarakat Kota: Pusparagam Sosiologi Kota”, Bandung: Penerbit Alumni. 1978, hlm. 48, 108.

<sup>6</sup> Sapari Imam Asy’ari, “Sosiologi Kota dan Desa”, Surabaya: Usaha Nasional. 1993, hlm. 18.

<sup>7</sup> Azyumardi Azra, “Historiografi Kontemporer Indonesia”, dalam Henri Chambert Loir dan Hasan Muarif Ambary (Ed.), “Panggung Sejarah: Persembahan Kepada Prof. Dr. Denys Lombard”, Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan Yayasan Obor Indonesia. 1998, hlm. 63-64.

Lebih lanjut, pengertian sejarah sosial menurut Sartono Kartodirdjo mengacu pada sejumlah aktivitas manusia yang sulit diklasifikasikan karena begitu luasnya, seperti kebiasaan (*manners*), adat istiadat (*customs*) dan kehidupan sehari-hari (*everyday life*), yang dalam bahasa Jerman biasa disebut kultur atau *sittengeschichte*. Sedangkan pengertian tentang mobilitas sosial (*social mobility*) atau gerak sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial (*social structure*), yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencakup sifat-sifat hubungan antara individu dalam kelompok dan hubungan antar-individu dan kelompoknya<sup>8</sup>.

Mobilitas sosial penduduk kota yang relatif tinggi, yaitu dengan terjadinya urbanisasi memang diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam pembangunan. Akan tetapi, dalam kenyataannya urbanisasi menjadi tidak terkendali sehingga menjadi masalah sosial kota yang sulit ditanggulangi. Kota tidak lagi mampu menampung derasnya arus urbanisasi, karena fasilitas kota yang tersedia sudah tidak memadai lagi. Sebagian besar penyebab derasnya arus urbanisasi karena kota memiliki daya tarik tersendiri. Dalam banyak studi dinamika urbanisasi diterangkan dengan migrasi yang ditentukan oleh faktor-faktor dorong dan tarik (*push* dan *pull factors*). Faktor-faktor dorong umumnya dihubungkan dengan perubahan-perubahan ekonomi pedesaan, sedangkan faktor-faktor tarik yang dihubungkan dengan aspek-aspek sosial psikologis pendatang dan pada umumnya dilukiskan sebagai keinginan keras untuk mengikuti kehidupan kota<sup>9</sup>.

Selain mobilitas sosial horisontal juga terjadi mobilitas sosial vertikal. Salah satu contohnya adalah perubahan status seseorang dari status sosial rendah ke status sosial tinggi atau sebaliknya. Dalam pembangunan sebuah kota, mobilitas sosial vertikal ini menjadi

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, Op. Cit., hlm. 275.

<sup>9</sup> Hans-Dieter Evers, "Sosiologi Perkotaan: Urbanisasi dan Sengketa Tanah", Jakarta: LP3ES. 1995, hlm. 1-2. Ida Bagus Mantra, "Teori Migrasi", Seri Terjemahan No. 3. Diterjemahkan oleh Hans Daeng dan Ditinjau Ulang Kembali oleh Ida Bagus Mantra. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada. 1991, hlm. 1-2.

faktor penting karena akan mempengaruhi sektor-sektor ekonomis, politis, dan pekerjaan yang dapat dijadikan landasan bagi pembangunan. Menurut Pitirim A. Sorokin<sup>10</sup>, mobilitas sosial vertikal mempunyai saluran-saluran dalam masyarakat. Proses mobilitas sosial vertikal melalui saluran-saluran tersebut disebut *social circulation*. Saluran yang terpenting adalah angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, sekolah, organisasi politik, ekonomi, dan keahlian.

Dalam sejarahnya, setiap kota dipastikan akan mengalami mobilitas sosial, baik horisontal maupun vertikal. Hal ini terjadi karena tidak ada masyarakat yang benar-benar statis. Pindah pekerjaan yang sederajat, perpindahan penduduk merupakan mobilitas sosial horisontal sebagai suatu gejala umum. Sedangkan mobilitas sosial vertikal terjadi karena hampir tidak ada masyarakat yang sifat sistem lapisannya mutlak tertutup, demikian juga tidak mungkin terjadi mobilitas sosial yang sangat terbuka (sebebas-bebasnya).

Menurut sejarahnya, kemunculan kota-kota di Asia akibat adanya krisis ekonomi di pedesaan dan di dalam kota sendiri terjadi surplus ekonomi dengan sistem transportasi yang semakin berkembang. Akibat yang terjadi atas proses perjalanan dan perkembangan kota sendiri ialah hubungan antar-individu lebih bersifat impersonal, formal, realis, dan spesialis<sup>11</sup>.

Kemudian, kemunculan pendidikan pada dasarnya menyangkut prestis sosial dalam keluarga dan akibat pendidikan melahirkan kelompok yang disebut sebagai masyarakat perantara. Masyarakat tersebut pada dasarnya ikut mempercepat proses perubahan sosial atas sebuah tempat, yang pada gilirannya menarik untuk diikuti oleh yang lainnya. Dari hasil pengamatan sementara secara langsung, proses ini terlihat di beberapa kampung tempat

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, Op. Cit., hlm. 278.

<sup>11</sup> Depdikbud, "Sejarah Sosial Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta: Mobilitas Sosial Di Yogyakarta Periode Awal Abad Duapuluh", Jakarta: Ditjarahnitra, PIDSN. 1993, hlm. 3.

permukiman di wilayah kota Bukittinggi. Selain itu, agama juga berperan penting dalam proses perubahan sosial yang mengarah kepada mobilitas sosial. Lebih jauh dikatakan bahwa untuk sebuah kota dalam pengertian yang utuh dibutuhkan kondisi-kondisi sebagai berikut: (1) adanya pembagian kerja dalam spesialisasi yang jelas, (2) organisasi sosial lebih berdasarkan atas pekerjaan dan kelas sosial daripada kekeluargaan, (3) lembaga-lembaga pemerintahan lebih berdasarkan teritorial daripada hubungan kekeluargaan, (4) adanya suatu sistem perdagangan dan pertukangan, (5) mempunyai sarana komunikasi dan dokumentasi, (6) berteknologi yang rasional. Dari keenam kondisi yang disebutkan, faktor penduduk memegang peranan penting untuk menghadirkan pengertian kota, sehingga terjadinya mobilitas sosial<sup>12</sup>.

Menurut Melvin M. Turmin, problem untuk pembicaraan mobilitas sosial dapat terangkum dalam bidang ekonomi, pendidikan atau prestise dari jabatan yang memperbandingkan kehidupan ayah dengan anak atau individu terhadap grup pada suatu saat dengan beberapa individu dalam waktu yang berlainan. Masih banyak hal yang berkaitan, misalnya faktor pekerjaan, pendapatan, buruh dan majikan dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Jarak mobilitas sosial dinyatakan sebagai kemampuan yang berbeda dari satu pekerjaan antara ayah dan anak yang tanpa ada hubungan dengan nilai mobilitas itu dan merupakan faktor yang terserap dari perpindahan gerakan pekerjaan itu<sup>13</sup>.

Mobilitas sosial dalam penelitian ini adalah gerakan penduduk yang dapat disamakan dengan migrasi atau perpindahan. Pengertian migrasi menurut Everett S. Lee<sup>14</sup> adalah perubahan tempat tinggal secara permanen atau semi permanen. Tidak ada pembatasan, baik pada jarak perpindahan maupun sifatnya, yaitu apakah tindakan itu bersifat sukarela atau terpaksa, serta tidak dibedakan antara migrasi

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 3-4.

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 5-6.

<sup>14</sup> Everet S. Lee, "Mobilitas Penduduk Sirkuler Dari Desa Ke Kota di Indonesia", Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada. 1991, hlm. 7-8.

dalam negeri dan migrasi ke luar negeri.

Selanjutnya dalam penelitian ini mobilitas sosial horisontal yang terjadi dibatasi ke dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Mobilitas Permanen yang cenderung dilakukan oleh penduduk yang berasal dari daerah yang berjarak jauh dari kota atau daerah tujuan dan biasanya menetap di daerah tujuan.
2. Mobilitas Sirkuler yang cenderung dilakukan oleh penduduk yang berasal dari daerah yang berjarak sedang dari kota atau daerah tujuan dan biasanya mondok atau menginap di daerah tujuan.
3. Mobilitas Ulang-Alik (*commuting*) yang cenderung dilakukan oleh penduduk yang berasal dari daerah yang berjarak dekat dari kota atau daerah tujuan dan biasanya pulang pergi hari itu juga.

Sedangkan mobilitas sosial vertikal menyangkut perubahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kelompok masyarakat yang ada di kota. Perubahan yang terjadi disebabkan perubahan orientasi nilai-nilai kehidupan yang dipengaruhi perkembangan pendidikan, keagamaan, perdagangan (pasar) dan sebagainya. Perubahan status sosial yang terjadi pada beberapa keluarga pegawai, pedagang, pengusaha, pengrajin, buruh, dan pelayan toko, baik perantau maupun penduduk asli Bukittinggi. Dengan adanya pembangunan dan pengembangan infrastruktur berupa pasar dan sekolah, maka secara sosial ekonomi pasar telah menaikkan taraf kehidupan mereka. Kemudian, keberadaan sekolah telah melahirkan golongan terdidik, baik berasal dari golongan bangsawan maupun rakyat kebanyakan, yang pada gilirannya dapat mengubah status sosial mereka.

## 1.6. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif historis dengan perspektif sosiologis dan antropologis. Metode penelitian kualitatif historis terdiri dari empat tahap, yaitu *heuristik*, *kritik*, *analisis-sintesis*, dan *penulisan laporan penelitian*. Tahap heuristik merupakan tahap pengumpulan data atau sumber, baik lisan, tulisan maupun tidak tertulis. Sumber lisan didapat melalui wawancara dengan informan yang berhubungan dengan tema penelitian. Sumber tulisan didapat dari buku-buku, arsip, dan dokumen-dokumen lainnya. Sedangkan sumber tidak tertulis dapat berwujud sebagai benda-benda dan gedung-gedung bersejarah yang ada di suatu daerah atau lokasi penelitian, yang dapat memberikan informasi tentang perubahan yang terjadi.

Tahap kedua adalah tahap kritik atau verifikasi, yaitu tahap seleksi data untuk keabsahan sumber yang terbagi ke dalam dua bagian, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern untuk mengetahui otentisitas atau keaslian sumber, sedangkan kritik intern dilakukan untuk menguji kredibilitas sumber atau apakah sumber tersebut bisa dipercaya atau tidak.

Tahap ketiga adalah tahap analisis-sintesis yang mencakup eksplanasi, interpretasi dan pendekatan. Analisis terhadap data dilakukan dengan cara menguraikan data satu per satu, sehingga dapat menemukan fakta dan dapat mengerjakan penulisan dengan menyatukan fakta tersebut (sintesis). Sedangkan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan struktural, sehingga digunakan konsep-konsep ilmu sosial, seperti teori migrasi, mobilitas sosial, dan lain-lain. Konsep dan teori tersebut dapat memberikan landasan dalam menganalisis suatu peristiwa sejarah. Dalam penelitian ini digunakan ilmu bantu sosiologi untuk melihat interrelasi antar-kelompok masyarakat dan ilmu antropologi sosial untuk analisis kultural yang menerangkan hubungan antar-status yang ada dalam masyarakat.

Kemudian tahap penulisan laporan penelitian merupakan tahap terakhir, yaitu berupa kegiatan penulisan sehingga menjadi satu rangkaian tulisan sejarah yang kronologis dan sistematis.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Penelitian tentang “Sejarah Sosial Kota Bukittinggi: Mobilitas Sosial Penduduk Kota Bukittinggi 1980-1998” diuraikan menjadi beberapa bab dan sub-bab, sehingga penulisan menjadi sistematis. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengertian dan pemahaman isi tulisan. Adapun beberapa bab dan sub-bab tersebut sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori (tinjauan pustaka), metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua menguraikan tentang gambaran umum Kota Bukittinggi yang menerangkan tentang situasi dan kondisi yang menyebabkan terjadinya mobilitas sosial. Dalam bab ini diuraikan melalui beberapa sub-bab, yaitu keadaan wilayah geografis dan sejarah pemerintahan Kota Bukittinggi. Keadaan wilayah geografis menerangkan tentang pemekaran kota dan gambaran penduduk, sedangkan sejarah pemerintahan menerangkan tentang sistem pemerintahan Kota Bukittinggi dari sistem pemerintahan tradisional Minangkabau, zaman Pemerintahan Hindia Belanda, zaman Pendudukan Jepang dan zaman Republik Indonesia (kemerdekaan).

Bab ketiga merupakan bab inti yang menguraikan tentang mobilitas sosial penduduk Kota Bukittinggi yang terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya mobilitas sosial, proses mobilitas sosial horisontal, proses mobilitas sosial vertikal dan dampak mobilitas sosial. Faktor-faktor penyebab terjadinya mobilitas terdiri dari dua, yaitu faktor fisik dan non-fisik. Kemudian proses mobilitas sosial horisontal menguraikan tentang bentuk mobilitas yang

terjadi di Kota Bukittinggi yang terdiri dari tiga, yaitu mobilitas permanen, mobilitas sirkuler dan mobilitas ulang alik. Sementara itu, proses mobilitas vertikal menerangkan tentang jenis mobilitas yang terjadi di Kota Bukittinggi, yaitu mobilitas vertikal naik, mobilitas vertikal turun dan mobilitas vertikal tetap. Terakhir menguraikan tentang dampak mobilitas terhadap tata lingkungan kota dan pariwisata.

Bab keempat merupakan bab penutup yang memaparkan pendapat akhir hasil analisis tentang mobilitas sosial dalam kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan kelanjutan penelitian tentang tema yang sama di masa yang akan datang.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KOTA BUKITTINGGI**

#### **2.1 Keadaan Wilayah Geografis**

Kota Bukittinggi pada zaman dahulu merupakan kota pedalaman terbesar di Sumatera Barat, yang berada di dataran tinggi di atas jajaran Bukit Barisan. Letak Kota Bukittinggi berada di tengah-tengah Kabupaten Agam. Bukittinggi memang merupakan bagian dari Luhak Agam, yaitu salah satu dari "Luhak Nan Tigo" menurut tradisi Minangkabau<sup>1</sup>. Sebelum menjadi kota, Bukittinggi dahulu merupakan sebuah Nagari Kurai. Secara adat, Nagari Kurai berada dibawah satu payung dengan nagari-nagari sekitarnya, seperti Banuhampu, Sianok dan Koto Gadang<sup>2</sup>. Pada saat ini Kota Bukittinggi adalah salah satu daerah tingkat II di Propinsi Sumatera Barat yang terletak pada dataran tinggi.

Letak astronomis Kota Bukittinggi<sup>3</sup> berada dalam koordinat 100,21° - 100,25° Bujur Timur dan antara 00,76° - 00,19° Lintang Selatan. Apabila diukur dari permukaan laut mempunyai ketinggian 909 – 914 m dan memiliki udara sejuk dengan suhu rata-rata 16,1° min – 24,9° max. Pada umumnya Kota Bukittinggi banyak turun hujan,

<sup>1</sup> Taufik Abdullah, et al. (Ed.). "Sejarah Sosial di Daerah Sumatera Barat". Jakarta: Depdikbud, Ditjarahnitra, PIDSN, 1983/1984, hlm. 1.

<sup>2</sup> Ibid, hlm.5.

<sup>3</sup> Pemda, "Memori Pelaksanaan Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi 1992-1998". 1998, hlm. 63.

yaitu rata-rata 2,381 milimeter per tahun. Sementara itu, jumlah hari hujan sekitar 193 hari dan kelembaban hawa berkisar antara min 82,0 % - 90,8 % max.

Secara topografis Kota Bukittinggi mempunyai permukaan bumi tidak rata atau bergelombang, berbukit dan berlembah<sup>4</sup> serta diapit oleh tiga gunung, yaitu Gunung Merapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Sago<sup>5</sup>. Selain itu, memiliki beberapa sungai kecil, yaitu Batang Tambuo yang mengalir di sebelah Timur kota dan Batang Sianok yang mengalir di sebelah Barat kota. Kemudian, kondisi tanah Kota Bukittinggi cukup subur, karena merupakan lapisan *Tuff* dari lereng Gunung Merapi<sup>6</sup>.

Secara administratif pemerintahan, Bukittinggi dahulunya merupakan pusat dari ibukota Kabupaten Agam. Setelah tahun 1996, ibukota Kabupaten Agam pindah ke Lubuk Basung<sup>7</sup>. Sejak perpindahan itu, Bukittinggi tidak ada keterikatan lagi secara administratif dengan Kabupaten Agam.

Kotamadya Bukittinggi dengan luas wilayah 25,239 km<sup>2</sup> terdiri dari tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Guguk Panjang, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, dan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh. Masing-masing kecamatan secara berurutan memiliki luas wilayah<sup>8</sup> sebagai berikut: Kecamatan Guguk Panjang 6,831 km<sup>2</sup> terdiri dari 7 kelurahan, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan 12,156 km<sup>2</sup> terdiri dari 9 kelurahan, dan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh 6,252 km<sup>2</sup> terdiri dari 8 kelurahan.

<sup>4</sup> Beberapa bukit tersebut terdiri dari 27 buah, yaitu: Bukit Mandiangin, Ambacang, Upang-Upang, Pauah, Lacia, Jalan Aua Lam Pasa, Cindai, Campago, Gumasik, Gamuak, Guguk Buleh, Sangkuik, Api, Pinang Sabatang, Jirek, Malambuang, Cubadak Bungkuak, Sarang Gagak, Tambun Tulang, Cangang, Parit Natuang, Paninjauan, Sawah Laweh, Batarah, Panganak, Kandang Kabau, dan Bukit Gulimeh. Sedangkan lembahnya yang terletak pada sisi Barat Kota Bukittinggi, yaitu Ngarai Sianok dengan kedalaman 100 m serta mempunyai kemiringan antara 80° - 90°.

<sup>5</sup> Op. Cit., hlm. 63

<sup>6</sup> Pemda, "Bukittinggi Dalam Angka Tahun 1999", hlm. 2.

<sup>7</sup> Pemda, "Bukittinggi Dalam Angka Tahun 1998", hlm. 3.

<sup>8</sup> Op. Cit., hlm. 3.

**Tabel 1**  
**Jumlah Kelurahan dan Luas Kota Bukittinggi**  
**Menurut Kecamatan**

No.	Kecamatan	Kelurahan	Luas Daerah (KM)
1.	Guguk Panjang	7	6.831
2.	Mandiingin Koto	9	12.156
3.	Selayan Air Birugo Tigo Baleh	8	6.239

Sumber Bukittinggi dalam angka Tahun 1999, Halaman 24

Dari tabel 1 terlihat bahwa kecamatan terluas adalah Kecamatan Mandiingin Koto Selayan dengan 9 kelurahan dan luas daerah sebesar 12, 156 KM<sup>2</sup> atau sekitar 48, 16 % dari seluruh luas daerah Kota Bukittinggi. Disusul oleh Kecamatan Guguk Panjang dan terakhir Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dengan jumlah kelurahan dan luas daerah sebagaimana yang tertera dalam tabel tersebut.

Adapun batas-batas daerah kota sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Gadut dan Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Banuhampu Kecamatan Banuhampu Sungai Puar Kabupaten Agam. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Sianok, Guguk dan Koto Gadang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Tanjung Alam, Ampang Gadang Kecamatan IV Angkat Candung Kabupaten Agam<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 2.

Secara geografis Bukittinggi terletak hampir di tengah-tengah Pulau Sumatera. Juga terletak di tengah-tengah Propinsi Sumatera Barat, sehingga dapat dikatakan berada dalam posisi strategis, karena dapat ditempuh dengan mudah dari berbagai daerah lainnya di Sumatera. Dengan melalui jalan darat Bukittinggi dapat dijangkau oleh masyarakat yang berada di Kota Padang dengan jarak tempuh sekitar 91 km, dengan Pariaman berjarak tempuh 77 km, dengan Solok 73 km, dengan Sawahlunto 194 km, dengan Lubuk Sikaping 77 km. Kemudian jarak tempuh dari propinsi paling ujung Utara Pulau Sumatera (Aceh) adalah 1.337 km dan dari ujung Selatan (Tanjung Karang) adalah 1.222 km<sup>10</sup>. Lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 2**  
**Jarak Kota Bukittinggi dengan Kota-Kota di Sumatera**

No.	Kota-Kota	Jarak (KM)	No.	Kota-Kota	Jarak (KM)
1.	Bukittinggi - Medan	730	12.	Bukittinggi - Tapan	304
2.	Bukittinggi - Banda Aceh	1337	13.	Bukittinggi - Solok	73
3.	Bukittinggi - Jambi	537	14.	Bukittinggi - Sawahlunto	104
4.	Bukittinggi - Pekanbaru	221	15.	Bukittinggi - Sijunjung	136
5.	Bukittinggi - Palembang	795	16.	Bukittinggi - Payakumbuh	33
6.	Bukittinggi - Bengkulu	779	17.	Bukittinggi - Batusangkar	49
7.	Bukittinggi - Tanjung Karang	1222	18.	Bukittinggi - Lubuk Sikaping	77
8.	Bukittinggi - Padang Panjang	19	19.	Bukittinggi - Simpang Empat	199
9.	Bukittinggi - Padang	91	20.	Bukittinggi - Air Bangis	256
10.	Bukittinggi - Pariaman	77	21.	Bukittinggi - Sitiung	242
11.	Bukittinggi - Painan	168	22.	Bukittinggi - Muaraha Labuh	143

Sumber Dinas LLAJ Kota Bukittinggi. Bukittinggi Dalam Angka 1999, Hal 6

Letak yang menguntungkan dari Kota Bukittinggi juga karena Bukittinggi terletak pada simpang tiga yang menghubungkan Padang, Solok, dan Padang Panjang di sebelah Barat Daya; Payakumbuh di Timur Laut; dan jurusan ke Bonjol, Lubuk Sikaping, dan Padang Sidempuan di Utara. Pada kota ini juga terdapat jalan kereta api yang menghubungkan Payakumbuh dengan Padang Panjang. Di Padang Panjang bercabang dua, yaitu satu ke Solok di Selatan dan satu lagi ke Padang arah Barat. Kedua kota ini terletak cukup tinggi di atas permukaan laut, maka rel kereta api ke Padang Panjang dan Payakumbuh memakai rel gigi<sup>11</sup>. Pada saat ini, jalur kereta api ke Kota Bukittinggi sudah tidak ada lagi.

### **2.1.1. Pemekaran Kota - Luas Wilayah Kota**

Pemekaran kota menyangkut masalah perkembangan luas wilayah kota, perkembangan pola pemukiman penduduk, dan perkembangan infrastruktur. Perkembangan luas wilayah Kota Bukittinggi sejak lepasnya keterikatan secara administratif dengan Kabupaten Agam tahun 1996 sampai saat ini, masih dalam rencana atau belum dapat direalisasikan. Hal ini terkait dengan masalah tanah yang mempunyai korelasi dengan hukum adat Minangkabau tentang fungsi dan nilai sakralnya<sup>12</sup>.

Secara fungsional Kota Bukittinggi digolongkan ke dalam kota kolonial, yaitu sebagai kota tua yang telah eksis sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda. Sebagai kota kolonial, Bukittinggi dibangun pada saat itu sesuai dengan aturan Pemerintah Belanda yang mempunyai visi dan misi ekspansi dan eksploitasi sebagai daerah jajahan<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Taufik Abdullah. Op. Cit., hlm. 5-6.

<sup>12</sup> Wawancara dengan wakil ketua DPRD Kodya Bukittinggi Bapak H. Akmal Sidik, tanggal 9 Mei 2001.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ketua Bappeda Bukittinggi Bapak Drs. Usmar Amin, tanggal 10 Mei 2001.

Memasuki zaman kemerdekaan, Kota Bukittinggi memiliki beberapa julukan, yaitu sebagai kota wisata, kota dagang, kota pendidikan, kota industri, dan terakhir sebagai kota pelayanan kesehatan. Dikatakan sebagai kota wisata karena memiliki potensi wisata yang cukup bagus dengan objek wisata yang beraneka ragam. Dikatakan sebagai kota dagang karena memiliki areal perdagangan yang cukup luas dan maju, yaitu dengan adanya beberapa buah pasar berskala besar dan beberapa buah pasar berskala kecil. Sebagai kota pendidikan bisa ditinjau dalam lintasan sejarah dengan banyaknya jumlah dan jenis sekolah yang telah ada atau berdiri sejak zaman Belanda. Dikatakan sebagai kota industri karena kota ini mempunyai ciri khas dalam hasil kerajinan tangan, seperti aneka bordir, aneka souvenir dari kayu dan bambu, aneka kerajinan dari kulit dan besi, yang semuanya dikategorikan ke dalam industri rumah tangga (industri kecil dan menengah). Kemudian dikatakan sebagai kota pelayanan kesehatan, karena banyaknya pendatang dari luar kota Bukittinggi yang sengaja datang untuk berobat di rumah sakit-rumah sakit umum yang ada di Kota Bukittinggi. Hal ini dapat dilihat dari data yang diambil dari beberapa rumah sakit terkemuka, seperti Rumah Sakit Ahmad Muchtar<sup>14</sup>.

Luas wilayah Kota Bukittinggi direncanakan akan diperluas sampai ke daerah-daerah yang termasuk wilayah administratif Kabupaten Agam. Dengan Surat Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi No. 08/SK. II/DPRD/1995 tanggal 31 Desember 1995, Bukittinggi akan mengadakan perubahan batas wilayah, dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Agam ke dalam wilayah Kotamadya Bukittinggi. Dengan demikian, Kotamadya Bukittinggi akan memiliki luas 145, 299 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 7 kecamatan dan 58 kelurahan atau desa dengan jumlah penduduk kira-kira 175,452 jiwa. Sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan realisasinya menunggu turunya Peraturan Pemerintah tentang perubahan batas wilayah tersebut<sup>15</sup>.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Wakil Ketua DPRD Kodya Bukittinggi Bapak H. Akmal Sidik, tanggal 9 Mei 2001.

<sup>15</sup> Pemda, "Memori Pelaksanaan Tugas DPRD DT. II Bukittinggi 1992-1998". 1998, hlm. 64.

## - Pola Pemukiman

Perkembangan pola pemukiman penduduk kota mengalami perubahan yang tidak terlalu mencolok. Sejak akhir zaman Pemerintahan Hindia Belanda sampai saat ini, penduduk Kota Bukittinggi bermukim di beberapa daerah secara menyebar atau tidak terkotak-kotak lagi berdasarkan etnis dan jenis profesi<sup>16</sup>. Akan tetapi, jika kita lihat pola pemukiman penduduk kota dalam lintasan sejarah terbagi-bagi ke dalam beberapa kelompok. Ada pemukiman orang-orang Eropa (Belanda), orang-orang Timur Asing (Cina, India, Arab, dan lain-lain), dan pemukiman orang-orang Bumiputera (Indonesia). Kelompok terakhir ini dalam wilayah kota yang sama terbagi-bagi lagi ke dalam beberapa kelompok berdasarkan etnis (suku bangsa). Hal ini terjadi karena dalam satu wilayah tempat tinggal dan menetap beberapa suku bangsa atau mempunyai penduduk yang heterogen.

Seperti diketahui bahwa penduduk asli Bukittinggi, yaitu orang Kurai berasal dari Pariangan Padang Panjang<sup>17</sup>. Pertama kali mereka bermukim di daerah Tigo Baleh dengan mendirikan rumah-rumah sederhana. Dalam perkembangan selanjutnya mereka menyebar ke daerah Aur Birugo, Koto Selayan, Mandiangin dan Guguk Panjang.

Pada tahun 1820, kompeni Belanda bermufakat dengan penghulu-penghulu Kurai untuk mendirikan satu benteng, rumah pemerintah sipil, rumah rapat, kuburan Belanda, pasar dan lain-lain. Lokasi yang dipilih adalah sekitar Bukit Jirat (Jirek), Bukit Sarang Gagak, Bukit Tambun Tulang, Bukit Cubadak Bungkuk, dan Bukit Melambung. Seluruh lokasi ini dalam perkembangan selanjutnya menjadi wilayah sebuah kota dan Belanda menamakannya *Fort de Kock*. *Fort de Kock* adalah nama sebuah benteng Letnan Jenderal Belanda yang bernama de Kock. Benteng ini letaknya 941 m di atas permukaan laut dan berdiri di atas bukit tertinggi, yaitu Bukit Jirek.

<sup>16</sup> Taufik Abdullah. *Ibid*, hlm. 6.

<sup>17</sup> M. Hadjerat, "Sejarah Negeri Kurai Lima Jorong: Pasar dan Pemerintahan Kota Bukittinggi", Bukittinggi: T.S. Ichwan. 1947, hlm. 7.

Dekat benteng tersebut dan di Jalan Sudirman sekarang Belanda membuat tangsi serdadu. Kemudian di sebelahnya di tanah lapang Atas Ngarai didirikan beberapa rumah opsir-opsir militer<sup>18</sup>.

Semenjak didirikannya Pasar dan Benteng oleh Belanda, Bukittinggi semakin ramai dikunjungi oleh penduduk dari daerah sekitarnya dengan tujuan berdagang di kota ini. Mereka diantaranya orang Banuhampu, Sungai Puar, Balingka, Sihanok, IV Angkat, Koto Gadang, Tilatang Kamang, dan sebagainya. Sebagian dari pedagang ini menetap dan membuat rumah di Bukittinggi. Pemukiman mereka tidak berkelompok-kelompok menurut asal nagarinya, tetapi menyebar di seluruh jorong yang ada di Bukittinggi. Selain itu, ada juga pendatang yang bermukim dan membuat tempat tinggal berdasarkan kelompok etnisnya atau daerah asalnya. Mereka diantaranya orang-orang Pariaman, Maninjau, Batak, Jawa, dan lain sebagainya. Kondisi ini disebabkan ikatan kekeluargaan diantara kelompok yang berdasarkan daerah sangat kuat. Bahkan rasa kekeluargaan ini membuat mereka membentuk perkumpulan-perkumpulan untuk meningkatkan persatuan diantara mereka.

Sejalan dengan itu pedagang dari Cina dan India datang pula ke Bukittinggi. Kebanyakan mereka menetap di Bukittinggi dan menjadi penduduk setempat. Pemukiman kelompok orang Cina ditempatkan mengelompok oleh Pemerintah Belanda yang dikenal dengan "Kampung Cina" . Juga terdapat sebagian kecil orang Cina yang bermukim di sekitar Jenjang Empat Puluh. Sekarang "Kampung Cina" tersebut terdapat di sekitar Jalan Ahmad Yani<sup>19</sup>. Pemukiman kelompok India (Keling) ditempatkan di sekitar Jalan Pemuda sekarang. Pola pemukiman etnis India pada kenyataannya tidak kelihatan mengelompok. Walaupun mereka kebanyakan tinggal di sekitar Jalan Pemuda, tetapi mereka berbaur dengan penduduk pribumi dengan baik. Selain di lokasi tersebut, mereka juga tinggal di belakang pusat pertokoan pasar bertingkat dan daerah lainnya di

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 38.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Wakil Ketua DPRD DT. II Bukittinggi Bapak H. Akmal Sidik, tanggal 9 Mei 2001.

sekitar pusat kota. Sementara itu, pemukiman orang-orang Belanda pada waktu itu berada di sekitar Jalan Sudirman sekarang.

Setelah kemerdekaan dan waktu terjadi Agresi Militer Belanda Kota Bukittinggi menjadi ramai diakibatkan banyaknya arus pengungsi dari Kota Padang dan Sumatera Utara<sup>20</sup>. Pertumbuhan penduduk yang begitu meningkat menimbulkan masalah sosial seperti sulitnya perumahan, makanan, dan sebagainya. Sesudah keadaan mulai aman mereka kembali ke daerahnya masing-masing. Akan tetapi, bagi mereka yang berhasil tetap tinggal dan menetap di Bukittinggi. Sampai tahun 1969 sudah banyak penduduk dari luar yang bermukim di Bukittinggi. Bagi mereka yang berhasil mempergunakan kesempatan untuk membeli tanah dan bermukim di sini. Sebagai konsekuensinya penduduk asli Kurai lama-lama semakin terdesak oleh penduduk pendatang<sup>21</sup>.

Pemukiman orang-orang Cina yang letaknya di Jalan A. Yani dan pemukiman orang-orang India yang letaknya di Jalan Pemuda, sekarang masih tetap dihuni oleh mereka, tetapi telah bercampur dengan penduduk asli dan penduduk lain dari suku bangsa yang beraneka ragam. Lokasi sekitar Jalan A. Yani dan Jalan Pemuda, saat ini telah menjadi lokasi yang ramai dengan toko-toko besar dan kecil yang termasuk dalam wilayah Pasar Bawah dan Pasar Banto. Kemudian Bangunan-bangunan sekitar Jalan Pemuda yang dahulu berfungsi sebagai tempat tinggal, sebagian besar sudah berubah fungsi menjadi losmen, hotel, café (kantin) dengan pemiliknya yang berasal dari beraneka ragam suku bangsa. Sedangkan Jalan Sudirman sekarang merupakan lokasi perkantoran, tempat ibadah dan bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan lainnya, serta terdapat toko-toko kecil dan tempat tinggal. Perkembangan terbaru yang dapat diamati adalah ditempatkannya kantor-kantor pemerintahan di lokasi Belakang Balok yang dahulu

<sup>20</sup> Taufik Abdullah, Op. Cit., hlm. 160.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Wakil Ketua DPRD DT. II Bukittinggi Bapak H. Akmal Sidik, tanggal 9 Mei 2001.

merupakan tempat tinggal pejabat-pejabat pemerintahan sipil dan militer Belanda.

### - Perkembangan Birokrasi

Perkembangan infrastruktur Kota Bukittinggi meliputi perkembangan birokrasi, sekolah, pasar, dan rekreasi. Perkembangan birokrasi Kota Bukittinggi mengalami pasang naik dan pasang surut. Hal ini terjadi apabila kita hubungkan dengan luas wilayah kekuasaan pemerintahan. Pada sistem pemerintahan tradisional, Kota Bukittinggi dengan nama Nagari Kurai terdiri dari lima jorong<sup>22</sup>, yaitu Jorong Tigo Baleh, Jorong Aur Birugo, Jorong Mandiangin, Jorong Koto Selayan, dan Jorong Guguk Panjang<sup>23</sup>.

Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda mengalami sedikit perluasan wilayah, tetapi tetap meliputi kelima jorong seperti pada sistem pemerintahan tradisional. Akan tetapi, pada saat itu Kota Bukittinggi bernama *Taadsgemente Fort de Kock*<sup>24</sup>. Pada zaman Pendudukan Jepang *Tadsgemente Fort de Kock* berubah nama menjadi Bukittinggi *Shi Yaku Sho* (Kota Bukittinggi Baru). Pada saat itu kota mengalami perluasan wilayah dengan memasukkan nagari-nagari Sianok, Gadut, Kapau, Ampang Gadang, Batu Taba dan Bukit Batabuah<sup>25</sup>. Dengan perluasan wilayah ini secara otomatis wilayah kekuasaan atau secara birokrasi Kota Bukittinggi mengalami kemajuan.

Pada zaman kemerdekaan luas wilayah kekuasaan Kota Bukittinggi mengalami banyak perubahan. Pada awal kemerdekaan Kota Bukittinggi merupakan pusat kegiatan pemerintahan Sumatera bagian Tengah dan selanjutnya meliputi Sumatera secara

<sup>22</sup> Istilah "Jorong" adalah suatu susunan wilayah hukum adat yang merupakan wilayah pemerintahan terendah dalam masyarakat Minangkabau. Sekarang dapat disamakan dengan kelurahan di kota. Perubahan ini terjadi sesuai dengan Perda No. 13 tahun 1979.

<sup>23</sup> Op. Cit., hlm. 7.

<sup>24</sup> *Tadsgemente Fort de Kock* No. 18.

<sup>25</sup> Pemda, "Memori Pelaksanaan Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kodya Bukittinggi 1992-1998". 1998, hlm. 70.

keseluruhan. Setelah itu, pada zaman revolusi fisik RI, Kota Bukittinggi pernah menjadi ibukota RI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, dari bulan Desember 1948 sampai bulan Juni 1949), setelah kejatuhan ibukota RI, Yogyakarta, ke tangan Belanda pada waktu Agresi Militer II Belanda<sup>26</sup>. Dalam hal ini, secara birokrasi Kota Bukittinggi mengalami perluasan yang cukup besar.

Dalam perkembangan selanjutnya, setelah kondisi negara RI kembali normal, Kota Bukittinggi kembali menjadi Ibukota Propinsi Sumatera dengan Gubernurnya Tengku Muhammad Hasan. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 1950, Bukittinggi ditetapkan menjadi ibukota Propinsi Sumatera Tengah yang meliputi Keresidenan Sumatera Barat, Jambi dan Riau<sup>27</sup>. Kemudian setelah Keresidenan Sumatera Barat dikembangkan menjadi Propinsi Sumatera Barat, maka Bukittinggi ditunjuk sebagai Ibukota Propinsi. Pada tahun 1958 secara *de facto* ibukota propinsi dipindahkan ke Padang, walaupun secara *de jure* baru pindah tahun 1979<sup>28</sup>.

Kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1979 yang berisi pemindahan ibukota Propinsi Sumatera Barat ke Padang. Oleh karena itu, sejak saat itu secara keseluruhan Bukittinggi berstatus sebagai kotamadya dan ibukota Kabupaten Agam. Setelah tahun 1996, seperti yang telah diuraikan, Kota Bukittinggi sebagai kotamadya terlepas dari Kabupaten Agam secara administratif pemerintahan, karena ibukota Kabupaten Agam pindah ke Lubuk Basung.

Dari uraian tersebut, yaitu semenjak Kota Bukittinggi menjadi ibukota Propinsi Sumatera sampai menjadi Kotamadya Bukittinggi, dapat dikatakan mengalami penyempitan wilayah secara birokrasi. Seperti diungkapkan oleh Ketua Bappeda Bukittinggi, peran dan

<sup>26</sup> Audery Kahin, "Perjuangan Kemerdekaan Sumatera Barat Dalam Revolusi Nasional Indonesia 1945-1950", Padang: MSI Cabang Sumatera Barat.

<sup>27</sup> Pemda. Op. Cit.

<sup>28</sup> Ibid, hlm. 71.

fungsi Kota Bukittinggi yang besar di masa lalu hanya tinggal kenangan<sup>29</sup>.

### - Perkembangan Pendidikan (Sekolah)

Perkembangan sekolah di Kota Bukittinggi dimulai pada zaman Hindia Belanda. Masuknya Belanda di Bukittinggi menyebabkan terjadinya perubahan dalam pendidikan. Belanda memperkenalkan pendidikan Barat, sedangkan pendidikan pada masa sebelumnya hanya terpusat pada surau.

Pada tahun 1843<sup>30</sup> Pemerintah Belanda mendirikan Sekolah Rendah untuk anak-anak bumiputera. Sekolah ini dibiayai dan diawasi oleh nagari, maka disebut Sekolah Nagari. Tujuan didirikan sekolah ini adalah untuk melatih calon pegawai dalam birokrasi Pemerintah Belanda. Semua pengajaran diberikan dalam bahasa Melayu mulai dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Dalam tahun 1870-an administrasi Pemerintah Belanda menjadi lebih modern, sehingga syarat-syarat untuk menjadi pegawai Pemerintah Belanda menuntut keterampilan yang lebih tinggi. Salah satu usaha Pemerintah Belanda untuk meningkatkan kualitas lulusan Sekolah Nagari adalah mengharuskan gurunya tamatan Sekolah Normal.

Sekolah Normal (*Normal School*) yang juga dikenal dengan *Kweekschool* didirikan pada tahun 1856<sup>31</sup>. Motivasi pendirian sekolah ini, selain karena banyaknya peminat akan Sekolah Nagari juga didorong oleh tuntutan kebutuhan akan calon guru Sekolah Rendah yang lebih berkualitas. Sekolah Normal di Bukittinggi ini merupakan Sekolah Normal satu-satunya di Sumatera.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Ketua Bappeda DT. II Bukittinggi Bapak Usmar Amin, tanggal 10 Mei 2001.

<sup>30</sup> Taufik Abdullah. Op. Cit., hlm. 74.

<sup>31</sup> Ibid.

Pada perkembangan selanjutnya Sekolah Nagari mengalami masalah keuangan yang secara langsung berimbas pada gaji guru. Keadaan keuangan yang serba kekurangan menambah kurangnya prestise pada sekolah ini. Guru-guru sering mengalami kesulitan keuangan dan akhirnya mereka lebih suka meninggalkan profesinya sebagai guru untuk menjadi pegawai kantor. Melihat kondisi tersebut Pemerintah Belanda mengadakan perubahan dalam pendidikan. Sekolah Nagari yang selama ini dikelola secara bersama oleh masyarakat, akhirnya diambil kebijaksanaan bahwa Sekolah Nagari berada dibawah pengawasan Pemerintah Belanda. Pembiayannya merupakan campur tangan antara Pemerintah Lokal dan Pemerintah Pusat Hindia Belanda.

Perbaikan kualitas lulusan dilakukan juga pada Sekolah Normal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tahun 1872, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah adalah orang Belanda. Kemudian, murid-murid yang bisa masuk sekolah ini disaring dengan ketat dan kebanyakan dari mereka berasal dari golongan elite, sehingga sekolah ini menjadi terkenal dengan Sekolah Raja.

Setelah Sekolah Normal berdiri, kemudian didirikan juga MOSVIA yang juga satu-satunya untuk Pulau Sumatera, yang menghasilkan calon-calon Pamongpraja dan Kepolisian. Kemudian didirikan 2 buah sekolah MULO dengan status milik pemerintah dan satu buah MULO dengan status milik swasta yang dikelola oleh IVOORSA. Selanjutnya pada tahun 1914 di Bukittinggi didirikan HIS (*Hollandsche Inlandsche School*)<sup>32</sup>. Pendidikan berlangsung selama 7 tahun dan kurikulum serta diplamanya diakui sama dengan Sekolah Rendah di Eropa. HIS milik pemerintah berjumlah 2 buah dan 4 buah dikelola oleh swasta, yaitu 1 buah oleh PGI, 1 buah oleh VSM (PSM sekarang) dan 2 buah oleh Zainudin Sutan Kerajaan yang bernama VORSA yang cabangnya di Medan dengan nama IVORNO.

<sup>32</sup> Ibid, hlm. 84.

Selain itu, sekolah agama juga berkembang di Bukittinggi, seperti Sekolah Pendidikan agama di Parabek dibawah pimpinan Ibrahim Musa<sup>33</sup>. Dalam kurikulum sekolah ini diterapkan suatu pembaharuan dalam sistem pengajarannya. Pembauran dalam lapangan pendidikan dilakukan dalam beberapa cara. Pertama, sistem *halaqah* yang biasanya digunakan diganti dengan sistem kelas. Kedua, mata pelajaran yang tidak langsung berhubungan dengan ilmu agama mulai diperkenalkan. Ketiga, madrasah-madrasah baru didirikan, yaitu sekolah agama yang mengajarkan pengetahuan umum.

Setelah Indonesia merdeka pendidikan di Bukittinggi berkembang dengan pesat. Sistem pendidikan disesuaikan dengan pendidikan yang digariskan oleh pemerintah pusat. Sekolah-sekolah bermunculan, seperti SMT (Sekolah Menengah Tinggi) yang akhirnya berubah menjadi SMA (Sekolah Menengah Atas) dan sekolah-sekolah swasta. Diantara sekolah-sekolah swasta tersebut antara lain: SMA Gajah Tongga dan SMA PSM (Pendidikan Siswa Minangkabau). Perkembangan selanjutnya sampai dengan tahun 1969 banyak bermunculan sekolah-sekolah dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi yang dari tahun ke tahun mengalami kemajuan.

Bersamaan dengan pendirian sekolah-sekolah di kota, di daerah-daerah juga mulai direncanakan untuk mendirikan sekolah-sekolah yang sederajat. Sejalan dengan itu pendidikan masyarakat Kurai pun mengalami kemajuan. Semangat dan motivasi masyarakat sangat tinggi untuk memajukan pendidikan. Dalam memajukan pendidikan anak-anak, mereka bersedia mengorbankan harta benda untuk menyekolahkan anak-anaknya. Pada perkembangan selanjutnya banyak didirikan sekolah kejuruan, seperti ST, STM, SMEP, SPMA, SMEA, SPG, SAA, KPA, PGA, Sekolah Guru A dan B serta Sekolah Perawat dan Bidan. Dengan banyaknya sekolah kejuruan, pendidikan umum tidak lagi menjadi tumpuan yang besar. Minat masyarakat terhadap sekolah kejuruan cukup tinggi, karena

<sup>33</sup> Ibid, hlm. 97.

masyarakat lebih berpikir praktis. Apabila tamat di sekolah kejuruan akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Sementara itu, pendidikan swasta di Bukittinggi sampai tahun 1974 juga mengalami kemajuan. Kemajuan ini dapat dilihat dengan didirikannya dua SMA swasta pada tahun 1972, yakni STM Pembangunan dan STM Muhammadiyah. Kemudian, pada pendidikan agama Islam di Bukittinggi tidak lagi diadakan di surau, tetapi sudah pindah ke pendidikan madrasah secara tersendiri. Sampai pada tahun 1974 di Bukittinggi terdapat 13 buah Madrasah

Selain pendidikan formal juga terdapat pendidikan non-formal. Pada tahun 1974 terdapat enam buah tempat pendidikan non-formal<sup>34</sup>. Seperti: Srikandi dan Venus dalam bidang kerumahtanggaan. Kursus Utama dan Bahagia memberikan pendidikan tata niaga. Sedangkan tempat kursus Any dan Dolly memberikan jenis pendidikan Modevak. Di Bukittinggi juga terdapat sekolah swasta yang dikelola oleh orang Cina, seperti Sekolah Taman Kanak-Kanak Kuntum Mekar, Sekolah Dasar Fransiskus dan Sekolah Menengah Pertama Xaverius<sup>35</sup>. Keberadaan sekolah swasta yang dikelola oleh pendatang ini (orang Cina) berdasarkan Peraturan Presiden No. B/Pres/1/1968 yang memberi izin mendirikan sekolah swasta untuk masyarakat Cina<sup>36</sup>. Pendidikan masyarakat pendatang dari daerah sekitar yang berada di Bukittinggi sama halnya dengan penduduk asli Kurai. Mereka menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah yang ada di Bukittinggi. Perkembangan pendidikan yang cukup maju pada tahun-tahun berikutnya di Bukittinggi terlihat dalam jumlah murid, jumlah guru dan fasilitas tempat belajar (sekolah). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

<sup>34</sup> Kantor Depdikbud Kotamadya Bukittinggi. Daftar Diklusemas 1974.

<sup>35</sup> Kantor Depdikbud Kotamadya Bukittinggi.

<sup>36</sup> Leo Suryadinata, "Dilema Minoritas Tionghoa", Jakarta: PT. Temprint. 1984, hlm. 191.

**Tabel 3**  
**Jumlah Sekolah, Guru dan Murid TK Tahun 1987 - 1999**

No.	Tahun	Sekolah	Guru	Murid
1.	1987	27	99	2129
2.	1988	28	104	1815
3.	1989	30	100	1699
4.	1990	30	111	1717
5.	1991	30	100	1753
6.	1992	31	112	1897
7.	1993	33	119	1873
8.	1994	28	110	1961
9.	1995	27	122	2066
10.	1996	27	117	2178
11.	1997	27	133	1885
12.	1998	27	140	2414
13.	1999	27	149	2070

Sumber : Kantor Statistik Kota Madya Bukittinggi. Bukittinggi Dalam Angka 1991, Hlm 23 1995, Hlm 43 dan 1999, Hlm 44.

Pada tabel 3 terlihat bahwa jumlah TK pada tahun 1987 sampai tahun 1998 mengalami peningkatan dan penurunan secara bergantian. Demikian juga dengan jumlah muridnya. Sedangkan jumlah guru cenderung mengalami peningkatan.

**Tabel 4**  
**Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SD**

No.	Tahun	Sekolah	Guru	Murid
1.	1987	74	647	12796
2.	1988	73	675	13151
3.	1989	74	653	13068
4.	1990	75	649	13142
5.	1991	75	705	13325
6.	1992	75	742	13465
7.	1993	78	761	12633
8.	1994	77	713	13196
9.	1995	77	691	13154
10.	1996	76	608	13276
11.	1997	76	566	13067
12.	1998	73	547	13231
13.	1999	72	528	13381

Sumber : Dinas P dan K Kantor Depdikbud dan Sekolah Non - P dan K Kota Madya Bukittinggi Bukittinggi Dalam Angka 1991, Hlm 24, 1995, Hlm 44-46 dan 1999 Hlm 45-47

**Tabel 5**  
**Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SMP**

No.	Tahun	Sekolah	Guru	Murid
1.	1987	15	372	6927
2.	1988	15	364	6739
3.	1989	12	384	6297
4.	1990	12	416	6837
5.	1991	12	421	5570
6.	1992	12	424	5470
7.	1993	12	450	5712
8.	1994	13	470	6232
9.	1995	12	466	6375
10.	1996	13	449	6304
11.	1997	13	437	6188
12.	1998	10	317	4965
13.	1999	10	321	5037

Sumber : Kantor Depdikbud dan Sekolah Non - P dan K Kota Madya Bukittinggi  
Bukittinggi Dalam Angka 1991, Hlm 26-27, 1995, Hlm 44-46 dan 1999 Hlm 48-49

**Tabel 6**  
**Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SMA**

No.	Tahun	Sekolah	Guru	Murid
1.	1987	25	-	-
2.	1988	25	-	-
3.	1989	25	-	-
4.	1990	25	-	-
5.	1991	23	1083	11702
6.	1992	22	1109	11814
7.	1993	23	1124	12389
8.	1994	23	1183	12018
9.	1995	23	1212	12970
10.	1996	23	1217	13609
11.	1997	25	1272	14203
12.	1998	19	1049	12275
13.	1999	20	572	12600

Sumber : Kantor Depdikbud dan Sekolah Non - P dan K Kota Madya Bukittinggi  
Bukittinggi Dalam Angka 1991, Hlm 27, 1995, Hlm 48-49 dan 1999 Hlm 49-50

Pada tabel 4, 5 dan 6 terlihat bahwa jumlah SD, SMP dan SMA tahun 1987 sampai tahun 1998 mengalami peningkatan dan penurunan bergantian. Demikian juga dengan jumlah guru dan muridnya rata-rata mengalami hal yang sama.

**Tabel 7**  
**Jumlah Perguruan Tinggi / Akademi, Dosen, Mahasiswa dan Lulusan**

No.	Tahun	PT- Aka	Dosen	Mahasiswa	Lulusan
1.	1987	11	385	1861	125
2.	1988	10	359	3072	297
3.	1989	11	365	3964	370
4.	1990	11	416	2941	290
5.	1991	10	410	3578	433
6.	1995	11	487	3108	506
7.	1996	11	489	3153	482
8.	1997	11	537	2959	495
9.	1998	11	458	2940	414
10.	1999	11	491	3200	480

Sumber : Perguruan Tinggi / Akademi Swasta di Bukittinggi. Bukittinggi Dalam Angka 1999 Hlm 52

Pada tabel 7 terlihat bahwa jumlah PT/Akademi pada tahun 1987 sampai tahun 1998 cenderung tidak mengalami peningkatan. Demikian juga dengan jumlah mahasiswa dan dosen cenderung mengalami hal yang sama. Sedangkan jumlah lulusan mengalami peningkatan dalam jumlah yang tidak terlalu besar.

## - Perkembangan Pasar

Perkembangan Pasar berawal dari berdirinya pasar Bukittinggi pada tahun 1820 yang terletak di atas tanah orang Kurai yang tingginya 936 M dari permukaan laut<sup>37</sup>. Pasar ini dikenal dengan nama Pakan Kurai. Bangunan pada pakan tersebut masih bersifat darurat berupa bangku-bangku dengan payung pelindung tempat orang berjualan. Kegiatan perdagangan di pasar ini hanya dilakukan oleh orang Kurai. Mereka berdagang untuk memenuhi kebutuhan pedagang dan tukang angkat kopi yang singgah dan istirahat di Bukittinggi pada zaman Belanda. Jual beli dilakukan secara tukar menukar barang yang dalam sistem ekonomi disebut dengan perdagangan barter.

Pendirian pasar ini pada mulanya di atas Bukit Cubadak Bungkuak, kira-kira tempat pasar sekarang, yang diadakan oleh kepala nagari di Kurai. Mula-mula orang Kurai diminta oleh Kepala Nagari tersebut untuk datang ke pasar dan berjualan secara kecil-kecilan. Lama kelamaan Pasar Bukittinggi tersebut menjadi ramai, sehingga orang-orang yang memiliki uang, mendirikan pondok-pondok dan warung-warung di pasar itu. Kemudian orang lain, yang datang dari luar nagari Kurai serta orang Tionghoa dan Orang India datang pula untuk berdagang kecil-kecilan dengan membuat kedai-kedai, warung-warung dan sebagainya<sup>38</sup>.

Pakan Kurai tersebut terletak di Jorong Guguk Panjang. Dalam perkembangan selanjutnya, pada Pakan Kurai ini dibangun los pertama, yaitu los galung dalam tahun 1890 yang ditempatkan pada perhentian bendi, yang selanjutnya dalam tahun 1910 dipindahkan ke muka penurunan Jenjang 40.

Suatu peristiwa penting dalam pertumbuhan dan perkembangan pasar Kota Bukittinggi terjadi pada tahun 1858, yaitu diserahkannya

<sup>37</sup> M. Hadjerat, Op. Cit., hlm. 37.

<sup>38</sup> Ibid, hlm. 38-39.

tanah-tanah oleh penghulu-penghulu di Kenagarian Kurai kepada Pemerintahan Belanda, salah satunya dipakai mendirikan pasar yang lamanya tidak ditentukan. Apabila tanah tersebut sudah tidak dipergunakan lagi harus dikembalikan kepada orang Kurai. Tanah tersebut adalah semua bukit-bukit yang ada di sekeliling Jalan Bambulan, Tembok, Aur Tajung Kang, Gudang, Jalan Rumah Sakit Bola dan tanah-tanah di muka rumah sakit militer. Di dalam tanah itu termasuk benteng, rumah residen, kuburan Belanda lama, Wek Tiong Hoa, Wek India, Kampung Nias dan Kebun Bunga<sup>39</sup>.

Untuk perkembangan pasar dan gedung-gedung lainnya pada mulanya selalu dimufakatkan dengan penghulu-penghulu Kurai. Tetapi lama kelamaan Belanda menguasai saja tanah pasar tersebut. Diantaranya mengizinkan orang-orang bukan Kurai untuk mendirikan kedai-kedai dan warung-warung di tanah tersebut.

Perkembangan pasar yang semakin ramai mendorong Pemerintah Belanda mendirikan *loods* (ruangan besar untuk berdagang) yang nantinya disewakan kepada pedagang. Selain itu, Belanda melanggar perjanjian tahun 1858 dengan mengeluarkan Surat Gubernur Sumatera tanggal 27 Februari 1897 dengan besluit Residen Padang Darat tanggal 6 Maret 1897 No. 1054 yang isinya adalah tanah Kota Bukittinggi diambil alih oleh Pemerintah Belanda<sup>40</sup>.

Sebagai akibatnya pada tahun 1898 penghulu-penghulu Nagari Guguk Panjang mengadakan kepada Residen Padang Darat H.K. Prias yang menuntut sebagian Pasar Bukittinggi sebagai milik mereka dan meminta sebagian keuntungan dari pasar tersebut<sup>41</sup>. Pengaduan ini tidak berhasil karena Belanda menganggap pengaduan ini tidak menurut adat, karena pasar terletak di atas tanah ulayat orang Kurai yang terdiri dari lima jorong, sedangkan yang menuntut hanya Jorong Guguk Panjang yang merupakan salah satu saja dari kelima jorong tersebut.

<sup>39</sup> Ibid, hlm. 39-40.

<sup>40</sup> Taufik Abdullah. Op. Cit., hlm. 55.

<sup>41</sup> M. Hadjerat. Op. Cit., hlm. 44.

Selanjutnya pada tahun 1906 penghulu-penghulu Kurai mengadakan lagi kepada Residen Padang Darat tentang pelanggaran adat dan pusaka lama yang dilakukan oleh Pemerintahan Bukittinggi<sup>42</sup>. Dalam hal pendirian toko dan bangunan-bangunan lainnya tidak dimufatkan dahulu dengan para penghulu Kurai. Akan tetapi, pengaduan ini tidak juga berhasil, karena menurut Controleur Agama Tuo L. C. Westeneek bahwa diantara 24 orang penghulu tersebut, 9 diantaranya tidak bertabiat baik atau dikatakan sebagai tukang hasut.

Pemerintah Bukittinggi semakin berkuasa atas kota dan pasar Bukittinggi. Gedung-gedung dan toko-toko didirikan dan dilelang tanpa sepengetahuan penghulu-penghulu Kurai. Sebagai akibatnya tanah dan pasar Bukittinggi yang semula dimiliki oleh orang Kurai menjadi kabur, karena *loods* dan pasar banyak dimiliki oleh laras-laras (lareh) Agam.

Sampai Indonesia merdeka masalah pasar Kota Bukittinggi selalu menjadi suatu polemik antara orang Kurai dengan orang Agam Tua yang masing-masing bersikukuh dengan argumentasinya. Polemik terjadi karena pada nagari di Sumatera Barat ada yang dinamakan pasar B, yaitu pasar serikat milik beberapa nagari dan Pasar Bukittinggi diidentikkan dengan pasar tersebut. Setiap keuntungan pasar dibagi-bagi kepada beberapa nagari tersebut. Akan tetapi, dalam kenyataannya penduduk asli Bukittinggi atau orang Kurai tidak dapat menikmati keuntungan tersebut, karena tidak ada peraturan yang jelas dari pemerintah setempat. Sedangkan pasar jenis A adalah milik satu nagari saja, sehingga apabila ada keuntungan yang diperoleh untuk keperluan nagari itu saja sebagai pemilikinya<sup>43</sup>.

Pada perkembangan selanjutnya kondisi pasar semakin ramai dengan meningkatnya jumlah pedagang, terutama pedagang kaki

<sup>42</sup> Ibid, hlm. 45.

<sup>43</sup> Kompas, "Bukittinggi Mengandung Aneka Ragam Sejarah", tanggal 15 Nopember 1987.

lima yang banyak memadati setiap pojok dan emperan toko. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**Jumlah Pedagang Yang Berusaha Pada Petak Toko, Kios dan Kaki Lima**

No.	Tahun	Petak Toko	Petak Los	Kaki Lima	Jumlah
1.	1988	2030	3029	1496	6555
2.	1989	2030	3029	1496	6555
3.	1990	2242	3029	1496	6767
4.	1991	2242	3094	1426	6762
5.	1995	2241	3049	-	5290
6.	1996	2453	3043	-	5496
7.	1998	3485	4302	-	7787
8.	1999	3127	4302	-	7429

Sumber : Dinas Pengelolaan Pasar Kota Madya Bukittinggi. Bukittinggi Dalam Angka 1991, Him 95, 1999, Him 142

Pada tabel 8 dan terlihat bahwa antara tahun 1988 sampai tahun 1991, jumlah pedagang pada petak toko dan los cenderung mengalami peningkatan. Kemudian pedagang kaki lima jumlahnya tetap, kecuali pada tahun 1991 mengalami penurunan. Pada tahun-tahun selanjutnya jumlah pedagang kaki lima semakin bertambah. Dengan bertambahnya pedagang kaki lima yang berdagang tidak tetap tempatnya atau berpindah-pindah sesuai kondisi keramaian pasar, maka jumlahnya tidak dapat didata dengan rinci. Hal ini bukan berarti pedagang tersebut tidak ada, tetapi sulit untuk diidentifikasi.

**Tabel 9**  
**Luas Lokasi Pasar Menurut Penggunaan, Jumlah Petak Toko dan Daya Tampung Los**

No.	Tahun	Bangunan Toko (M <sub>2</sub> )	Petak Toko	Bangunan Los (M <sub>2</sub> )	Daya Tampung	Kaki Lima	Lainnya
1.	1988	28610	2030	17000	3029	13643	7790
2.	1989	28610	2030	17000	3029	13643	7790
3.	1990	28742	2242	17000	3029	12535	7790
4.	1991	28742	2242	17550	3094	11925	7850
5.	1995	16473	2242	5827	3043	-	3043
6.	1996	21921	2453	2636	2733	-	2733
7.	1998	22801	3485	6243	4302	-	4302
8.	1999	29877	3127	6193	4302	-	4302

Sumber : Dinas Pengelolaan Pasar Kota Madya Bukittinggi. Bukittinggi Dalam Angka 1991, Him 95, 1999, Him.142

Pada tabel 9 terlihat bahwa luas bangunan toko antara tahun 1988 sampai tahun 1991 cenderung mengalami peningkatan. Sementara lahan untuk pedagang kaki lima yang tersedia mengalami sedikit penurunan. Kemudian antara tahun 1992 sampai tahun 1994 tidak ada data yang diperoleh. Selanjutnya pada tahun 1995 luas bangunan toko mengalami penurunan relatif tajam, sedangkan pada tahun 1996 sampai tahun 1998 kembali mengalami peningkatan. Sementara itu, luas bangunan los antara tahun 1988 sampai tahun 1990 cenderung tidak mengalami perubahan. Baru pada tahun 1991 mengalami peningkatan. Sedangkan antara tahun 1992 sampai tahun 1994 tidak ada keterangan yang diperoleh. Akan tetapi, pada tahun 1995 dan tahun 1996 luas bangunan los mengalami penurunan cukup tajam. Kemudian pada tahun 1998 mengalami peningkatan kembali hampir dua kali lipat dari tahun 1996.

#### **- Perkembangan Sarana Rekreasi (Objek Wisata)**

Perkembangan sarana rekreasi di Kota Bukittinggi sampai sekarang tidak mengalami kemajuan yang berarti. Dari dahulu objek-objek wisata yang ada di Kota Bukittinggi tidak mengalami perubahan, dalam hal jumlah dan tata letaknya. Diantara objek-objek wisata tersebut sebagai berikut: Kebun Binatang, Jenjang 40, Benteng *Fort de Kock*, Jam Gadang, Jenjang Gantung (*Viaduct*), Rumah Adat Baanjuang, Jembatan Limpapeh, Ngarai Sianok dengan panorama alamnya, Panorama Lama dan Panorama Baru, Museum Perjuangan Sumatera dan Riau, Pasar Atas yang berada di pusat kota, serta Tugu Pahlawan tidak dikenal.

Kebun Binatang terletak di lokasi Kelurahan Benteng Pasar Atas saat ini, dahulu dikenal dengan Kebun Bunga. Kebun Bunga ini didirikan pada tahun 1900 dengan nama *Stompart* di atas Bukit Cubadak Bungkuak oleh Controleur Gravenzande. Pada tahun 1929 dilengkapi dengan Kebun Binatang dibawah pimpinan dokter hewan yang bernama dr. J. Hock. Dalam perkembangan selanjutnya mengalami perubahan nama, yaitu menjadi Taman Puti Bungsu.

Kemudian berubah nama lagi menjadi Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan, sesuai dengan Perda No. 2 tahun 1995.

Jenjang 40 lokasinya berada di Kelurahan Benteng Pasar Atas adalah anak tangga yang menghubungkan Pasar Atas dengan Pasar Bawah dan Pasar Banto. Didirikan pada tahun 1908 pada masa Asisten Residen Agam yang bernama Westeneek. Sebenarnya jumlah anak tangga yang dibangun adalah 100 buah, tetapi jumlah anak tangga yang kecil pada sisi yang curam bagian atas jenjang berjumlah 40 buah, sehingga dinamakan Jenjang 40.

Benteng *Fort de Kock* didirikan pada tahun 1926 oleh Kapten Bauer di atas Bukit Jirek yang merupakan bukit paling tinggi. Saat ini berada di lokasi yang termasuk ke dalam Kelurahan Benteng Pasar Atas. Tujuan pendirian adalah untuk mengawasi pasukan Perang Paderi yang datang menyerang kota. Dinamakan Fort de Kock karena pada masa itu berkuasa Baron Hendrick Markus de Kock, yaitu sebagai Komandan de Roepen dan Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Oleh karena itu, benteng tersebut dinamakan Fort de Kock.

Jam Gadang yang berdiri di pusat kota di Kelurahan Benteng Pasar Atas, menjadi lambang Kota Bukittinggi, sehingga Kota Bukittinggi lebih dikenal dengan Kota Jam Gadang. Jam Gadang ini didirikan pada tahun 1926 bersamaan dengan pendirian benteng, oleh Controleur Rockmaker. Sedangkan Janjang Gantung (*viaduct*) merupakan jembatan gantung yang menghubungkan Pasar Atas dan Pasar Lereng dengan Pasar Bawah. Didirikan pada tahun 1932 sewaktu Catur, Controleur Agam Tuo berkuasa.

Rumah Adat Baanjuang<sup>44</sup> yang terdapat di lokasi Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan, termasuk ke dalam Kelurahan Benteng Pasar Atas. Rumah adat ini merupakan bangunan rumah adat

<sup>44</sup> Pemda, "Memori Pelaksanaan Tugas DPRD Kotamadya DT. II Bukittinggi 1992-1998". 1998, hlm. 68-69.

Minangkabau. Didirikan pada tahun 1935 di atas Bukit Cubadak Bungkuak pada masa J. Madelaar sebagai Controleur Agama Tuo. Dalam rumah adat ini banyak tersimpan benda-benda peninggalan sejarah, baik yang berasal dari Bukittinggi maupun daerah lain dalam lingkup suku bangsa Minangkabau.

Jembatan Limpapeh adalah jembatan gantung yang menghubungkan Bukit Cubadak Bungkuak (Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan) dengan Bukit Jirek yang di atasnya berdiri dengan kokoh Benteng Fort De Kock. Sedangkan Museum Perjuangan Sumatera dan Riau, Panorama Lama, Panorama Baru serta Ngarai Sianok berada di daerah Kayu Kubu atau Bukit Apit. Ngarai Sianok ini merupakan lembah yang curam dan dalam. Di Ngarai Sianok terdapat Lobang Jepang dan Ngarai tersebut pada zaman dahulu merupakan jalan pintas atau penghubung dengan nagari-nagari di wilayah Kabupaten Agam. Kemudian Pasar Atas merupakan pasar yang cukup ramai dan padat yang terletak di pusat kota. Oleh karena itu, selain sebagai tempat berbelanja para pembeli, juga dapat dijadikan tempat rekreasi para pelancong. Pasar Atas tersebut letaknya berada di satu lokasi dengan Jam Gadang dan tidak jauh dari lokasi Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan.

### **2.1.2. Gambaran Penduduk**

Berdasarkan sensus penduduk tahun 1980<sup>45</sup> jumlah penduduk Kota Bukittinggi tercatat sebanyak 70.691 orang yang tersebar di tiga kecamatan. Kecamatan Guguk Panjang memiliki jumlah penduduk sebesar 34395 jiwa, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan sebesar 23645 jiwa dan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh sebesar 12651 jiwa.

<sup>1</sup> M. Hadjerat, Op. Cit., hlm. 11-19.

**Tabel 10**  
**Jumlah Penduduk , Kepadatan Penduduk dan Persentase Penyebaran Penduduk**  
**Menurut Kecamatan Tahun 1999**

No.	Kecamatan	Penduduk			Kepadatan	Persentase Penyebaran
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		
1.	Guguk	18.996	19.027	38.023	5566	42,87
2.	Panjang	15.523	16.278	31.801	2616	35,86
3.	Madiangin KS Aur Birugo TB	9.253	9.616	18.869	3018	21,27
	<b>Jumlah</b>	<b>43.732</b>	<b>44.921</b>	<b>88.693</b>	<b>3514</b>	<b>100</b>

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka 1999, Hlm.24

**Tabel 11**  
**Jumlah Penduduk Tahun 1980 - 1998**

No.	Tahun	Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	1980	35.263	35.428	70.691
2.	1981	35.781	35.970	71.751
3.	1982	36.005	36.110	72.115
4.	1983	35.436	36.798	72.234
5.	1984	35.945	37.105	73.050
6.	1985	36.530	37.450	73.980
7.	1986	37.115	37.995	75.110
8.	1987	37.550	38.670	76.220
9.	1988	37.829	38.898	76.727
10.	1989	37.682	39.056	76.747.
11.	1990	41.351	42.460	83.811
12.	1991	41.535	42.741	84.276
13.	1992	41.593	42.844	84.437
14.	1993	42.054	43.330	85.384
15.	1994	42.488	43.755.	86.243
16.	1995	42.839	44.297	87.136
17.	1996	43.700	44.716	88.416
18.	1997	43.666	44.762	88.428
19.	1998	43.767	44.884.	88.651
20.	1999	43.772	44.921	88.693

Sumber : Badan Pusat Statistik, Bukittinggi Dalam Angka 1981, 1985, 1991

Penduduk terbesar yang terlihat pada tabel 10 berada di Kecamatan Guguk Panjang dengan jumlah penduduk sebesar 38023 orang, sehingga merupakan kecamatan terpadat dengan kepadatan penduduk sekitar 5566 orang per km<sup>2</sup> atau sekitar 42,8 % dari seluruh jumlah penduduk. Hal ini dimungkinkan karena Kecamatan Guguk Panjang merupakan pusat kota dengan beragam aktivitas penduduknya. Kemudian disusul dengan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dan Aur Birugo Tigo Baleh.

Dari tahun ke tahun selama kurun waktu 18 tahun yang terlihat pada tabel 11, yaitu dari tahun 1980-1998, telah terjadi peningkatan jumlah penduduk yang relatif tinggi. Dari tabel 11 terlihat bahwa tingkat pertambahan penduduk Kota Bukittinggi selama 10 tahun, yaitu 1980–1990, mengalami peningkatan atau kenaikan. Selama tahun tersebut laju pertumbuhan penduduk rata-rata 1,7 1%. Keadaan ini menunjukkan bahwa perkembangan penduduk cukup pesat. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk selama 7 tahun berikutnya, yaitu tahun 1991-1998 rata-rata sebesar 0,7 %. Keadaan ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 10 tahun sebelumnya.

Kondisi penduduk Kota Bukittinggi termasuk ke dalam penduduk yang heterogen. Terdapat beberapa suku bangsa yang hidup dan menetap di kota, yaitu suku bangsa Minangkabau sebagai suku bangsa mayoritas, suku bangsa Cina, India dan lain-lain. Juga terdapat beberapa agama yang hidup di Kota Bukittinggi, yaitu Agama Islam sebagai agama mayoritas, Agama Kristen (Protestan dan Katolik), Agama Hindu, Agama Budha, dan kepercayaan lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 12**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kewarganegaraan**

No.	Tahun	WNI	CINA	INDIA	ASIA LAINNYA	EROPA	JUMLAH
1.	1980	70.288	372	-	31	-	70.691
2.	1989	76.553	286	2	6	-	76.747
3.	1990	83.609	187	7	8	-	83.811
4.	1991	84.066	197	4	9	-	84.276
5.	1992	84.230	197	4	6	-	84.477
6.	1993	85.174	198	-	2	-	85.374
7.	1994	86.094	135	4	10	-	86.243
8.	1995	86.989	135	4	11	6	87.136
9.	1996	88.100	296	4	16	6	88.422
10.	1997	88.112	297	4	9	6	88.428
11.	1998	88.335	297	4	9	-	88.645
12.	1999	88.377	297	4	9	-	88.687

Sumber : Kantor Statistik Kota Madya Bukittinggi. Bukittinggi Dalam Angka 1991 Him 16a 1981 Him 36, 1995, Him 30. 1999, Him.28

Pada tabel 12 terlihat bahwa jumlah penduduk menurut kewarganegaraan antara tahun 1980 sampai tahun 1994 terdiri dari WNI (penduduk pribumi) dengan jumlah yang dominan dan WNA (Cina, India, dan Asia lainnya) dengan jumlah yang sebaliknya. Kemudian antara tahun 1995 sampai tahun 1997 terdapat penduduk dengan kewarganegaraan Eropa, walaupun jumlahnya sangat sedikit.

**Tabel 13**  
**Jumlah Penduduk Menurut Agama**

No.	Tahun	Islam	Katolik	Protestan	Hindu	Budha	Lainnya
1.	1980	68.766	428	582	6	509	-
2.	1981	69.632	890	877	-	352	-
3.	1991	81.109	95	2494	155	421	2
4.	1995	84.620	771	1262	315	156	12
5.	1999	86.692	101	258	6	6	-

Sumber : Kantor Dep. Agama dan Kantor Statistik Kota Madya Bukittinggi. Bukittinggi Dalam Angka 1991, Him.17. 1981, Him.147, 1995. Him.32 dan 1999, Him 30.

Pada tabel 13 terlihat bahwa antara tahun 1980 sampai tahun 1998 penduduk yang beragama Islam terus mengalami peningkatan, sedangkan penduduk yang beragama Kristen (Katolik dan Protestan) mengalami peningkatan dan penurunan secara bergantian. Demikian juga dengan penduduk yang beragama Hindu, Budha, dan yang lainnya. Kemudian pada tabel 14 terlihat bahwa antara tahun 1980 sampai tahun 1997 jumlah Masjid dan Mushala mengalami peningkatan, sedangkan jumlah Gereja dan Katedral cenderung tidak mengalami perubahan. Pada tahun 1998 jumlah Mushala mengalami penurunan yang relatif tajam, sedangkan untuk tempat ibadah yang lainnya cenderung tetap.

**Tabel 13**  
**Jumlah Penduduk Menurut Agama**

No.	Tahun	Islam	Katolik	Protestan	Hindu	Budha	Lainnya
1.	1980	68.766	428	582	6	509	-
2.	1981	69.632	890	877	-	352	-
3.	1991	81.109	95	2494	155	421	2
4.	1995	84.620	771	1262	315	156	12
5.	1999	86.692	101	258	6	6	-

Sumber : Kantor Dep. Agama dan Kantor Statistik Kota Madya Bukittinggi. Bukittinggi Dalam Angka 1991, Him.17. 1981, Him.147, 1995. Him.32 dan 1999, Him 30.

**Tabel 14**  
**Jumlah Tempat Ibadah**

No.	Tahun	Meesjid	Mushalla	Gereja	Katedral	Jumlah
1	1980	26	79	1	1	107
2	1981	27	84	1	1	113
3	1987	30	81	1	1	113
4	1988	30	87	1	1	119
5	1989	31	99	1	1	132
6	1990	33	97	1	1	132
7	1991	34	98	1	1	134
8	1992	35	105	1	1	142
9	1993	36	104	1	1	142
10	1994	35	106	1	1	143
11	1995	35	106	1	1	143
12	1996	35	106	1	1	143
13	1997	35	116	1	1	153
14	1998	35	37	1	1	74
15	1999	35	42	2	1	80

Sumber : Kantor Dep. Agama Kota Madya Bukittinggi. Bukittinggi Dalam Angka 1991, Him 52, 1981. Him 148, 1995 Him 89, 1999 Him 88

**Tabel 15**  
**Jumlah Penduduk Menurut WNI dan WNA**

No.	Tahun	WNI			WNA		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	1980	-	-	70.288	-	-	403
2.	1989	37.584	38.969	76.553	98	96	194
3.	1990	41.248	42.361	83.069	103	99	202
4.	1991	41.428	42.638	84.066	107	103	210
5.	1992	41.488	42.742	84.230	105	102	207
6.	1993	42.948	42.226	85.174	106	94	200
7.	1994	42.418	43.676	86.094	70	79	149
8.	1995	42.769	44.216	86.985	70	81	151
9.	1996	43.519	44.581	88.100	181	135	316
10.	1997	43.519	44.581	88.100	181	135	316
11.	1998	43.519	44.581	88.100	181	135	316
12.	1999	43.591	44.786	88.377	181	135	316

Sumber : Kantor Statistik Kota Madya Bukittinggi. Bukittinggi Dalam Angka 1991 Hlm 16, 1981, Hlm 36, 1995, Hlm 30 dan 1999, Hlm 28

Pada tabel 15 terlihat bahwa antara tahun 1980 sampai tahun 1998 jumlah penduduk WNA mengalami sedikit peningkatan, walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 1994 dan tahun 1995. Sedangkan jumlah penduduk WNI cenderung mengalami peningkatan, walaupun pada tahun 1996, tahun 1997 dan tahun 1998 mengalami sedikit penurunan dan dalam tiga tahun tersebut mempunyai jumlah penduduk yang sama.

## 2.2. Sejarah Pemerintahan

Sebagai wilayah hukum adat, Bukittinggi dinamakan Kurai Limo Jorong, karena nagari ini terdiri dari lima jorong. Kelima jorong tersebut adalah Jorong Mandiangin, Jorong Koto Selayan, Jorong Aur Birugo, Jorong Tigo Baleh, dan Jorong Guguk Panjang. Nagari Kurai Lima Jorong diperintah oleh beberapa orang penghulu, yaitu penghulu nan dua puluh anam<sup>46</sup>.

Penghulu nan 26 terbagi ke dalam tiga kepangkatan, yaitu penghulu nan balimo terdiri dari 5 orang penghulu, penghulu nan sembilan terdiri dari 9 orang penghulu, dan penghulu nan duo baleh terdiri dari 12 orang penghulu. Di luar penghulu nan 26 terdapat 4 penghulu yang disamakan pangkatnya, yaitu Datuk Majo Basa, Datuk Batudung Putih, Datuk Nan Laweh, dan Datuk Asa Basa. Keempat penghulu ini memiliki kekuasaan sebagai Kepala Bandar. Apabila ada perhelatan memotong Jawi di Kepala Bandar, maka keempat penghulu inilah yang menerima adat<sup>47</sup>.

Penghulu nan 26 tidak punya kekuasaan tetap dalam sebuah nagari saja, tetapi berpindah-pindah dari satu nagari ke nagari lainnya dalam Nagari Kurai Limo Jorong. Oleh karena itu, terdapat penghulu tetap di tiap-tiap nagari, yaitu Pangkatuo Nagari, Pangkatuo Kampung, Pangkatuo Kubu, dan Pangkatuo Hindu. Pangkatuo Nagari berkuasa di nagarinya dan sepanjang adat harus selalu seiring sejalan dengan Penghulu nan 26<sup>48</sup>. Pangkatuo Kampung berada dibawah Pangkatuo Nagari dan berkuasa di kampungnya. Pangkatuo Kubu sama pangkatnya dengan Pangkatuo Kampung, sedangkan Pangkatuo Hindu berkuasa dalam sehindu (sepamili) saja<sup>49</sup>. Pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda, daerah Sumatera Barat dibagi

<sup>46</sup> Ibid, hlm. 12-14.

<sup>47</sup> Penghulu nan dua puluh anam dinamakan dengan "Pucuk Bulek" dan Pangkatuo Nagari dinamakan dengan "Urek Tunggang".

<sup>48</sup> M. Hadjerat, Op. Cit., hlm. 14-15.

<sup>49</sup> Mestika Zed, "Melayu Kopidaun: Eksploitasi Kolonial Dalam Sistem Tanaman Paksa Kopi di Minangkabau Sumatera Barat 1847-1908", **Thesis MA**, Jakarta: Universitas Indonesia. 1983, hlm. 32.

ke dalam tiga residensi yang dikepalai oleh residen. Ketiga residensi itu adalah *Residensi Padangsche Bovenlanden* meliputi daerah pedalaman Sumatera Barat dengan pusatnya di Bukittinggi, *Residensi Padangsche Benenlanden* yang meliputi daerah pesisir dengan pusatnya di Padang, dan *Residensi Tapanoeli* dengan pusatnya di Air Bangis tetapi kemudian dipindahkan ke Sibolga<sup>50</sup>.

Masing-masing residensi terdiri dari beberapa afdeling yang dikepalai oleh asisten residen. Dibawahnya terdapat beberapa onder-afdeling yang dikepalai oleh Controleur. Onder-afdeling merupakan unit administrasi terendah yang diduduki oleh pejabat Belanda. Dibawah onder-afdeling kekuasaan pemerintahan baru dipegang oleh bumiputera atau penguasa Minangkabau. Controleur sebagai kepala onder-afdeling memegang posisi penting, karena ia merupakan penghubung antara Pemerintahan Belanda dengan Pemerintahan Minangkabau<sup>51</sup>.

Pemerintahan Minangkabau sebagai penguasa pribumi dibawah *Controleur* dalam struktur Pemerintahan Hindia Belanda, merupakan perantara antara Pemerintah Belanda dengan rakyat. Untuk memperlancar pelaksanaan kekuasaan, berpedoman kepada sistem pemerintahan tradisional Minangkabau yang sudah ada, Belanda menciptakan sistem kelarasan yang terdiri dari beberapa nagari.

Struktur Pemerintahan Minangkabau yang dipegang oleh penguasa pribumi pada dasarnya mengikuti konsep pemerintahan lokal yang telah disusun oleh de Stuer<sup>52</sup> sebelumnya. Berdasarkan kepada konsep pemerintahan lokal susunan de Stuer tersebut, maka dibentuk administrasi lokal dengan kekuasaan tertinggi dipegang oleh Laras dan sebagai unit terkecil dari sistem pemerintahan ditempatkan oleh Penghulu Suku<sup>53</sup>.

<sup>50</sup> Ibid.

<sup>51</sup> Sartono Kartodirdjo, "Pengantar Sejarah Indonesia Baru Jilid II: 1500-1900, Dari Emporium ke Imporium", Jakarta: Gramedia. 1987, hlm. 361-368.

<sup>52</sup> de Stuer adalah Residen Militer Pemerintah Hindia Belanda 1824-1829.

<sup>53</sup> Lindayanti, "Birokrasi Dalam Sistem Laras di Minangkabau Pada Tahun 1823-1914", *Laporan Penelitian*. Padang: Pusat Penelitian Universitas Andalas. 1988, hlm. 24-25.

Laras sebagai unit administrasi lokal tertinggi dalam struktur Pemerintahan Minangkabau dikepalai oleh seorang Kepala Laras atau dikenal dengan nama Tuanku Laras. Laras membawahi beberapa nagari yang dikepalai oleh Kepala nagari dan disebut dengan Penghulu Kepala. Kemudian nagari membawahi sejumlah suku yang dikepalai oleh Penghulu Suku<sup>54</sup>. Pembentukan administrasi lokal ini meliputi wilayah kekuasaan yang berhasil direbut dari kekuasaan Paderi, yaitu meliputi lima jorong. Jorong-jorong tersebut adalah Jorong Tigo Baleh, Aur Birugo, Koto Selayan, Mandiangin dan Guguk Panjang.

Dengan dibentuknya sistem kelarasan oleh Pemerintah Belanda, maka Nagari Kurai Lima Jorong dijadikan satu kelarasan yang diperintah oleh seorang Laras. Tiap-tiap jorong yang kemudian disebut nagari diperintah oleh seorang penghulu kepala. Kemudian kelima jorong yang ada digolongkan ke dalam dua bagian. Bagian pertama terdiri dari tiga jorong, yaitu Jorong Tigo Baleh, Aur Birugo dan Koto Selayan. Bagian kedua terdiri dari dua jorong, yaitu Jorong Mandiangin dan Guguk Panjang. Kedua bagian ini masing-masing dikepalai oleh seorang Penghulu Kepala. Kedua penghulu kepala itu tidak memperoleh gaji yang tetap. Akan tetapi, selanjutnya kedua penghulu tersebut mendapat gaji tetap, maka nagari-nagari (jorong) yang digolongkan ke dalam dua bagian tersebut, dipisahkan kembali menjadi lima jorong seperti semula dan setiap jorong dikepalai oleh seorang penghulu kepala<sup>55</sup>.

Pada tahun 1858, yaitu masa Laras Tuanku Kurai, Kelarasan Kurai Lima Jorong disatukan dengan Banuhampu menjadi satu kelarasan. Penyatuan ini berdasarkan Surat Keputusan Jenderal Mayor Militer dan Sipil Gubernur Sumatera 16 Juni 1857 No. 135 yang diperintah oleh seorang kepala laras. Pengangkatan kepala laras ditunjuk dari salah satu penghulu kepala dari beberapa nagari.

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> Ishaq Thaher, et al. (Ed.), "Sejarah Sosial Di Daerah Sumatera Barat", Jakarta: Depdikbud, Ditjarahnitra, PIDSN. 1984, hlm. 51.

Kepala laras yang terpilih dilantik oleh pejabat Belanda dan mendapat surat untuk menduduki jabatannya. Tuanku laras yang mengepalai Kelarasan Kurai dan Banuhampu merupakan mata tombak Pemerintahan Belanda untuk menguasai daerah-daerah di sekitar Sumatera Barat<sup>56</sup>.

Setelah Nagari Kurai disatukan dengan Banuhampu menjadi satu kelarasan, maka yang menjadi kepala laras bergantian antara orang Kurai dengan Banuhampu. Tunaku Laras pertama adalah Urip gelar Rajo Mantari yang berasal dari Kurai. Setelah Urip meninggal, maka penggantinya ditunjuk Chatib Babaju Ameh dari Banuhampu. Tahun 1897 Laras Chatib meninggal, lalu digantikan oleh si Tahoe gelar Datoekasa Radjo dari Kurai. Akan tetapi, ia meninggal setelah sebelas bulan memerintah dan digantikan oleh Datuk Bandaro Panjang dari Banuhampu<sup>57</sup>. Sampai berakhirnya sistem kelarasan di Sumatera Barat, selalu bergantian orang Kurai dengan Banuhampu menjadi kepala laras.

Kemudian sistem pemerintahan di Sumatera Barat mengalami perubahan bentuk. Menurut *Staatsblad* 1913 No. 321, Pemerintah Hindia Belanda mengubah sistem kelarasan menjadi bentuk pemerintahan distrik. Maka, secara otomatis Laras Kurai-Banuhampu dihapuskan dan kepala-kepala Nagari Tigo Baleh, Koto Selayan, Mandiangin, Guguk Panjang, dan Aur Birugo berada dibawah perintah *Districthoofd* Bukittinggi. Kemudian nama *Districthoofd* ini diganti dengan nama kademangan dibawah perintah seorang Demang<sup>58</sup>.

Setelah berubahnya sistem kelarasan menjadi bentuk pemerintahan distrik, maka Bukittinggi merupakan satu distrik yang berada dibawah onder-afdeling Agam Tuo Afdeling Agam. Distrik Bukittinggi dibagi ke dalam dua onderdistrik, yaitu onderdistrik Sariak-Bukittinggi dan IV Koto. Dibawah onderdistrik Sariak-Bukittinggi

<sup>56</sup> Taufik Abdullah, Op. Cit., hlm. 1.

<sup>57</sup> M. Hadjerat, Op. Cit., hlm. 28.

<sup>58</sup> Ibid, hlm. 29.

terdapat dua nagari, yaitu Banuhampu Sungai Puar dan Bukittinggi. Dibawah onderdistrik IV Koto terdapat Nagari IV Koto<sup>59</sup>.

Pada tahun 1942 Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Daerah kekuasaan Belanda (Indonesia) beralih ke tangan Jepang. Bentuk pemerintahan pada zaman Pendudukan Jepang tidak jauh berbeda dengan Pemerintahan Belanda. Perbedaannya terletak pada nama-nama yang diberikan. Kota Bukittinggi yang pada zaman Belanda bernama *Fort de Kock*, maka pada zaman pendudukan Jepang bernama Bukittinggi *Syi Yaku Shi* (Kota Bukittinggi Baru). Kemudian istilah keresidenan diganti dengan *Syu*. Dibawah *Syu* adalah *Buco* (luhak atau kabupaten). Seterusnya *Gun* (kedemangan) dikepalai oleh *Gunco*. Tingkat yang paling rendah adalah *Son* (kenagarian) yang dipimpin oleh *Sonco*<sup>60</sup>.

Pada Zaman Pendudukan Jepang ini, Kota Bukittinggi dijadikan tempat kedudukan komandemen Jepang dibawah pimpinan Jenderal Kobayasi. Sebagai pusat pemerintahan militer untuk seluruh wilayah Sumatera di Bukittinggi berkedudukan panglima tentara (*Gunsyireikan*) yang disebut *Saiko Syikikan*. Dibawah itu terdapat kepala pemerintahan militer yang dijabat oleh Kepala Staf Tentara ke dua puluh lima, pemerintahannya disebut *Gunseikanbu* yang memiliki departemen-departemen sebagai berikut: Departemen Dalam Negeri, Kepolisian, Kehakiman, Industri, Keuangan, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pembukuan, Penerangan, Pemindahan dan Pengiriman, serta Meteorologi. Masing-masing departemen dipimpin oleh seorang direktur dibawah pengawasan Departemen Dalam

<sup>59</sup> Nagari Banuhampu Sungai Puar mempunyai 11 jorong, yaitu: Sariak, Sungai Puar, Batu Palano, Ladang Laweh, Batagak, Padang Luar, Pakan Sinayan, Padang Laweh, Cingkariang, Taluak dan Kubang Putih. Nagari Bukittinggi mempunyai lima jorong, yaitu: Tigo Baleh, Koto Selayan, Aur Birugo, Mandiangin dan Guguk Panjang. Nagari IV Koto mempunyai 8 jorong, yaitu: Koto Tuo, Koto Panjang, Sungai Landir, Balingka, Malalak, Guguak Tabek Sarajo, Koto Gadang dan Sianok. J.R. Chaniago, "Penduduk Bukittinggi Sebelum Perang: Sebuah Kerangka Studi", dalam Anhar Gonggong, et al. (Ed.), **Komunikasi Antar Suku Bangsa dan Pembauran**, Jakarta: Depdikbud, Ditjarahnitra, PIDSN. 1983, hlm. 42.

<sup>60</sup> Taufik Abdullah, Op. Cit., hlm. 108.

Negeri<sup>61</sup>. Pada masa itu, Kota Bukittinggi juga menjadi pusat latihan Gyugun untuk daerah Sumatera Barat bagian Utara. Selain itu, juga telah didirikan Kantor Berita Domei yang menjadi pusat berita untuk wilayah Sumatera.

Setelah memasuki zaman kemerdekaan, Kota Bukittinggi berstatus sebagai kota administratif dengan walikota pertamanya Bermawi St. Rajo Ameh<sup>62</sup>. Pada tiap-tiap nagari di Kurai Lima Jorong didirikan Dewan Perwakilan Nagari (DPN) berdasarkan maklumat Residen Sumatera Barat tanggal 21 Mei 1946. Pemimpin negeri terdiri dari Wali Nagari (WN), Dewan Harian Nagari (DHN), dan Dewan Perwakilan Nagari (DPN). Akan tetapi, Residen Sumatera Barat tidak dapat mensyahkan wali-wali negeri tersebut berhubung dengan datangnya surat dari Wali Nagari Mandiangin tanggal 29 Oktober 1946 No. 79. Isi surat tersebut adalah pemberitahuan bahwa Gubernur Sumatera Barat berdasarkan Undang-Undang DPN di Sumatera Barat tidak harus melakukan pelantikan kembali terhadap wali-wali nagari di Kurai Lima Jorong dan 11 nagari (11 nagari) yang lain dalam Kota Bukittinggi Baru (Kota Bukittinggi), karena nagari-nagari itu pada tanggal 17 Agustus 1945 sudah masuk ke dalam kota tersebut. Saat itu masing-masing nagari diberi hak otonomi untuk mengatur rumah tangganya (jadi otonomi dalam otonomi). Seharusnya wali-wali nagari dalam Kota Bukittinggi Baru menjadi pegawai pemerintah kota dan DPN-DPN-nya dihapuskan serta segera dibentuk Dewan Perwakilan Kota. Walaupun demikian, dalam prakteknya Pemerintah Kota Bukittinggi memberi pekerjaan langsung kepada wali-wali nagari di Kurai, surat-surat dinas serta pemberitahuan langsung dialamatkan kepada mereka<sup>63</sup>.

Pada tanggal 12 Maret 1947 diadakan rapat wali-wali nagari beserta anggota-anggota Dewan Harian Nagari Kurai memutuskan

<sup>61</sup> Ibid, hlm. 108-109.

<sup>62</sup> Segala peninggalan bangsa asing dalam wilayah Kota Bukittinggi adalah tanggung jawab pemerintah kota. *Kompas*, 15 Nopember 1987, hlm. VIII.

<sup>63</sup> M. Hadjerat, Op. Cit., hlm. 32-33.

bahwa Nagari Tigo Baleh, Koto Selayan, Mandiangin, Guguk Panjang, dan Aur Birugo dijadikan satu otonomi, yaitu otonomi Kurai Lima Jorong.

Pada zaman revolusi nasional, Bukittinggi menjadi pusat perjuangan untuk wilayah tersebut. Dalam keadaan darurat kota tersebut pernah menjadi tempat kedudukan Gubernur Sumatera Barat. Setelah kemerdekaan Indonesia diakui oleh Belanda, Bukittinggi ditetapkan sebagai Ibukota Propinsi Sumatera Tengah yang daerahnya meliputi Propinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi sekarang<sup>64</sup>. Kemudian juga dijadikan markas komando Divisi III Banteng, yakni kesatuan tentara yang berada di Sumatera Tengah. Didudukinya Kota Medan dan Pematang Siantar oleh Belanda menyebabkan markas komandemen yang sebelumnya berkedudukan di Prapat dipindahkan ke Bukittinggi.

Pada tahun 1948 Moh. Hatta menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan pusat untuk memimpin perjuangan di wilayah Sumatera yang berkedudukan di Bukittinggi<sup>65</sup>. Pada tahun 1950-an Kota Bukittinggi sebagai ibukota Propinsi Sumatera Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Pemerintahan Daerah No. 1/1957 dan Peraturan Pemerintah No. 5/1957 serta Penetapan Presiden No. 5/1960<sup>66</sup>, status Kota Bukittinggi menjadi daerah kotapraja. Perkembangan selanjutnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Pokok Pemerintahan Daerah No. 18/1965, status Bukittinggi dirubah menjadi daerah tingkat II Kotamadya.

<sup>64</sup> Drs. Dahlan Mansur, et al., "Minangkabau", Djakarta: Bhatara, 1970, hlm. 158. Dalam Taufik Abdullah, Op. Cit., hlm. 2, 181.

<sup>65</sup> Ibid, hlm. 182.

<sup>66</sup> Pindahanya Pusat Pemerintahan Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang tahun 1958 menyebabkan Bukittinggi mengalami penurunan dalam berbagai bidang, terutama dalam pembangunan kota.

Ada beberapa peristiwa penting yang menyangkut birokrasi pemerintahan Kota Bukittinggi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1976 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Juni 1976 No. 16/39, telah dibentuk Badan Pertimbangan Daerah yang susunannya terdiri dari seorang ketua, dua orang wakil ketua dan seorang sekretaris. Kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1974, kedudukan sekretaris kotamadya daerah yang tadinya merangkap sebagai sekretaris dewan, menjadi terpisah atau berdiri sendiri. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1980, Kotamadya Bukittinggi dibagi ke dalam 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Guguk Panjang, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh. Pembentukan 3 kecamatan ini merupakan perampingan secara administratif dari lima jorong yang sebelumnya merupakan lembaga pemerintahan terendah. Pelaksanaan pembagian 3 kecamatan dimulai tahun 1981 seiring dengan direalisirnya pembentukan kelurahan yang sebelumnya bernama kampung. Hal ini dilakukan sebagai realisasi dari Undang-Undang No. 5 tahun 1979<sup>67</sup>. Dalam perkembangan selanjutnya dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang pelaksanaannya diberlakukan pada tahun 2001, Kotamadya Bukittinggi kemudian disebut dengan nama Kota Bukittinggi.

<sup>67</sup> Kantor Sensus dan Statistik. Bukittinggi Dalam Angka 1981.

## **BAB III**

### **MOBILITAS SOSIAL PENDUDUK KOTA BUKITTINGGI**

#### **3.1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Mobilitas Sosial**

##### **3.1.1. Faktor Fisik**

Mobilitas sosial Kota Bukittinggi relatif tinggi jika dibandingkan dengan kota-kota lain yang ada di Propinsi Sumatera Barat (kecuali Kota Padang). Kondisi ini seperti yang telah disebutkan, sebenarnya telah terjadi sejak zaman dahulu, terutama sejak zaman Pemerintah Hindia Belanda.

Dalam perjalanan sejarah dapat dikatakan bahwa dibangunnya berbagai fasilitas kota oleh Pemerintah Hindia Belanda di Bukittinggi, terutama pasar dan sekolah, pada gilirannya telah memberikan peluang bagi para perantau untuk melakukan mobilitas vertikal. Pasar telah menaikkan taraf sosial ekonomi mereka, dan sekolah, khususnya Sekolah Raja, telah melahirkan golongan terdidik (intelektual). Mereka muncul sebagai elite kota dan mempunyai akses terhadap berbagai informasi perkembangan masyarakatnya<sup>1</sup>. Selain itu, keberadaan pasar dan sekolah tersebut juga telah mengakibatkan tingginya tingkat mobilitas horisontal, yaitu berupa perpindahan

<sup>1</sup> Zulqayyim, "Sejarah Kota Bukittinggi (1837-1942)". Tesis. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. 1996, hlm. 12-13.

tempat tinggal, baik perpindahan yang permanen maupun perpindahan yang tidak permanen.

Proses perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain kemudian diperlancar dengan sarana transportasi yang memadai. Tahun 1841 Pemerintah Hindia Belanda membuat jalan raya yang menghubungkan daerah pedalaman Minangkabau dengan Kota Padang sebagai kota pelabuhan. Pembuatan jalan dari Padang ke Pariaman dengan menyusuri sepanjang Lembah Anai ke Padang Panjang terus ke Batusangkar dan Bukittinggi<sup>2</sup>. Terbukanya jalan-jalan tersebut mengakibatkan mobilitas sosial penduduk pedalaman semakin tinggi.

Setiap tahun bahkan selama beberapa tahun sebagian besar dari pemuda meninggalkan nagarinya untuk menjual hasil kerajinan dan berdagang barang-barang lainnya. Tidak hanya para pengrajin yang pergi berdagang ke pasar, tetapi juga bagi mereka yang bekerja di bidang pertanian. Lamanya masa panen menyebabkan banyak waktu luang untuk mereka bisa pergi ke pasar Bukittinggi, baik sebagai pedagang maupun penjual jasa lainnya.

Penyebab terjadinya mobilitas yang tidak kalah pentingnya adalah pola pemukiman yang diciptakan oleh Pemerintah Hindia Belanda yang sekarang lokasinya berada di pusat Kota Bukittinggi. Berkembangnya asrama militer<sup>3</sup> di tengah-tengah Kota Bukittinggi pada zaman Pemerintah Hindia Belanda menjadi daya tarik bagi penduduk daerah lain, terutama dari nagari-nagari sekitar Bukittinggi untuk berdagang di pasar Bukittinggi. Keberadaan militer dalam jumlah besar dan berada di wilayah yang ramai memberikan motivasi untuk menjadikan mereka sebagai konsumen yang potensial. Para pedagang membawa hasil pertanian dan barang kerajinan untuk diperjualbelikan di pasar Bukittinggi dan salah satu konsumen

<sup>2</sup> Ishaq Thayer, et al., *Sejarah Sosial di Daerah Sumatera Barat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1983/1984, hlm. 14.

<sup>3</sup> Ishaq Thayer dan Lindayanti, "Hari Jadi Kota Bukittinggi", Makalah

terbesar diharapkan adalah para tentara tersebut.

Dari uraian singkat tersebut, terlihat bahwa mobilitas sosial ke Kota Bukittinggi telah terjadi sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda. Dengan bertitik tolak dari lintasan sejarah tersebut, maka mobilitas sosial penduduk yang terjadi antara tahun 1980 sampai tahun 1998 disebabkan salah satunya oleh faktor yang bersifat pisik, baik yang dikategorikan sebagai daya tarik kota maupun yang dikategorikan sebagai daya dorong desa. Faktor pisik yang merupakan daya tarik kota berhubungan dengan kondisi kota yang dapat dilihat dan dirasakan langsung, yaitu dibangunnya berbagai fasilitas kota, seperti yang telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya tersebut. Diantara fasilitas kota yang cukup menonjol sebagai penyebab terjadinya mobilitas atau gerakan penduduk yang terus menerus adalah keberadaan pasar, sekolah, sarana transportasi, sarana hiburan atau rekreasi, dan lain-lain.

Keberadaan pasar (Atas dan Bawah) di Kota Bukittinggi yang telah berdiri sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda, telah memberikan lahan bagi penduduk setempat, baik penduduk luar kota maupun dalam kota, untuk latihan atau proses pembelajaran berusaha dalam rangka meningkatkan kehidupan sosial ekonomi<sup>4</sup>. Kemudian berdirinya Pasar Aur Kuning secara resmi pada tahun 1980<sup>5</sup>, memicu semakin banyaknya arus migrasi dan mobilitas penduduk, baik dalam kota maupun luar kota Bukittinggi. Selanjutnya berdirinya sekolah-sekolah dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Usmar Amin, Ketua Bappeda Kota Bukittinggi, tanggal 10 Mei 2001 di Kantor Pemda Bukittinggi.

<sup>5</sup> Pada tahun 1980, tepatnya tanggal 20 Desember 1980, dikeluarkan kebijakan pemerintah berupa pemindahan pusat konveksi dan perdagangan dari Pasar Atas dan Pasar Bawah ke Pasar Aur Kuning. Pada tahun 1981 perdagangan grosir semakin ramai di Pasar Aur Kuning. Pasar itu sudah bisa dikatakan sebagai pusat perdagangan terbesar di kawasan Sumatera. Pedagang-pedagang semakin banyak jumlahnya, apalagi setelah didukung oleh fasilitas berupa los-los dan toko-toko yang dibuat oleh Pemda Bukittinggi. Pedagang-pedagang yang membeli barang dalam bentuk grosir ke Pasar Aur Kuning Bukittinggi semakin meningkat jumlahnya (Wawancara dengan Pegawai Dinas Pasar Kota Bukittinggi, Syamsu Nauman pada tanggal 10 Juni 2001).

Sekolah Menengah Umum di Kota Bukittinggi dan tersedianya sarana angkutan yang memadai serta ditunjang oleh fasilitas infrastruktur<sup>6</sup>, yaitu dibangunnya jalan-jalan raya yang menghubungkan daerah satu dengan daerah lainnya, maka mobilitas penduduk semakin bertambah tinggi.

Keadaan Kota Bukittinggi yang memiliki fasilitas hidup yang baik tersebut semakin menarik minat penduduk sekelilingnya untuk melakukan migrasi atau mobilitas. Selain peningkatan sarana perhubungan, perkembangan industri dan perdagangan yang terus mengalami kemajuan juga menyebabkan tingkat migrasi mengalami kenaikan pesat. Dengan kondisi tersebut, kesempatan kerja semakin terbuka, sehingga didorong keinginan untuk memperbaiki kehidupannya dalam bidang materi, maka penduduk sekitarnya melakukan migrasi atau mobilitas ke Kota Bukittinggi.

Migrasi atau mobilitas dapat dilakukan oleh siapa pun dengan tujuan yang beraneka ragam, baik yang berasal dari desa maupun yang berasal dari kota. Akan tetapi, penduduk yang berasal dari desa lebih berminat bermigrasi atau melakukan mobilitas jika dibandingkan dengan penduduk kota. Hal ini dikaitkan dengan daya dorong desa, yaitu keadaan desa yang serba kurang, terutama fasilitas fisik desa yang terbatas bahkan sama sekali tidak ada. Misalnya lapangan kerja yang sedikit dan tidak memiliki keanekaragaman jenis pekerjaan. Pekerjaan yang tersedia di desa tidak lepas dari tanah atau pertanian. Bagi mereka yang memiliki tanah pertanian yang cukup luas, maka ia dikatakan sebagai petani. Sedangkan bagi mereka yang sedikit memiliki tanah atau tidak memilikinya sama sekali, maka kebanyakan menjadi petani penggarap atau menjadi buruh tani. Selain itu, disebabkan juga oleh tidak adanya sarana yang mendukung kelancaran hidup yang layak, tidak adanya sarana hiburan, dan lain-lain.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Antony Samawil, Kepala Bagian Pemerintahan Pemda Kota Bukittinggi, tanggal 9 Mei 2001.

Kondisi tersebut mengakibatkan sebagian besar penduduk desa menjadi sangat tergantung kepada tanah. Keadaan ini menimbulkan berbagai keadaan kehidupan keluarga petani, antara lain:

1. Keadaan setengah pengangguran (*under-employment*). Dalam keadaan demikian tenaga para petani hanya terpakai sebagian untuk menggarap sawah, sehingga ada tenaga lebih.
2. Dengan dipakainya teknologi dalam proses produksi tanaman sawah (*huller*), tenaga-tenaga petani wanita yang biasanya ikut aktif mulai kehilangan kesempatan tersebut. Di musim panen padi kita dapat melihat para wanita di desa yang besar jumlahnya berebut ingin ikut memotong padi, karena kurangnya pekerjaan di desa.
3. Kesempatan lain yang mereka coba untuk menambah penghasilan keluarga adalah produksi dengan modal kecil serta berdagang dengan modal kecil pula. Meskipun kegiatan-kegiatan tersebut biasa dilaksanakan oleh banyak wanita di pedesaan, masalah yang dihadapi adalah tidak adanya modal yang cukup untuk mengembangkan usaha mereka<sup>7</sup>.

Agar kehidupan para petani tidak tergantung dari tanah garapan saja, maka dengan melakukan mobilitas atau migrasi ke kota akan terjadi perpindahan kehidupan dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian. Untuk dapat melakukan perpindahan pekerjaan, maka salah satu jalan adalah melakukan migrasi atau mobilitas ke daerah-daerah yang memiliki diferensiasi pekerjaan. Daerah-daerah tersebut merupakan daerah tujuan yang dianggap lebih maju, yaitu kota. Dalam hal ini kota dikategorikan sebagai daerah yang telah memiliki fasilitas-fasilitas fisik yang lebih baik yang menunjang kehidupan penduduk ke arah yang lebih baik.

<sup>7</sup> R.H. Pardoko, *Mobilitas, Migrasi dan Urbanisasi*. Bandung: Penerbit Angkasa. 1987, hlm.14.

Pada perkembangan selanjutnya banyak migran sebagai pelaku mobilitas, baik yang menempuh jarak dekat maupun yang menempuh jarak jauh, umumnya lebih suka menuju ke pusat-pusat perdagangan dan industri yang penting di Bukittinggi. Oleh karena itu, suatu gerakan berupa perpindahan penduduk yang dikatakan sebagai arus mobilitas dan arus migrasi terarah ke pusat-pusat industri dan perdagangan penting yang menyerap para migran atau para pelaku mobilitas tersebut.

Akan tetapi, tanpa mempersoalkan dekat jauhnya perpindahan, mudah atau sulit, setiap migrasi atau mobilitas mempunyai tempat asal, tempat tujuan dan bermacam-macam rintangan yang menghambat. Dari beberapa penghalang yang ada, faktor jarak perpindahan merupakan faktor yang selalu ada. Adapun faktor-faktor migrasi yang terpenting adalah faktor-faktor yang terdapat di daerah asal, daerah tujuan, penghalang antara dan faktor pribadi<sup>8</sup>. Misalnya, faktor di daerah asal adalah keadaan tanah yang kurang subur, sempitnya lahan pertanian yang tersedia, dan lain-lain. Faktor di daerah tujuan, yaitu hampir setiap orang tertarik pada iklim yang enak, suatu sistem persekolahan yang baik, dan lain-lain. Faktor penghalang antara adalah jauhnya jarak yang harus ditempuh, sehingga memerlukan biaya yang banyak. Kemudian faktor pribadi bisa beraneka ragam tergantung pada masing-masing pelaku migrasi atau pelaku mobilitas. Seperti karena perkawinan yang mengharuskan istri atau suami mengikuti pasangannya ke kota atau karena perubahan kehidupan berhubung kematian orang tua atau salah satu keluarga yang mengharuskan berpindah tempat tinggal. Hal ini terjadi pada salah satu informan yang bekerja sebagai pedagang di Pasar Aur Kuning. Ia mengatakan bahwa:

“Saya dilahirkan dan dibesarkan di Padang Pariaman. Tetapi orang tua saya berasal dari Bukittinggi. Waktu saya selesai kuliah di Padang (Unand), saya pandah ke Bukittinggi bersama ibu dan

<sup>8</sup> Everett S. Lee, *Teori Migrasi*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada. 1991, hlm. 8.

saudara-saudara, karena ayah kami meninggal. Kami berniat untuk tinggal dan menetap di Kota Bukittinggi. Kebetulan juga sebelumnya saya dapat jodoh seorang pedagang di Pasar Aur Kuning Bukittinggi. Maka, menetaplah saya sampai sekarang di Kota Bukittinggi.”<sup>9</sup>

Siklus-siklus perdagangan mempengaruhi volume migrasi untuk banyak cara, tetapi cara-cara siklus itu mempengaruhi perbandingan faktor-faktor negatif dan positif di daerah asal dan daerah tujuan. Di suatu daerah yang dianggap maju maupun di daerah yang sedang berkembang, perbedaan antara daerah-daerah dalam arti ekonomis maupun kenikmatan hidup tampak bertambah jelas. Secara umum perbedaan ekonomi antara daerah maju dan sedang berkembang makin bertambah nyata dan hampir di semua daerah perbedaan antara daerah pertanian dan daerah perkotaan semakin mencolok.

Kondisi daerah perkotaan sebagai daya tarik kota bagi para migran atau pelaku mobilitas diantaranya adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi yang meningkat berperan penting dalam mengurangi faktor penghalang antara. Perhubungan menjadi lebih mudah dan transportasi relatif murah. Seandainya tidak terjadi perubahan dalam imbalan faktor-faktor di daerah asal dan daerah tujuan pun, yaitu hanya teknologi yang maju, akan meningkatkan volume migrasi. Apalagi jika terjadi perkembangan pesat di daerah tujuan yang menjadi pusat-pusat perdagangan dan industri, migrasi ke daerah itu bertambah besar dengan pesat dan relatif hanya sedikit migran dan juga tidak banyak orang-orang lain bermigrasi dari daerah itu kembali ke tempat asal. Secara umum, faktor-faktor di tempat asal yang sangat mendesak orang yang gagal dalam bidang ekonomi atau sosial untuk bermigrasi. Mereka yang dianggap gagal tersebut kebanyakan adalah orang yang tidak berpendidikan dan orang yang tidak mempunyai keahlian serta tidak

<sup>9</sup> Wawancara dengan Siska Sulistia, salah satu informan pelaku mobilitas permanen, tanggal 6 dan 10 Juni 2001 di rumahnya Jalan Bermawi Bukittinggi.

mempunyai lahan pertanian untuk dijadikan sumber mata pencaharian. Seperti yang dikemukakan oleh beberapa orang pelaku mobilitas ulang alik yang bekerja sebagai buruh angkat di Pasar Aur Kuning sebagai berikut:

“Saya tidak tamat SD. Saya sekolah sampai kelas 3, setelah itu ikut bapak kerja di sawah orang menjadi buruh tani. Penghasilan dari kerja memburuh di desa tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup saya dan keluarga. Apalagi setelah saya menikah dan punya anak, saya tidak mampu lagi memberi mereka makan yang cukup. Oleh karena itu, saya pergi ke kota. Karena saya tidak punya keahlian apa pun dan modal saya hanya tenaga, saya menjadi buruh angkat di Pasar Aur Kuning. Pekerjaan ini sangat memberi arti bagi saya, terutama untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.”<sup>10</sup>

Selanjutnya di suatu daerah yang maju ekonominya perbedaan-perbedaan antara kota-desa kelihatan mencolok, karena perkembangan industri dan kemajuan pendidikan. Kemudian faktor penyebab yang tidak kalah pentingnya adalah informasi tentang daerah tujuan yang sampai ke daerah asal. Apabila informasi tentang daerah tujuan positif, maka menjadi hal penting dalam menghilangkan faktor penghalang antara. Faktor-faktor penghalang antara telah diatasi oleh migran yang lebih dahulu, maka hal itu mengurangi kesulitan-kesulitan yang menghambat migran-migran kemudian. Ibaratnya migran-migran yang dahulu itu telah menciptakan jalan-jalan di atas segala macam rintangan seperti jalan-jalan besar yang melalui daerah pedesaan.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, arah pergerakan penduduk ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu jarak, biaya dan informasi yang diperoleh<sup>11</sup>. Faktor jarak dan biaya dapat dilihat dalam

<sup>10</sup> Diolah dari hasil wawancara beberapa informan sebagai pelaku mobilitas ulang alik, tanggal 6 Mei dan 10 Juni 2001 di tempat yang berbeda-beda di dalam lokasi Pasar Aur Kuning.

<sup>11</sup> Ida Bagus Mantra, *Mobilitas Penduduk Sirkuler Dari Desa Ke Kota Di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada. 1991, hlm. 2-3.

satu kesatuan, karena dengan kemajuan di bidang transportasi maka jarak sudah merupakan fungsi daripada uang dan biaya. Akan tetapi, jarak tetap merupakan faktor penting dalam penentuan arah, setidaknya-tidaknya dalam penentuan bentuk mobilitas yang diambil penduduk. Pelaku mobilitas yang berasal dari daerah yang berjarak jauh dengan daerah tujuan cenderung menghasilkan mobilitas permanen, yang berjarak sedang cenderung menghasilkan mobilitas sirkuler, dan yang berjarak dekat cenderung cukup dilakukan secara ulang alik (*commuting*).

Dalam konteks ini, faktor jarak tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi migran potensial di desa, serta informasi tentang daerah tujuan yang seringkali datang dari migran yang sudah lama menetap di sana, sehingga diharapkan dapat membantu mereka dalam penyesuaian diri di daerah tujuan. Kontribusi dari migran terdahulu di kota sangat besar dalam membantu migran baru yang berasal dari desa atau daerah yang sama dengan mereka, terutama pada tahap-tahap awal dari mekanisme penyesuaian diri di daerah tujuan. Para migran baru tidak hanya sekedar ditampung di rumah migran lama, tetapi juga dicukupi kebutuhan makannya dan dibantu untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai kemampuan dan relasi yang dimiliki. Hal tersebut menyebabkan lapangan kerja tertentu di suatu kota atau daerah didominasi oleh migran-migran yang berasal dari desa atau daerah tertentu pula, karena proses mencari pekerjaan biasanya berkisar antara relasi migran sederhana juga. Seperti beberapa informan yang bekerja sebagai pedagang grosir di pasar Aur Kuning sebagai berikut:

“Pada awalnya saya ikut abang saya berdagang di Pasar Atas. Abang saya telah lebih dahulu pindah dan memiliki beberapa toko batik. Saya dipercaya untuk mengelola salah satu tokonya. Kebutuhan tempat tinggal dan makan sehari-hari ditanggung oleh abang saya. Kemudian setelah beberapa tahun saya diberi tambahan modal untuk membuka usaha sendiri, juga jualan batik. Kebetulan Pasar Aur Kuning sudah berdiri dan sedang berkembang dengan

pesatnya, sehingga usaha saya berjalan lancar, tentunya tidak lepas dari bantuan abang-abang saya tersebut.”<sup>12</sup>

Informasi yang didapat oleh calon migran tentang daerah tujuan ada yang positif dan ada yang negatif. Informasi positif mendorong calon migran untuk melakukan mobilitas. Biasanya diperoleh dari migran yang berhasil di kota. Sedangkan informasi negatif biasanya datang dari migran yang gagal, sehingga mengakibatkan dampak yang sebaliknya. Kemudian, di sektor perhubungan, khususnya transportasi yang meningkat, telah memperlancar arus barang dan penumpang serta pertumbuhan antara daerah-daerah.

“Sejak dibukanya jalan-jalan baru dan dibangunnya jalan raya by pass saat ini, arus mobilitas bertambah meningkat. Penduduk yang berada di sekitar Kota Bukittinggi dan mereka yang berasal dari luar kota, banyak berdatangan ke sini dengan mudah. Para pendatang tersebut selain untuk belanja keperluan usahanya di pasar grosir juga untuk berekreasi di lokasi-lokasi wisata yang ada di Kota Bukittinggi. Bagi mereka yang membeli barang dalam partai besar untuk diperdagangkan kembali di daerahnya, relatif tidak mengalami kesulitan dalam membawa barang tersebut sampai ke tempat asalnya. Demikian juga dengan mereka yang datang untuk berekreasi, mudah mendapatkan angkutan.”<sup>13</sup>

### **3.1.2. Faktor Non-Pisik**

Faktor non-pisik dapat dikategorikan ke dalam penyebab yang tidak langsung dapat dilihat dan dirasakan. Diantara unsur-unsur non-

<sup>12</sup> Wawancara dengan Hendri St. Rangkayo Mulia, salah satu informan pelaku mobilitas permanen yang bekerja sebagai pedagang batik di Pasar Aur kuning, tanggal 6 Mei dan 10 Juni 2001.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Drs. Antony Samawil, Kepala Bagian Pemerintahan Pemda Kota Bukittinggi, tanggal 9 Mei 2001.

pisik yang menyebabkan penduduk melakukan mobilitas atau gerakan adalah tradisi merantau yang kuat dalam budaya Minangkabau, perubahan mental atau pola pikir terhadap sesuatu hal yang selama ini dianggap sakral, perubahan gaya hidup dan orientasi masa depan, dan lain-lain.

Sebagai salah satu kota yang terletak di daerah inti Alam Minangkabau, maka salah satu faktor pendorong terjadinya urbanisasi ke kota Bukittinggi adalah tradisi merantau pada masyarakat Minangkabau<sup>14</sup>. Dalam penelitian ini, urbanisasi adalah salah satu bentuk mobilitas permanen di Kota Bukittinggi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa timbulnya gejala perkotaan di Bukittinggi seiring pula dengan dijadikannya rantau kota sebagai salah satu tujuan merantau masyarakat Minangkabau.

Salah satu daya tarik kota Bukittinggi adalah keberadaan kota telah memberikan lapangan kerja baru dan kesempatan berusaha yang luas bagi penduduk. Kota telah memberikan peluang bagi mereka untuk melepaskan diri dari keterikatannya dengan tanah pertanian dan bekerja sebagai pegawai pemerintah dan swasta, pedagang, buruh atau penjual jasa lainnya. Oleh karena itu, selain merupakan perpindahan fisik, urbanisasi juga mengandung pengertian perubahan mental, karena menuntut adanya perubahan pola pikir, bersikap dan bertindak. Urbanisasi menuntut adanya kemampuan gerak yang dengan segera dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan lingkungan perkotaan<sup>15</sup>.

Pada perkembangan selanjutnya, seperti halnya yang telah diuraikan dalam faktor penyebab terjadinya mobilitas yang bersifat fisik, maka faktor penyebab mobilitas yang bersifat non-fisik pun berhubungan dengan dekat jauhnya jarak perpindahan, adanya tempat asal, tempat tujuan dan bermacam-macam rintangan yang

<sup>14</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Studi Sosial Universitas Gadjah Mada. 1998, hlm. 51, 157-162.

<sup>15</sup> S. Menno dan Mustamin Alwi, *Antropologi Perkotaan*, Jakarta: Rajawali Press. 1992, hlm. 78.

menghambat sebagai faktor penghalang antara dan faktor pribadi.

Pada kenyataannya dalam merespon keadaan suatu daerah, terdapat perbedaan sikap dari para migran dan calon migran tentang daerah asal dan daerah tujuan. Banyak faktor yang menarik orang untuk pergi ke daerah tujuan yang tidak dapat dimengerti secara tepat. Dalam hal ini perlu dikemukakan bahwa yang mendorong untuk melakukan migrasi bukan hanya faktor-faktor yang nyata yang terdapat di tempat asal dan tempat tujuan, melainkan persepsi seseorang terhadap faktor-faktor itu. Kepentingan pribadi, intelektualitas, kesadaran tentang kondisi di lain tempat mempengaruhi penilaiannya tentang keadaan daerah asal.

Kemudian pengetahuan di daerah tujuan bergantung kepada hubungan-hubungan seseorang atau sumber informasi yang tersedia secara umum. Ada orang yang dengan gigih menolak perubahan-perubahan, baik perubahan tempat tinggal maupun perubahan lainnya. Ada pula yang menyambut dengan gembira perubahan-perubahan itu. Untuk beberapa orang harus ada alasan yang benar-benar memaksa untuk bermigrasi, sedangkan bagi orang lain dorongan sedikit saja atau suatu janji sudah cukup sebagai alasan untuk bermigrasi. Salah satu dorongan yang sifatnya pribadi adalah keinginan yang kuat untuk mencari pengalaman di Kota Bukittinggi, terutama sikap migran kelompok usia muda yang lari dari sektor pertanian. Beberapa informan yang bekerja sebagai buruh angkat dan pelayan toko mengemukakan alasannya sebagai berikut:

"Saya sebenarnya punya sebidang tanah untuk digarap kepunyaan orang tua. Saya memang melakukannya untuk memenuhi kebutuhan hidup saya dan keluarga. Akan tetapi, kehidupan saya tidak mengalami perubahan apa pun dan saya merasa jenuh dengan pekerjaan itu-itu juga. Saya pergi ke kota untuk mencari pengalaman dan bekerja sebagai apa saja. Yang penting tidak sebagai petani atau buruh tani. Rasanya hidup saya lebih bergairah dengan pekerjaan

baru dan banyak berhubungan dengan teman-teman dari luar daerah saya. Saya menjadi lebih banyak tahu.”<sup>16</sup>

Faktor-faktor lain yang cenderung menyebabkan naiknya volume migrasi adalah makin tajamnya perbedaan diantara penduduk. Dalam suatu masyarakat sederhana atau agraris, spesialisasi sangat terbatas dan perbedaan-perbedaan antara penduduk tidak begitu kelihatan. Akan tetapi, pada masyarakat yang maju terdapat bermacam-macam spesialisasi dan terdapat suatu kesadaran akan adanya dan perlunya keahlian khusus. Jadi, di suatu daerah agraris anak-anak dididik untuk mendapat pekerjaan di kota dan meningkatnya beraneka ragam keterampilan. Hal itu menyebabkan penduduk lebih mudah terpengaruh oleh faktor-faktor positif yang terpecah pada berbagai tempat.

Selanjutnya, faktor-faktor non-pisik yang juga sangat berperan dalam proses pengambilan keputusan seseorang untuk melakukan mobilitas atau migrasi adalah nilai-nilai kehidupan yang dipahami. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa perubahan status perkawinan mengharuskan perubahan orientasi tentang masa depan. Biasanya berhubungan dengan status tempat tinggal yang mereka tempati sebagai keluarga baru. Pada awalnya memang tidak menjadi suatu pemikiran untuk tetap tinggal di rumah orang tua atau mertua, tetapi lama kelamaan timbul perasaan sungkan dan keinginan untuk mandiri. Untuk mewujudkan harapan tersebut, salah satu usaha yang mereka lakukan adalah melakukan perubahan pekerjaan yang dapat membawa mereka hidup mandiri dengan kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga sendiri.

Kondisi sosial ekonomi di daerah asal yang tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan (*needs*) seseorang menyebabkan orang-orang tersebut ingin pergi ke daerah lain yang

<sup>16</sup> Diolah dari hasil wawancara dengan pedagang di Pasar Atas, buruh angkat di Pasar Aur Kuning, dan pelayan toko di Pasar Bawah dan Pasar Aur Kuning. Wawancara dilakukan pada tanggal 6 Mei, 15 Mei dan 10 Juni di tempat yang berbeda-beda.

dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi, antara daerah asal dan daerah tujuan terdapat perbedaan nilai kefaedahan wilayah (*place utility*). Daerah tujuan mempunyai nilai kefaedahan yang lebih tinggi dibandingkan daerah asal untuk dapat menimbulkan mobilitas penduduk. Setiap individu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Karena itu penilaian terhadap daerah asal dari masing-masing individu di masyarakat tersebut berbeda-beda. Jadi, proses pengambilan keputusan untuk pindah dari masing-masing individu berbeda pula.

Beberapa ahli kependudukan seperti Lee (1966), Todano (1979) dan Titus (1982)<sup>17</sup> berpendapat bahwa motivasi utama seseorang untuk pindah adalah motif ekonomi. Motif ini berkembang karena adanya ketimpangan ekonomi yang rasional, dimana mobilitas ke kota mempunyai dua harapan, yaitu untuk memperoleh pekerjaan dan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi daripada yang diperoleh di daerah asalnya (desa).

Motivasi ekonomi merupakan suatu hal yang rasional yang menumbuhkan harapan-harapan, baik yang rasional maupun yang tidak rasional. Harapan yang rasional adalah memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Sementara itu, harapan yang tidak rasional berupa khayalan yang tinggi tentang pekerjaan dan penghasilan yang akan diperoleh di kota yang dapat memberinya kehidupan yang lebih baik tanpa didukung oleh kemampuan dan kesempatan yang ada. Harapan yang tidak rasional tersebut memiliki akibat positif dan akibat negatif. Walaupun demikian, akibat positif yang bisa diterangkan dalam hal ini adalah keinginan yang kuat untuk berubah yang akan menjadi daya dorong bagi aktivitas yang rasional. Keinginan untuk melakukan aktivitas rasional, yaitu bekerja dan berusaha sehingga mereka melakukan mobilitas. Seperti yang dikemukakan oleh beberapa orang informan yang melakukan mobilitas ulang alik sebagai buruh angkat sebagai

<sup>17</sup> Ida Bagus Mantra, Op. Cit., hlm. 2.

berikut:

“Pada dasarnya saya memang tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik. Akan tetapi, saya tetap berharap untuk mendapatkannya, karena saya yakin bahwa rezeki seseorang berada di tangan Tuhan. Saya juga melihat bahwa orang yang seperti saya tidak punya kemampuan lebih baik dari saya bisa mengalami perubahan kehidupan, yaitu secara ekonomi meningkat.”<sup>18</sup>

Masalah ekonomi merupakan daya dorong yang besar untuk meninggalkan desa. Daya tariknya adalah harapan kesempatan ekonomi di kota, yaitu harapan mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang lebih besar. Mobilitas ulang alik paling banyak dilakukan, karena terdapat beberapa faktor hal ini terjadi, yaitu faktor yang mendorong seseorang keluar dari desanya dan faktor-faktor yang menarik orang untuk tetap tinggal di daerah asalnya. Kekuatan (*forces*) yang menyebabkan orang tetap tinggal di daerah asal disebut kekuatan sentripetal dan kekuatan yang mendorong seseorang untuk meninggalkan daerahnya disebut kekuatan sentrifugal.

Kekuatan sentrifugal timbul karena kekurangan kesempatan kerja, baik di bidang pertanian maupun non-pertanian, terbatasnya fasilitas pendidikan, dan lain-lain. Kekuatan sentripetal yang menyebabkan seseorang tetap tinggal di daerah asal adalah menjaga tanah warisan orang tua, menunggu ayah atau ibu yang sudah tua, sifat gotong royong dan saling tolong di daerah asal, pemilik tanah di desa mempunyai status yang lebih tinggi dari mereka yang tidak memilikinya, kehidupan di desa yang lebih tenang, biaya hidup yang lebih murah, dan lain-lain. Kondisi ini terutama terjadi pada para pelaku mobilitas sirkuler yang bekerja sebagai pedagang dan pelaku

<sup>18</sup> Diolah dari beberapa orang buruh angkat sebagai pelaku mobilitas ulang alik pada waktu dan tempat yang berbeda.

mobilitas ulang alik yang bekerja sebagai pegawai negeri yang bertempat tinggal di luar Kota Bukittinggi<sup>19</sup>. Salah satu pedagang yang bertempat tinggal di Padang Panjang mengemukakan alasannya sebagai berikut:

“Saya lebih suka tetap tinggal di kampung saya, walaupun harus bolak-balik dan kadang-kadang menginap di kota karena dagangan yang harus saya urus yang memerlukan waktu lebih dari satu hari. Daerah saya lebih tenang dan dekat dengan keluarga yang bisa memberi bantuan pada saya, kalau terjadi sesuatu. Biaya hidup juga lebih murah dan hubungan saya dengan tetangga atau orang sekampung sangat baik, sehingga saya lebih memilih untuk tetap tinggal di daerah asal saya. Saya juga punya orang tua yang harus saya jaga. Selain itu, orang tua punya cukup tanah yang penggarapannya diserahkan kepada saya. Orang-orang sekampung saya sangat menghargai saya dan keluarga karena keberadaan kami dianggap patut untuk dihargai.”

Kemudian pelaku mobilitas ulang alik yang bekerja sebagai pegawai negeri yang bertempat tinggal di Baso Kabupaten Agam, mengemukakan alasannya sebagai berikut:

“Saya pergi ke Kota Bukittinggi setiap hari untuk bekerja sebagai pegawai pemerintah. Sebelumnya saya bekerja sebagai pegawai negeri juga di daerah saya dimana saya tinggal bersama keluarga. Akan tetapi, karena pindah tugas, saya harus bolak-balik pergi ke kota, yaitu ke Kota Bukittinggi ini. Sebenarnya saya bisa saja pindah rumah di kota, tetapi saya lebih suka tetap bertempat tinggal di daerah saya. Di daerah saya saat ini saya merasa tenang dan nyaman. Kondisinya tenang dan saya bisa beristirahat dengan enak.”

<sup>19</sup> Wawancara dengan pedagang batik di Pasar Aur Kuning, yaitu salah seorang pelaku mobilitas ulang alik, tanggal 10 Juni 2001. Kemudian wawancara dengan Bapak Drs. Usmar Amin, Ketua Bappeda Kota Bukittinggi, tanggal 10 Mei 2001 di Kantor Pemda Bukittinggi.

Migran sirkuler secara resmi masih tercatat sebagai penduduk daerah asal. Anak, istri, dan orang tua mereka masih tetap tinggal di daerah asal. Hal ini menyebabkan hubungan mereka dengan kampung halaman lebih intensif dibandingkan dengan migran menetap, tetapi kurang intensif kalau dibandingkan dengan migran ulang-alik yang setiap hari pulang ke desa asal. Tujuan utama migran sirkuler dan ulang alik ke kota adalah bekerja agar dapat penghasilan untuk dibawa pulang.

Migran sirkuler yang mondok di daerah tujuan tetap mengadakan kontak dengan masyarakat daerah asal, baik melalui kunjungan rutin maupun melalui kunjungan peristiwa-peristiwa vital, seperti kelahiran, kematian dan perkawinan. Hal ini terjadi pada salah satu migran yang bekerja sebagai pedagang di Pasar Atas. Ia mengemukakan hal tersebut sebagai berikut:

“Saya di kota tinggal di kamar kos bersama teman-teman saya yang sama-sama berdagang. Tetapi, saya bukan penduduk kota. Dalam KTP saya masih sebagai penduduk daerah asal saya. Setiap minggu saya pulang ke daerah asal saya ke rumah orang tua saya, untuk melepas lelah dan kerinduan saya dengan keluarga. Saya juga bisa pulang mendadak kapan saja kalau di kampung ada acara-acara keluarga, seperti saudara saya menikah, salah satu keluarga saya meninggal dunia, dan lain-lain.”<sup>20</sup>

Faktor informasi juga dapat menjadi faktor penyebab non-pisik terjadinya arus mobilitas, seperti halnya faktor penyebab yang bersifat pisik. Informasi tentang kemungkinan kesempatan kerja di daerah perkotaan disertai dengan informasi tentang tingginya upah buruh (*labor wage*) di luar desa mereka, menimbulkan harapan-harapan yang merangsang mereka untuk meninggalkan desa, terutama penduduk golongan umur produktif. Mereka yang tanpa modal dan

<sup>20</sup> Wawancara dengan salah seorang pelaku mobilitas sirkuler yang bekerja sebagai pedagang kaki lima di Pasar Atas, tanggal 10 Juni 2001.

pengalaman mengambil resiko mencari pekerjaan di daerah perkotaan dan yang berhasil akan berperan sebagai faktor tarik (*pull factor*) perkotaan yang kuat. Seperti yang terjadi pada salah seorang buruh angkat di Pasar Aur Kuning. Ia mengemukakan pengalamannya ketika pertama kali datang ke kota untuk mencari pekerjaan sebagai berikut:

“Saya memang orang asli Kurai. Pendidikan saya tamat SD. Selama di tempat asal saya, saya tidak mempunyai pekerjaan. Setiap hari saya hanya mondar-mandir ke sana kemari untuk main-main saja. Kemudian ada teman yang mengajak pergi ke kota. Karena kami jenuh tinggal di desa tanpa pekerjaan dan tanpa uang, kami berangkat bersama. Di kota kami berusaha mencari kerja berdasarkan informasi yang didapat sebelumnya. Tapi, kenyataannya yang kami harapkan tidak semudah yang kami terima. Sebelum mendapat pekerjaan yang cocok dengan kemampuan kami, kami bekerja serabutan saja dan tinggal di tempat-tempat seadanya. Karena tanpa kemampuan yang memadai dan pengalaman kerja sebelumnya, baru dapat pekerjaan sebagai buruh angkat setelah lama kami menunggu kesempatan itu.”<sup>21</sup>

Faktor lain yang mendorong pelaku mobilitas untuk pergi ke kota adalah semangat yang tinggi dan keuletan berusaha. Kondisi ini terjadi pada para pengrajin dan pedagang yang dahulunya adalah petani yang memiliki tanah pertanian yang cukup, tetapi tanahnya kurang subur. Mereka beranggapan bahwa kesempatan untuk hidup lebih baik bisa mereka raih, walaupun mereka berasal dari daerah yang kurang subur. Dengan modal keahlian dan keterampilan yang mereka miliki, maka mulai pergi ke kota untuk mengembangkan keahliannya. Salah satu informan yang bekerja sebagai pengrajin bordir sekaligus pedagang di Pasar Atas mengemukakan pengalamannya sebagai berikut:

<sup>21</sup> Wawancara dengan salah seorang pelaku mobilitas ulang alik yang bekerja sebagai buruh angkat di Pasar Aur Kuning, tanggal 6 Mei 2001.

"Saya mulai usaha dagang dengan modal sedikit uang untuk menyewa tempat dagang dan beberapa kain dan baju yang saya bordir dan saya jahit sendiri. Setelah beberapa tahun, saya mulai mempunyai modal yang lumayan dan dapat memperbesar usaha saya. Saya bikin berbagai jenis bordiran dalam bahan yang digunakan untuk sprei, sarung bantal, taplak meja, baju kurung, kebaya, dan hiasan-hiasan bordir lainnya. Pada mulanya saya mengalami sepi pembeli. Tapi, lama-lama saya banyak langganan karena mereka senang dengan bordiran saya dan harganya tidak terlalu mahal. Ini karena saya jual bahan dengan mengambil untung sedikit, tetapi dengan harapan banyak yang terjual. Dari sedikit-sedikit itulah akhirnya usaha saya menjadi maju."<sup>22</sup>

Dari uraian tersebut terlihat bahwa faktor dari dalam diri, yaitu semangat yang tinggi dan keyakinan yang kuat, telah memberikan dorongan yang besar untuk berusaha. Hal ini merupakan faktor yang tidak nyata dan hanya dapat dirasakan oleh dirinya sendiri dan secara fakta dapat dilihat dari hasil kerjanya yang semakin maju.

## **3.2. Proses Mobilitas Sosial Horisontal**

### **3.2.1. Mobilitas Permanen**

Mobilitas permanen adalah mobilitas yang dilakukan oleh para migran dengan terjadinya perpindahan tempat tinggal secara tetap. Biasanya bentuk mobilitas permanen terjadi di Kota Bukittinggi dilakukan oleh penduduk yang berasal dari luar wilayah administratif Kota Bukittinggi. Jarak daerah asal para migran tetap tersebut tidak ditentukan batasannya, walaupun dapat dikatakan cukup jauh karena berada di luar wilayah administratif daerah tujuan. Diantaranya dari daerah Padang Panjang, Padang Pariaman, Solok, Payakumbuh, Maninjau, dan daerah-daerah lainnya.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Sisnawati, pelaku mobilitas ulang alik yang bekerja sebagai pengrajin sekaligus pedagang di Pasar Atas, pada tanggal 10 Juni 2001.

Dalam penelitian ini para pelaku mobilitas permanen adalah mereka yang bekerja sebagai pedagang, baik pedagang grosir maupun pedagang eceran, pengusaha dan pengusaha yang merangkap sebagai pengrajin. Dari 35 informan, pelaku mobilitas permanen terdiri dari 8 orang informan. Proses mobilitas mereka meliputi tahun dan proses kepindahan dari daerah asal ke daerah tujuan, tahun dan proses memulai usaha di daerah tujuan, lamanya aktivitas kerja setiap harinya, kondisi usaha dan tempat tinggal di daerah tujuan.

Para pelaku mobilitas permanen mulai pindah dari daerah asal pada tahun 1980 sampai tahun 1998, yaitu tahun 1980, 1983, 1985 (2 orang), 1990, 1997, dan 1998. Proses kepindahan mereka dapat digolongkan ke dalam 2 kelompok, sehingga terdapat 2 pola proses kepindahan sebagai berikut:

1. Pola pertama adalah mereka yang pindah ke daerah tujuan atas dorongan sendiri dan tidak punya saudara atau keluarga di daerah tujuan.
2. Pola kedua adalah mereka yang pindah ke daerah tujuan atas dorongan keluarga dan mempunyai saudara atau keluarga di daerah tujuan

Pola pertama melakukan perpindahan atau migrasi disebabkan kondisi daerah asal yang tidak mendukung ke arah kemajuan. Keinginan untuk mengubah nasib menjadi lebih baik sangat kuat, sehingga mereka melakukan perpindahan dengan harapan bisa berdagang atau berusaha yang berpenghasilan lebih tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Dorongan yang kuat tersebut didukung oleh beberapa informasi yang mereka peroleh, baik yang didapat sendiri maupun yang didapat dari teman sekampung yang kebetulan sukses di daerah tujuan.

Pada awal perpindahan mereka berangkat sendiri tanpa membawa keluarga, khususnya bagi mereka yang sudah berkeluarga. Setelah sampai di kota atau daerah tujuan, mereka berusaha mencari

teman yang mereka kenal di kampung. Biasanya teman sekampung tersebut akan memberi bantuan berupa penampungan sementara dan kemudian dicarikan sebagai tempat tinggal, baik kos maupun kontrak rumah. Pada saat menumpang di rumah teman tersebut, bantuan yang mereka peroleh tidak sebatas tempat tinggal saja, tetapi juga diperkenalkan kepada relasi-relasi kerja yang biasa memasok barang. Ketika mereka sudah mendapat tempat tinggal sendiri dan sudah memiliki beberapa kenalan untuk diajak kerja sama dalam proses pengadaan barang, maka pada saat itulah mereka mulai berdagang atau berusaha.

Pola kedua biasanya telah memiliki usaha di daerah asalnya, tetapi kondisi usahanya kurang berkembang. Atas dukungan dan informasi yang didapat dari saudara atau keluarga yang telah terlebih dahulu pindah ke kota dan berhasil dalam usahanya, maka mereka terpengaruh untuk melakukan hal yang sama. Sesampai di kota mereka langsung tinggal di rumah saudara atau keluarga yang sebelumnya memang sudah dibicarakan. Selain mendapat bantuan berupa tempat tinggal, mereka juga diberi makan gratis dan sedikit bantuan keuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Bahkan, ada beberapa orang yang diberi biaya atau ongkos untuk biaya perjalanan dari daerah asal menuju kota.

Pada permulaan tinggal dan menetap tidak membawa keluarga, sehingga tidak terlalu merepotkan saudara yang ditumpanginya. Setelah beberapa lama, baik setelah usahanya berjalan maupun baru memulai usaha, telah dicarikan tempat tinggal atau rumah kontrak. Setelah mendapat tempat tinggal sendiri, baru mereka membawa keluarganya (anak dan istri) dari kampung. Ada juga yang tinggal di rumah istri (rumah mertua), yaitu bagi mereka yang kebetulan istrinya bertempat tinggal di kota. Seperti dalam adat Minangkabau bahwa seorang suami akan tinggal di rumah istrinya sebagai urang sumando dalam waktu yang tidak ditentukan.

Pada umumnya, para pelaku mobilitas permanen tersebut setelah pindah dari daerah asal dan mulai menetap di daerah tujuan, secepat mungkin memulai usaha atau bekerja. Seperti halnya proses kepindahan, proses memulai usaha juga memiliki 2 pola sebagai berikut:

1. Pola pertama adalah mereka yang memulai usaha dengan modal sendiri dan merintis usaha dari nol tanpa bantuan keluarga.
2. Pola kedua adalah mereka yang memulai usaha dengan bantuan modal dari keluarga dan merintis usaha dengan bantuan keluarga juga.

Pola pertama biasanya memulai usaha dengan modal yang tidak begitu besar. Dengan berbekal modal seadanya dan keahlian yang mereka miliki dalam hal berdagang dan usaha kerajinan, merupakan modal dasar yang sangat berharga. Pada awalnya mereka membuka usaha kecil-kecilan, baik yang berdagang menyatu dengan tempat tinggalnya maupun yang terpisah. Sambil berusaha mereka melakukan hubungan dengan orang-orang yang dapat memperlancar usaha mereka. Setelah beberapa bulan atau beberapa tahun, usaha mereka mulai menampakkan hasil. Pada saat inilah mereka mulai mempunyai tempat tinggal sendiri, sehingga dapat membawa keluarganya dari kampung.

Pola kedua adalah mereka yang memulai usaha dengan bantuan keluarga, baik secara finansial maupun secara teknis pelaksanaannya. Biasanya modal yang mereka miliki cukup besar, karena telah punya modal sendiri dari hasil usahanya di kampung ditambah dengan modal pemberian keluarga. Pada saat awal berusaha, mereka langsung bisa menyewa toko atau petak los dan kebutuhan akan barang-barang dagangan telah diurus oleh saudara atau dipasok melalui usaha dagang saudara mereka. Setelah usahanya berjalan lancar dan bisa menangani sendiri, baru dilepas oleh keluarganya. Biasanya pada saat mereka telah punya langganan

dan pemasok barang sendiri.

Dalam rangka meningkatkan kegiatan berdagang atau berusaha yang mereka lakukan, mereka berusaha memanfaatkan waktu yang tersedia semaksimal mungkin. Lamanya aktivitas kerja setiap harinya tergantung kepada kebutuhan mereka masing-masing. Dalam hal ini terdapat 2 pola jam kerja sebagai berikut:

1. Pola pertama adalah mereka yang memiliki tempat berdagang atau berusaha menyatu dengan tempat tinggal, sehingga memulai aktivitas kerja antara jam 08.00 sampai jam 09.00 pagi dan berakhir tidak tentu waktunya.
2. Pola kedua adalah mereka memiliki tempat berdagang atau berusaha terpisah dengan tempat tinggal, sehingga mereka mulai berangkat kerja antara jam 06.00 sampai jam 08.00 dan kembali menutup toko antara jam 15.00 sampai jam 18.00.

Dari 2 pola jam kerja tersebut dapat diketahui berapa lama mereka bekerja setiap harinya. Dalam hal ini terdapat 2 pola jam kerja, yaitu mereka yang memiliki jam kerja tidak tentu dan mereka yang memiliki jam kerja tertentu. Bagi mereka yang memiliki jam kerja tertentu secara umum lamanya kerja setiap harinya antara 9 jam sampai 12 jam. Lamanya waktu kerja tersebut tidaklah mutlak, tetapi bisa berkurang atau bertambah disesuaikan dengan kebutuhan.

Lamanya bekerja setiap hari sangat mempengaruhi terhadap jumlah penghasilan atau pendapatan para pedagang dan pengusaha tersebut. Walaupun kondisi usaha mereka secara umum relatif baik, tetapi bagi mereka yang bekerja lebih lama sedikit lebih tinggi pendapatannya. Kondisi usaha yang baik tersebut mempengaruhi kondisi kehidupan mereka, terutama keadaan rumah tangga dan lain sebagainya. Salah satu kebutuhan pokok yang tampak dengan jelas adalah kondisi tempat tinggal yang mereka tempati. Bagi mereka yang usahanya maju secara pesat, kondisi

tempat tinggalnya pun lebih baik, sehingga mempengaruhi gaya hidup dan pandangan masyarakat sekitarnya.

Kemajuan yang mereka alami terutama terlihat setelah beberapa tahun tinggal dan menetap di kota. Kondisi mereka mengalami perubahan, baik secara ekonomi maupun sosial. Kesejahteraan hidup semakin meningkat dan banyak memiliki hubungan dengan orang-orang dari kelompok sosial yang beraneka ragam. Biasanya mereka mampu memiliki rumah sendiri bagi mereka yang hidup sebagai keluarga inti. Sedangkan bagi mereka yang tinggal bersama keluarga istri yang didalamnya ada mertua dan saudara-saudara istri, mampu memperbaiki kondisi rumah istrinya. Bahkan ada beberapa pedagang yang memiliki lebih dari satu buah rumah dan berbagai jenis usaha tambahan.

Kondisi tersebut sangat membanggakan mereka, sehingga informasi yang mereka bawa ketika mereka berkunjung ke daerah asalnya sangat mempengaruhi penduduk sekampungnya untuk mengikuti jejak mereka. Banyak dari mereka yang selamanya tinggal dan menetap di kota atau tidak kembali ke kampungnya, walaupun hubungan dengan daerah asal tetap mereka pelihara dengan baik.

### **3.2.2. Mobilitas Sirkuler**

Para pelaku mobilitas sirkuler dalam penelitian ini adalah mereka yang bekerja sebagai pedagang, baik pedagang grosir maupun pedagang eceran. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dari 35 informan yang dianggap sebagai pelaku mobilitas, 4 orang diantaranya adalah pelaku mobilitas sirkuler. Melihat jumlah sampelnya yang hanya 4 orang, maka pelaku mobilitas sirkuler ini merupakan pelaku mobilitas yang paling sedikit jika dibandingkan dengan pelaku mobilitas yang lainnya.

Proses mobilitas para pelaku mobilitas sirkuler meliputi aktivitas kerja sehari-hari, lamanya mereka bekerja atau jam kerja setiap harinya, lamanya mondok atau menginap di daerah tujuan, kondisi tempat menginap dan sarana angkutan yang dipergunakan untuk berangkat ke kota dan pulang kembali ke daerah asalnya.

Pada umumnya mereka bertempat tinggal di luar kota. Mereka bekerja setiap hari, walaupun kadang-kadang tidak bekerja beberapa hari untuk istirahat atau pulang kampung. Oleh karena bertempat tinggal di luar kota, mereka selalu berangkat kerja pagi-pagi sekali. Akan tetapi, ada pula pelaku mobilitas sirkuler yang secara administratif tercatat sebagai penduduk di daerah asalnya, tetapi tinggal di dalam Kota Bukittinggi sebagai penduduk musiman. Mereka tinggal di rumah-rumah kos atau kontrak dalam waktu yang tidak tentu atau tinggal di rumah kerabat bagi mereka yang punya famili di kota.

Para pelaku mobilitas sirkuler memiliki 3 pola jam keberangkatan kerja sebagai berikut:

1. Pola pertama adalah mereka yang tinggal di luar kota dengan jarak sedang dari tempat tinggalnya. Biasanya berangkat kerja antara jam 06.00 sampai jam 07.00, sehingga tiba di tempat kerja antara jam 06.30 sampai jam 07.30.
2. Pola kedua adalah mereka yang tinggal di luar kota dengan jarak cukup jauh dari tempat tinggalnya. Biasanya berangkat kerja antara jam 05.30 sampai jam 06.00, sehingga tiba di tempat kerja antara jam 06.30 sampai 07.30.
3. Pola ketiga adalah mereka yang tinggal di dalam kota. Biasanya berangkat kerja antara jam 06.00 sampai jam 08.00, sehingga tiba di tempat kerja antara jam 06.15 sampai jam 08.15.

Dari ketiga pola keberangkatan kerja tersebut, pada umumnya mereka mulai berdagang antara jam 08.00 sampai 09.00. Pada saat-saat tertentu bias saja terjadi perubahan waktu, tetapi hal ini sangat

jarang terjadi. Kemudian terdapat juga 3 pola jam keputungan kerja sebagai berikut:

1. Pola pertama adalah mereka yang bertempat tinggal di luar kota dengan jarak sedang dari tempat tinggalnya. Biasanya pulang kerja antara jam 15.00 sampai jam 17.00, sehingga tiba di rumah antara jam 15.30 sampai jam 18.00.
2. Pola kedua adalah mereka yang bertempat tinggal di luar kota dengan jarak cukup jauh dari tempat tinggalnya. Biasanya pulang kerja antara jam 15.00 sampai jam 16.00, sehingga tiba di rumah antara jam 16.00 sampai jam 18.00.
3. Pola ketiga adalah mereka yang bertempat tinggal di dalam kota. Biasanya pulang kerja antara jam 13.00 sampai jam 18.00, sehingga tiba di rumah antara jam 13.15 sampai jam 18.15.

Dari pola-pola jam keberangkatan dan keputungan kerja, maka dapat diketahui lamanya mereka bekerja setiap hari, sehingga mereka memiliki 3 pola jam kerja sebagai berikut:

1. Pola pertama memiliki jam kerja setiap hari antara 7 sampai 9 jam.
2. Pola kedua memiliki jam kerja setiap hari antara 7 sampai 8 jam.
3. Pola ketiga memiliki jam kerja setiap hari antara 7 sampai 10 jam.

Pelaku mobilitas sirkuler sering menginap atau mondok di tempat kerja dalam beberapa hari atau beberapa minggu tergantung kebutuhan. Hal ini dilakukan karena berbagai alasan, seperti ada urusan dengan para pelanggan, ada barang-barang yang harus dibersihkan dalam waktu yang cukup lama dan disebabkan karena tinggal di dalam kota sebagai penduduk musiman yang kos atau mengontrak rumah. Bagi mereka yang kos atau kontrak rumah, biasanya pulang ke kampungnya 1 kali seminggu atau pada hari-hari

khusus, seperti acara perkawinan, kematian, kelahiran, dan lain-lain.

Kondisi tempat menginap di tempat kerja bagi mereka yang menginap atau mondok tidak menjadi masalah serius. Mereka biasa tidur di atas bangku di toko dengan beralas tikar atau numpang di rumah kawan atau saudara yang kebetulan bertempat tinggal di kota. Sedangkan sarana angkutan yang digunakan adalah bis-bis antar kota bagi mereka yang tinggal di luar Kota Bukittinggi dengan jarak cukup jauh dan angkutan kota atau angkutan desa bagi mereka yang tinggal di luar kota dengan jarak sedang dan yang tinggal di dalam kota. Pada umumnya kondisi kendaraan cukup baik, walaupun banyak juga yang kondisi sudah tidak baik, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan selama perjalanan. Kondisi lalu lintas pun berjalan lancar, walaupun kemacetan kadang-kadang terjadi atau gangguan-gangguan teknis lainnya yang menghambat perjalanan mereka dari tempat tinggal ke tempat kerja.

### **3.2.3. Mobilitas Ulang Alik**

Dari tiga bentuk mobilitas yang telah disebutkan, mobilitas yang dominan terjadi di Kota Bukittinggi adalah mobilitas ulang alik. Seperti yang telah diuraikan dalam sub-bab sebelumnya, mobilitas ulang alik banyak terjadi karena salah satu penyebabnya adalah faktor budaya. Dalam hal ini berhubungan dengan pola migrasi orang Minangkabau, mereka bergerak pulang balik antara daerah rantau dan kampung halaman<sup>23</sup>.

Dalam kehidupan sehari-hari mobilitas ulang alik terjadi tidak hanya dalam satu waktu tertentu, tetapi hampir terjadi pada tiap waktu. Memang ada waktu-waktu tertentu terjadinya mobilitas ulang alik yang sangat padat dan intensitasnya sangat tinggi, yaitu pada pagi hari ketika anak-anak sekolah berangkat ke sekolah dan para

<sup>23</sup> Usman Pelly, *Urbanisasi dan Adaptasi: Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing*. Jakarta: LP3ES. 1998, hlm. 141.

pedagang dan pegawai ketika mulai melakukan aktivitasnya. Kemudian pada jam pulang kantor dan jam pulang sekolah juga mengalami hal yang sama, yaitu pada sore hari. Selain itu, mereka yang berprofesi sebagai pedagang dan penjual jasa kembali melakukan mobilitas pada sore hari juga pada saat mereka pulang ke daerahnya atau ke tempat tinggalnya, baik yang berjarak dekat maupun yang berjarak cukup jauh dari kota.

Mobilitas ulang alik pada pagi hari terlihat ramai di tempat-tempat pemberhentian bis antar-kota, tempat mangkal angkutan umum menuju kota dan di jalur-jalur jalan yang dilalui angkutan umum untuk mengambil penumpang selama di perjalanan. Diantara mereka ada yang bekerja sebagai pegawai negeri (guru), pelajar (anak sekolah), pedagang, buruh angkut, pelayan toko, dan sebagainya. Mobilitas di jalan raya semakin ramai, karena bukan hanya kendaraan umum yang memadati lalu lintas jalan, tetapi juga banyak kendaraan pribadi yang keluar masuk kota dengan tujuan yang beraneka ragam.

Tempat tinggal orang-orang yang melakukan mobilitas ulang alik tidak hanya berasal dari daerah yang termasuk dalam wilayah administratif Kota Bukittinggi, tetapi justru banyak dilakukan oleh orang-orang yang datang dari luar kota atau para migran yang bertempat tinggal di *hinterland* kota atau daerah sekitar kota, baik pinggiran kota Bukittinggi maupun yang termasuk ke wilayah Kabupaten Agam<sup>24</sup>.

Mobilitas ulang alik yang terjadi setiap hari tidak terlepas dari profesi yang dijalani oleh para pelaku mobilitas. Pelaku mobilitas non-permanen atau ulang-alik dalam penelitian ini adalah mereka yang bekerja atau mempunyai profesi sebagai buruh angkut, pedagang, pegawai, pengrajin dan pelayan toko. Keempat profesi ini dalam kenyataannya mengalami proses mobilitas yang berbeda-beda,

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Faisal Basir, pegawai Pemda Kota Bukittinggi, tanggal 14 dan 15 Mei 2001.

walaupun ada beberapa kesamaan dan dapat ditarik generalisasi pola mobilitasnya. Akan tetapi, untuk dapat melakukan hal tersebut akan diuraikan proses mobilitas satu per satu sesuai dengan profesi yang mereka jalani. Dari 35 orang informan yang dianggap sebagai pelaku mobilitas dalam penelitian ini, yang melakukan mobilitas ulang alik sebanyak 23 orang, yaitu 11 orang bekerja sebagai buruh angkat, 6 orang bekerja sebagai pegawai negeri, 5 orang bekerja sebagai pedagang (ada yang merangkap sebagai pengrajin sebanyak 2 orang), dan 1 orang sebagai pelayan toko. Pelaku mobilitas yang bekerja sebagai buruh angkat merupakan pelaku mobilitas yang dominan, yaitu 11 orang atau sekitar 47, 83 % dari jumlah keseluruhan, sehingga akan diuraikan terlebih dahulu proses mobilitas mereka.

#### **- Buruh Angkat**

Proses mobilitas para pelaku mobilitas yang bekerja sebagai buruh angkat meliputi aktivitas kerja sehari-hari yang mereka lakukan, jam kerja atau lamanya mereka bekerja setiap harinya, sarana angkutan yang dipakai sewaktu berangkat dan pulang kerja, dan kondisi angkutan yang mereka gunakan. Terdapat 4 pola pelaku mobilitas yang bekerja sebagai buruh angkat sebagai berikut:

Pola pertama, yaitu mereka yang memulai aktivitas kerja sekitar jam 04.00 berangkat dari tempat tinggalnya dan pulang kembali pada jam 16.00. Biasanya mereka yang menjadikan profesi buruh angkat sebagai kerja sampingan atau tambahan. Dalam pola pertama ini terbagi lagi menjadi 2 kategori, yaitu: Pertama, mereka yang berasal dari desa-desa yang merupakan kantong pertanian di daerah asalnya. Pada umumnya mereka memiliki sawah dan kebun, sehingga pekerjaan utama mereka adalah petani. Kedua, mereka yang mempunyai keahlian dalam bidang pertukangan atau kuli bangunan.

Kategori pertama secara ekonomi lebih baik dari yang lainnya yang mempunyai profesi yang sama, karena mereka memiliki pendapatan utama dari hasil tani dan hasil kebun untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Pada musim-musim panen mereka hanya memfokuskan kerja mereka pada pertanian dan perkebunan. Kemudian pada masa-masa setelah bertanam dan panen, mereka pergi ke Kota Bukittinggi (ke Pasar Aur Kuning) untuk menjadi buruh angkat. Mereka tidak pergi setiap hari, tetapi hanya pada hari-hari pakan saja, yaitu hari Rabu dan Sabtu. Ketidaktetapan waktu bekerja membuat mereka belum memiliki atau tidak memiliki langganan dari pedagang-pedagang yang barang-barangnya harus diangkat.

Kategori kedua secara ekonomi juga lebih baik dari pelaku mobilitas yang lainnya. Biasanya mereka berasal dari daerah-daerah yang ada di Bukittinggi dan desa-desa sekeliling Bukittinggi. Penghasilan menjadi tukang atau kuli bangunan ini biasanya lebih besar daripada menjadi buruh angkat. Mereka bekerja menjadi tukang atau kuli bangunan sifatnya pesanan. Apabila tidak ada pesanan maka mereka akan bekerja di Pasar Aur Kuning menjadi buruh angkat, terutama pada hari Rabu dan Sabtu. Selain itu, ada pula diantara mereka yang bekerja sebagai buruh angkat dengan tidak meninggalkan pekerjaan mereka sebagai tukang atau kuli bangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi, karena diantara mereka sebelumnya telah membuat kesepakatan dengan pemesan bangunan. Kesepakatan itu adalah mereka bekerja menjadi tukang atau kuli bangunan pada hari-hari selain hari Rabu dan Sabtu. Pada hari-hari pasar inilah mereka akan meninggalkan pekerjaannya dan kemudian dilanjutkan pada hari-hari biasa. Oleh karena mereka bekerja sebagai buruh angkat tetap pada hari Rabu dan Sabtu, maka mereka biasanya telah memiliki langganan tetap.

Pola kedua, yaitu mereka yang memulai aktivitas kerja pada jam 0.5.00 berangkat dari tempat tinggalnya dan pulang tidak tentu waktunya. Biasanya dilakukan oleh mereka yang menjadikan profesi buruh angkat sebagai pekerjaan utama. Mereka tidak memiliki lahan

di daerah asal atau keahlian dalam bidang yang lain. Setiap hari mereka pergi ke Pasar Aur Kuning untuk bekerja sebagai buruh, walaupun pada hari libur. Penghasilan mereka rata-rata tetap tiap hari, walaupun akan menjadi lebih besar pada hari-hari pasar. Oleh karena bekerja tiap hari dengan waktu seharian penuh, bahkan bisa sampai malam hari, maka mereka telah banyak memiliki langganan tetap. Biasanya mereka berasal dari daerah-daerah dalam wilayah administratif kota Bukittinggi.

Kondisi mereka yang pulang kerja tidak tetap waktunya dan kadang-kadang tidak pulang untuk beberapa hari, biasanya mereka tidur di gudang penumpukan barang sekaligus menjaganya. Biasanya mereka bekerja telah cukup lama dan mendapat kepercayaan penuh dari para pedagang atau pemilik toko. Dengan kepercayaan penuh inilah mereka mendapat upah atau gaji yang tetap diberikan per bulan, tentunya di luar upah lepas hariannya yang mereka terima sebagai buruh angkat. Kondisi ini dapat dikatakan bahwa mereka, selain sebagai pelaku mobilitas ulang alik juga menjadi pelaku mobilitas sirkuler.

Pola ketiga, yaitu mereka yang bekerja tidak tetap waktunya atau tidak memiliki jam kerja tertentu, baik ketika memulai aktivitasnya maupun ketika mengakhirinya. Biasanya mereka adalah para pemuda yang bekerja sambil lalu, sekedar mengisi waktu dan mendapatkan uang untuk kebutuhan makan sendiri sehari-harinya. Kebanyakan mereka belum menikah atau belum memiliki tanggungan hidup. Daerah asal mereka biasanya dari pinggiran kota atau kampung-kampung di sekitar Bukittinggi. Oleh karena bekerja sesuka hati, mereka tidak memiliki langganan tetap dan mereka mengangkat barang yang bersifat dadakan saja. Kadang-kadang pada hari-hari pasar pun ketika para buruh angkat bersemangat untuk bekerja, mereka tidak berangkat kerja dengan alasan malas atau hanya bermain-main saja, nongkrong di lapau-lapau untuk sekedar makan minum dan main domino.

Dari ketiga pola para pelaku mobilitas yang bekerja sebagai buruh angkat, maka kita dapat mengetahui jam kerja mereka setiap harinya. Dalam hal ini pun ada 3 pola yang sesuai dengan ketiga pola yang sebelumnya sebagai berikut: Pertama, para pelaku mobilitas yang bekerja selama 12 jam per hari, yaitu para buruh angkat yang termasuk ke dalam pola pertama yang memulai aktivitasnya dari jam 04.00 pagi sampai dengan jam 16.00 sore. Kedua, para pelaku mobilitas yang bekerja tidak tentu, tetapi memiliki jam tertentu pada saat memulai aktivitasnya, yaitu berangkat kerja jam 05.00 pagi dan pulang sore atau malam hari tidak tentu jamnya (lebih dari 12 jam per harinya). Mereka inilah yang termasuk ke dalam pola kedua. Ketiga, para pelaku mobilitas yang bekerja kurang dari 12 jam per hari, bahkan hanya 2 atau 3 jam saja, yaitu para buruh angkat yang termasuk ke dalam pola ketiga.

Pola jam kerja pertama memiliki keteraturan waktu yang hampir tetap, baik saat berangkat maupun pulang kerja, sehingga lamanya kerja per harinya menjadi tetap pula. Keteraturan waktu ini tidak terlepas dari lokasi rumah atau tempat tinggal mereka. Biasanya mereka bertempat tinggal di luar Kota Bukittinggi, yaitu daerah-daerah yang termasuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Agam. Jarak tempuh yang cukup jauh dari kota menyebabkan mereka berangkat pagi-pagi sekali dalam jam yang tetap supaya mudah mendapat tumpangan atau angkutan yang membawa ke tempat kerja. Juga disebabkan oleh kepentingan mereka sendiri dalam hal kesinambungan pekerjaan mereka, sehingga mereka tidak kehilangan langganan dan berusaha memanfaatkan waktu secepat-cepatnya untuk memperoleh barang angkutan sebanyak-banyaknya. Hal ini tentu saja mereka lakukan untuk menjaga kepercayaan dari pedagang atau pemilik toko dan menerima penghasilan dalam jumlah yang lebih besar.

Demikian juga ketika mereka pulang ke rumah, mereka akan berusaha pulang tepat pada waktunya. Selain menghindari telat sampai di rumah (malam hari), juga menghindari kemacetan lalu lintas

karena banyaknya antrian penumpang yang akan kembali ke daerahnya di luar Kota Bukittinggi. Apabila mereka telat pulang atau pulang melebihi waktu yang biasa, maka waktu istirahat pada malam hari akan berkurang, padahal mereka harus bangun pagi-pagi sekali untuk kembali berangkat kerja keesokan harinya. Kemudian, yang lebih penting menjadi perhatian mereka adalah mereka akan kesulitan untuk mendapat tumpangan karena angkutan umum (angkutan desa) yang akan membawa mereka kembali ke daerahnya sudah jarang. Hal ini dimungkinkan karena angkutan umum belum begitu banyak jumlahnya dan beroperasi tidak sampai malam hari.

Pola jam kerja kedua memiliki keteraturan waktu saat berangkat kerja, tetapi tidak tetap waktunya ketika pulang kerja, sehingga lamanya mereka bekerja tidak tentu ukurannya. Hal ini dilakukan secara sengaja, karena mengejar penghasilan yang lebih besar. Apabila masih ada yang harus dikerjakan pada hari itu, maka mereka akan tetap bekerja, walaupun sudah melebihi jam kerja normal.

Pola jam kerja ketiga merupakan pola yang tidak memiliki keteraturan jam kerja dan lamanya bekerja sangat kurang. Ketidakteraturan ini bisa dikaitkan dengan tempat tinggal mereka yang berada di dalam kota dan status mereka yang masih sendiri atau tidak memiliki tanggungan hidup, serta kebiasaan kurang baik yang masih mereka jalankan, yaitu tidak adanya motivasi untuk mendapatkan uang lebih banyak yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka sendiri.

### **- Pegawai Negeri**

Pegawai (pegawai negeri) dalam penelitian ini diwakili oleh 5 orang dari 23 orang pelaku mobilitas ulang alik. Proses mobilitas yang bekerja sebagai pegawai negeri meliputi aktivitas kerja sehari-hari, jam kerja atau lamanya bekerja setiap harinya, sarana angkutan yang dipakai, dan kondisi angkutan yang mereka pakai serta kondisi lalu

lintas dan jalan saat mereka berangkat dan pulang kerja.

Pada umumnya para pegawai negeri bekerja setiap hari, yaitu dari hari Senin sampai Sabtu atau 6 hari dalam 1 minggu (hari Minggu libur). Apabila kita melihat jam kerja atau lamanya mereka bekerja setiap harinya, terdapat 3 pola jam kerja sebagai berikut:

1. Jam kerja setiap harinya dimulai pada pukul 07.30 pagi sampai 14.30 atau 15.30 sore. Ini jam kerja normal untuk 4 hari kerja dalam 1 minggu, yaitu hari Senin sampai Kamis. Apabila ada pekerjaan yang belum selesai pada suatu hari dan harus diselesaikan hari itu juga, maka mereka akan menambah jam kerja atau kerja lembur. Biasanya sampai jam 17.00 sampai jam 18.00.
2. Jam kerja untuk hari Jumat dimulai pada pukul 07.30 pagi sampai 11.30 siang. Kondisi ini disesuaikan dengan pelaksanaan shalat jumat untuk kaum muslimin.
3. Jam kerja untuk hari Sabtu dimulai pukul 07.30 pagi sampai 13.00 siang, karena hari Sabtu adalah akhir pekan.

Untuk hari Jumat dan hari Sabtu, apabila ada pekerjaan yang harus diselesaikan hari itu juga, maka setelah pelaksanaan shalat Jumat, mereka kembali bekerja yang biasanya dimulai pukul 13.30 siang sampai waktu tidak tentu. Demikian juga dengan hari Sabtu, kalau terpaksa harus kerja lembur bisa sampai jam 17.00 atau jam 18.00. Akan tetapi, kondisi ini sangat jarang terjadi, apalagi hari Jumat dan hari Sabtu adalah akhir pekan.

Dengan melihat jam kerja tersebut, maka dapat dikatakan bahwa para pelaku mobilitas ulang alik yang bekerja sebagai pegawai negeri memiliki 3 pola jam kerja dalam 1 minggu. Dari uraian tersebut, maka lamanya jam kerja juga memiliki 3 pola sebagai berikut:

1. Untuk hari Senin sampai Kamis, lamanya jam kerja kurang lebih 7 sampai 8 jam. Apabila dikurangi istirahat siang selama 1 jam, maka jam kerja yang efektif adalah 6 sampai 7 jam.
2. Untuk hari Jum'at, lamanya jam kerja kurang lebih 4 jam.
3. Untuk hari Sabtu, lamanya jam kerja kurang lebih 5 sampai 6 jam.

Untuk sampai ke kantor atau tempat kerja tepat pada waktunya, mereka biasanya berangkat lebih awal dari rumah atau tempat tinggalnya. Dalam hal ini, terdapat 2 pola jam keberangkatan sebagai berikut:

1. Bagi para pelaku mobilitas yang bertempat tinggal di dalam kota, biasanya mereka berangkat kerja antara pukul 06.30 – 07.00, bahkan ada juga yang berangkat antara pukul 07.15 – 07.30, karena jarak kantor dengan tempat tinggal cukup dekat.
2. Bagi para pelaku mobilitas yang bertempat tinggal di luar kota, biasanya mereka berangkat kerja antara pukul 05.30 – 06.30, bahkan ada yang lebih pagi lagi yaitu antara 05.00 – 05.30, karena jarak antara tempat tinggal dan tempat kerja cukup jauh, sehingga memerlukan waktu yang cukup panjang selama menempuh perjalanan.

Sementara itu, kepulangan mereka dari bekerja dan tibanya mereka kembali di tempat tinggalnya, terdapat dua pola sebagai berikut:

1. Bagi para pelaku mobilitas yang bertempat tinggal di dalam kota, biasanya mereka tiba di rumah antara pukul 15.00 – 16.00, karena jarak antara kantor dan rumah cukup dekat, sehingga tidak memakan waktu banyak.
2. Bagi para pelaku mobilitas yang bertempat tinggal di luar kota, biasanya mereka tiba kembali di rumah antara pukul 16.00 – 18.00, karena jarak antara kantor dan rumah cukup jauh, sehingga memerlukan waktu yang cukup banyak.

Kedua pola jam keberangkatan kerja tersebut merupakan pola jam keberangkatan kerja yang normal. Apabila selama di perjalanan tidak mengalami gangguan pada kendaraan yang dipakai atau kondisi lalu lintas yang tidak macet, maka akan sampai ke tempat kerja tepat pada waktunya. Akan tetapi, apabila terjadi gangguan atau kemacetan lalu lintas yang disebabkan oleh beberapa faktor, maka kemungkinan terlambat di tempat kerja. Biasanya hal ini terjadi pada hari-hari ramai menjelang hari libur dan ketika liburan berakhir. Lalu lintas dalam kota menjadi semakin padat, karena banyak orang yang bepergian dari satu tempat ke tempat lain yang masih berada dalam wilayah kota. Selain itu, banyak orang yang bepergian dari dan ke luar kota yang tentu saja memadatkan arus lalu lintas dalam kota, terutama jalur-jalur jalan yang menuju ke terminal antar-kota.

Kepadatan arus lalu lintas yang disebabkan oleh hilir mudiknya para pelaku mobilitas ulang alik di dalam kota, semakin meningkat dengan beraneka ragam sarana angkutan yang datang dan pergi dari dan ke luar kota. Sarana angkutan yang dipakai para pelaku mobilitas ada 2 jenis, yaitu angkutan pribadi dan angkutan umum. Sarana angkutan pribadi terdiri dari kendaraan beroda dua (sepeda motor) dan kendaraan beroda empat (mobil). Sedangkan sarana angkutan umum terdiri dari angkutan kota, angkutan desa, becak, ojek, bendi dan lain-lain.

Bagi para pelaku mobilitas yang memiliki kendaraan pribadi biasanya jarang masuk kerja terlambat. Akan tetapi, keterlambatan kadang-kadang bisa terjadi disebabkan kendaraannya mengalami gangguan selama di perjalanan. Seperti kehabisan bensin, ban mobil Kempes atau pecah, gangguan pada mesin dan lain-lain. Sedangkan bagi mereka yang memakai jasa angkutan umum, untuk datang tepat waktu di tempat kerja harus berangkat lebih awal dan rela berdesakan dengan penumpang lain dalam angkutan kota. Kondisi tersebut sering menimbulkan ketidaknyamanan selama dalam perjalanan. Untuk menghindari hal tersebut, harus pula menunggu angkutan berikutnya yang tidak terlalu penuh dengan penumpang. Akan tetapi, hal ini

sering menimbulkan keterlambatan tiba di tempat kerja. Tentu saja kondisi ini kurang menguntungkan bagi dirinya, sehingga mereka lebih memilih duduk sedikit kurang nyaman atau berdiri, tetapi tiba tepat waktu. Selain itu, keadaan angkutan umum yang sebenarnya sudah tidak layak pakai menambah ketidaknyamanan bagi para pemakainya. Seperti tempat duduknya yang sudah goyang, asap hitam yang membuat polusi udara, sangat mengganggu mereka.

Kemudian kondisi jalan yang kurang baik, seperti tidak rata dan berlobang-lobang menambah ketidaknyamanan. Biasanya jalan-jalan yang kondisinya kurang baik adalah jalan-jalan di pedesaan, di pinggiran kota yang menuju ke pusat kota. Bahkan ada juga jalan-jalan yang di pusat kota yang sudah rusak dan perlu segera ditangani.

#### **- Pedagang, Pengusaha, Pengrajin dan Pelayan Toko**

Para pelaku mobilitas yang bekerja sebagai pedagang, pengrajin dan pelayan toko memiliki proses mobilitas yang hampir sama. Oleh karena itu, akan diuraikan proses mobilitas mereka secara bersamaan. Proses mobilitas ketiga kelompok profesi tersebut meliputi aktivitas kerja sehari-hari, lamanya bekerja setiap hari, sarana angkutan yang mereka gunakan dan kondisi angkutan ketika berangkat dan pulang kerja.

Pada umumnya mereka bekerja setiap hari tanpa hari libur. Mereka berangkat kerja pagi-pagi sekali dari tempat tinggalnya, terutama yang tinggal di luar kota. Bagi mereka yang tinggal di dalam kota bisa berangkat lebih santai, walaupun tetap berangkat pagi. Hal ini dilakukan karena mereka punya anggapan bahwa memulai bekerja di pagi hari akan lebih baik dan mendatangkan rezeki yang banyak. Dalam hal ini terdapat 2 pola jam keberangkatan kerja dan 2 pola jam kepulangan kerja.

Kedua pola jam keberangkatan kerja para pelaku mobilitas ulang alik yang bekerja sebagai pedagang, pengrajin dan pelayan

toko sebagai berikut:

1. Pola pertama adalah mereka yang tinggal di luar Kota Bukittinggi. Biasanya mereka berangkat pagi antara jam 05.30 sampai jam 06.30, sehingga dapat tiba di tempat kerja di kota antara jam 06.30 sampai jam 07.30.
2. Pola kedua adalah mereka yang tinggal di dalam Kota Bukittinggi. Biasanya mereka berangkat pagi antara jam 06.00 sampai jam 07.00, sehingga tiba di tempat kerja antara jam 06.15 sampai jam 07.30.

Pelaku mobilitas kedua pola tersebut tiba di tempat kerja tidak langsung membuka toko atau berjualan, tetapi terlebih dahulu membereskan dan memeriksa barang-barang. Toko baru buka antara jam 08.00 sampai jam 09.00. Bagi mereka yang bekerja sebagai pelayan toko, ketika tiba di toko juga tidak langsung membuka toko. Terkadang ia harus menunggu majikannya yang belum tiba dari rumahnya. Akan tetapi, bagi mereka yang punya majikan yang tinggal di toko tersebut bisa langsung masuk dan membereskan segala barang yang ada. Selain itu, ada juga yang diberi kepercayaan untuk memegang kunci toko dan gudang penyimpanan barang, sehingga mereka lebih leluasa untuk masuk dan keluar toko. Dua pola jam keputungan kerja pelaku mobilitas ulang alik yang bekerja sebagai pedagang, pengrajin dan pelayan toko sebagai berikut:

1. Pola pertama adalah mereka yang tinggal di luar Kota Bukittinggi. Biasanya mereka pulang sore antara jam 15.00 sampai jam 17.00, sehingga tiba kembali di rumah antara jam 14.00 sampai jam 18.00.
2. Pola kedua adalah mereka yang tinggal di dalam Kota Bukittinggi. Biasanya mereka pulang sore antara jam 15.00 sampai jam 18.00, sehingga tiba kembali di rumah antara jam 15.15 sampai jam 16.30.

Kedua pola jam kepulangan kerja tersebut kadang-kadang bisa berubah disesuaikan dengan keadaan. Bagi para pedagang yang memasok barangnya dari luar kota, apabila tiba barang pada sore hari maka terpaksa mengulur waktu kepulangannya. Demikian juga dengan pelayan toko, kadang-kadang pulang sangat terlambat dari jam kepulangan normal. Hal ini terjadi apabila ada barang masuk atau keluar sesuai pesanan pemasok dan pembeli, sehingga harus dibereskan atau di periksa ulang kembali.

Kedua pola jam keberangkatan dan kepulangan kerja tersebut dapat memberi gambaran tentang lamanya mereka bekerja setiap harinya. Sesuai dengan uraian tersebut, maka jam kerja atau lamanya mereka bekerja juga memiliki 2 pola sebagai berikut:

1. Pola pertama adalah mereka yang tinggal di luar Kota Bukittinggi. Setiap hari mereka bekerja selama 7 sampai 8 jam, apabila diukur dari mulai membuka toko sampai menutupnya kembali.
2. Pola kedua adalah mereka yang tinggal di dalam Kota Bukittinggi. Setiap hari mereka bekerja selama 9 sampai 10 jam, apabila diukur dari mulai membuka toko sampai menutupnya kembali.

Kedua pola jam kerja tersebut apabila dikurangi istirahat siang selama 1 jam, maka kerja yang efektif adalah sekitar 6 sampai 9 jam. Akan tetapi, yang berjualan dengan dibantu oleh anggota keluarga atau terdiri dari beberapa orang pelayan, sehingga waktu istirahat dapat diatur secara bergiliran. Dengan demikian, jualan terus berjalan dan waktu istirahat tetap mereka peroleh.

Pada umumnya angkutan yang mereka gunakan adalah angkutan umum, walaupun ada beberapa pedagang yang memakai kendaraan pribadi. Bagi mereka yang menggunakan angkutan umum, baik yang bertempat tinggal di luar kota maupun di dalam kota, mengatakan bahwa terjadi antrian calon penumpang dan apabila

mendapat tumpangan harus rela berdesakan dengan penumpang lain. Kesibukan terlihat pada jam-jam tertentu, yaitu pada pagi hari ketika berangkat ke tempat kerja dan siang atau sore hari ketika pulang kerja. Kemudian, keadaan angkutan umum yang mereka tumpangi tidak begitu baik, bahkan ada yang sudah tidak layak untuk dipakai. Kendaraan seperti ini, terutama terjadi pada angkutan desa.

Bagi mereka yang menggunakan kendaraan pribadi, bisa lebih lancar dalam perjalanan dari tempat tinggal ke tempat kerja. Kemudian, ada saat-saat tertentu ketika kondisi lalu lintas sangat ramai, sehingga mengakibatkan terlambat sampai ke tempat kerja. Kondisi ini biasanya terjadi pada hari-hari pasar dan liburan sekolah.

### **3.3. Proses Mobilitas Sosial Vertikal**

Dalam penelitian ini mobilitas sosial vertikal yang terjadi adalah mobilitas sosial vertikal naik, mobilitas sosial vertikal turun dan mobilitas sosial vertikal tetap. Mobilitas terjadi karena sirkulasi dalam karir, sehingga ada yang naik dan ada yang turun. Kemudian perubahan teknologi dan berkurangnya jumlah penduduk (jumlah anak) pada strata atas dan perpindahan penduduk<sup>25</sup>. Ukuran yang digunakan adalah perubahan jenis pekerjaan, perubahan tingkat pendidikan dan perubahan penghasilan yang dicapai anak dibandingkan dengan ayah.

Perubahan jenis pekerjaan (okupasi antar generasi) adalah elemen terpenting dari stratifikasi sosial yang merupakan refleksi dari pendidikan dan berimplikasi pada pendapatan. Berbagai pendapat menganggap bahwa okupasi merupakan indikator tunggal terbaik tentang stratifikasi. Seperti diketahui bahwa stratifikasi sosial merupakan suatu gejala universal setiap masyarakat yang mengalami kompleksitas dengan meningkatnya industrialisasi dan urbanisasi<sup>26</sup>.

<sup>25</sup> Dr. Iwan Gardono, "Mobilitas, Stratifikasi dan Integrasi: Suatu Studi Awal Masyarakat Jakarta", **Makalah** dalam Seminar Nasional Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI) Ujung Pandang, 2-3 Nopember 1996, Jakarta: FISIP Universitas Indonesia.

<sup>26</sup> Ibid.

Apabila dilihat dari jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan, mobilitas vertikal naik dalam penelitian ini adalah mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Sedangkan mobilitas vertikal naik berdasarkan jumlah penghasilan adalah mereka yang bekerja sebagai pengusaha, pedagang dan pengrajin. Kemudian mobilitas vertikal turun diukur dengan tingkat pendidikan dan jumlah penghasilan adalah mereka yang bekerja sebagai pengusaha, pedagang dan buruh angkat. Selanjutnya mobilitas vertikal turun yang diukur dengan jenis pekerjaan adalah mereka yang bekerja sebagai buruh angkat dan pelayan toko. Sementara itu, mobilitas vertikal tetap berdasarkan jenis pekerjaan adalah mereka yang bekerja sebagai pedagang dan buruh angkat.

Kriteria pelaku mobilitas, baik mobilitas naik, turun maupun tetap, dilakukan berdasarkan salah satu ukuran atau lebih. Hal ini dimungkinkan karena terdapat beberapa model mobilitas sosial, baik yang bivariat (mengukur status ayah dengan anak berdasarkan salah satu faktor saja) dan multivariat untuk melihat pengaruh beberapa faktor, seperti pendidikan ayah, pendidikan anak, pekerjaan ayah, pekerjaan anak dan lain-lain.

### **3.3.1. Mobilitas Vertikal Naik**

Mobilitas vertikal naik merupakan gerakan penduduk dari status sosial rendah ke status sosial tinggi. Perubahan status sosial tersebut diakibatkan oleh perubahan jenis pekerjaan, tingkat pendidikan dan jumlah penghasilan. Dalam hal ini, pekerjaan yang dianggap berstatus sosial rendah adalah pekerjaan kasar yang tidak memerlukan keahlian khusus dan tingkat pendidikan yang tertentu (tinggi). Sedangkan pekerjaan yang dianggap berstatus sosial tinggi adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dan tingkat pendidikan tertentu (tinggi). Kemudian yang dimaksud dengan tingkat pendidikan tertentu adalah jenjang pendidikan formal yang berhasil diselesaikan oleh seseorang atau sekelompok orang, yaitu mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah sampai sekolah tinggi (perguruan

tinggi). Sementara itu, yang dimaksud dengan jumlah penghasilan adalah pendapatan seseorang secara materi (uang) yang diperolehnya dari pekerjaan yang digelutinya. Seseorang berstatus sosial tinggi berdasarkan jumlah penghasilan, apabila memiliki banyak uang sehingga disebut sebagai “orang kaya”, sedangkan seseorang disebut berstatus sosial rendah apabila tidak memiliki banyak uang sehingga disebut sebagai “orang miskin”.

Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang narasumber/informan sebagai berikut:

“Pada saat ini strata tinggi tidak lagi mutlak berdasarkan keturunan darah biru (bangsawan). Seseorang yang berhasil punya uang banyak dapat dianggap memiliki strata tinggi, walaupun ia berasal dari keluarga rakyat kebanyakan. Demikian juga dengan tingkat pendidikan, siapa pun yang berhasil menyelesaikan sekolah tinggi (perguruan tinggi) akan dipandang lebih oleh masyarakat sekitarnya. Sementara itu, mereka yang tetap bersikukuh dengan darah birunya, justru akan ketinggalan apabila tidak dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman”<sup>27</sup>.

Dari uraian tersebut, maka pelaku mobilitas vertikal naik dalam penelitian ini dapat digolongkan ke dalam 2 kategori sebagai berikut:

1. Berdasarkan jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan.
2. Berdasarkan jumlah penghasilan.

Kategori pertama adalah mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri dengan tingkat pendidikan tinggi (setingkat sarjana). Sedangkan orang tua (ayah) mereka bekerja sebagai petani dan pendidikan yang berhasil ditamatkannya setingkat sekolah dasar. Pada umumnya mereka berasal dari dalam kota Bukittinggi atau dari

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Faisal Basir, pegawai Pemda Kota Bukittinggi, tanggal 14 dan 15 Mei 2001.

luar kota yang telah lama tinggal dan menetap di kota, sehingga telah tercatat sebagai penduduk Kota Bukittinggi. Akan tetapi, mereka tetap melakukan hubungan baik dengan daerah asalnya, yaitu berupa kunjungan rutin yang dilakukan pada saat-saat tertentu, baik sekedar melepas rindu dengan keluarga maupun mengurus harta kekayaan yang masih mereka miliki.

Kemudian kategori kedua adalah mereka yang bekerja sebagai pengusaha, pedagang dan pengrajin dengan jumlah penghasilan yang relatif besar jika dibandingkan dengan ayah mereka yang bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang pas-pasan. Sebagian besar mereka berasal dari luar Kota Bukittinggi, tetapi telah lama tinggal dan menetap di kota. Sedangkan sebagian lagi tetap tinggal di daerah asalnya dan tercatat sebagai penduduk daerah asalnya. Mereka pada umumnya pergi ke kota untuk berdagang atau berusaha dan akan kembali ke rumahnya di daerah asalnya.

Dengan melihat jenis pekerjaan ayah mereka, baik yang termasuk ke dalam kategori pertama maupun kategori kedua, maka terdapat kesamaan profesi yaitu sebagai petani. Akan tetapi, dalam hal ini terdapat 2 pengertian petani sebagai berikut:

1. Petani pemilik lahan (sawah dan ladang) yang cukup luas, yaitu profesi petani yang merupakan pekerjaan ayah pelaku mobilitas kategori pertama.
2. Petani pemilik lahan yang tidak terlalu luas dan petani penggarap, yaitu profesi petani yang merupakan pekerjaan ayah pelaku mobilitas kategori kedua.

Pengertian petani yang pertama merupakan petani yang dapat digolongkan ke dalam "petani kaya", sehingga dapat menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian pendidikan tinggi yang berhasil dicapai anak-anak tersebut membuka jalan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik (pegawai). Pekerjaan tersebut dianggap memiliki status sosial tinggi,

karena memerlukan keahlian khusus dan tingkat pendidikan tertentu. Oleh karena itu, terjadilah perubahan status sosial antara anak dan ayah yang diakibatkan oleh perubahan jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan.

Pengertian petani yang kedua merupakan petani yang berpenghasilan kurang secara materi, sehingga tidak sanggup menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini terutama dialami oleh para petani penggarap yang memiliki penghasilan yang relatif rendah. Sedangkan bagi para petani pemilik tanah yang kurang luas, sebenarnya bisa saja menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi karena sudah keasyikan berdagang dan berusaha, mereka sudah tidak memikirkan lagi sekolah. Akan tetapi, keberhasilan anak-anak mereka dalam berdagang dan berusaha telah mengubah status sosial mereka dengan keberhasilan secara ekonomi. Keadaan orang tua mereka yang dipandang secara ekonomi berstatus sosial rendah mengalami perubahan pandangan terhadap anak-anak mereka, karena jumlah penghasilan yang relatif tinggi dari kesuksesannya berdagang dan berusaha.

### **3.3.2. Mobilitas Vertikal Turun**

Para pelaku mobilitas vertikal turun, seperti halnya dalam mobilitas vertikal naik, diukur berdasarkan perubahan jenis pekerjaan, tingkat pendidikan dan jumlah penghasilan. Dalam penelitian ini, mereka yang mengalami penurunan status sosial jika dibandingkan dengan orang tua mereka disebabkan oleh ketiga ukuran tersebut. Dalam hal ini, terdapat 3 kategori mobilitas vertikal turun sebagai berikut:

1. Berdasarkan perubahan jumlah penghasilan.
2. Berdasarkan perubahan jenis pekerjaan.
3. Berdasarkan perubahan jumlah penghasilan, jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan.

Kategori pertama adalah mereka yang bekerja sebagai pedagang dengan tingkat pendidikan setingkat sekolah menengah atas. Latar belakang keluarga mereka secara sosial ekonomi adalah keluarga yang relatif kaya dengan ayah yang bekerja sebagai pedagang juga yang mempunyai penghasilan yang cukup tinggi, walaupun tingkat pendidikan yang berhasil dicapai adalah setingkat sekolah dasar. Sebagian besar mereka berasal dari luar kota Bukittinggi, tetapi telah tinggal dan menetap di kota.

Dengan melihat jenis pekerjaan antara anak dan ayah yang sejenis, maka tidak terjadi perubahan jenis pekerjaan. Kemudian apabila dilihat dari tingkat pendidikan yang berhasil dicapai anak, maka telah mengalami peningkatan yang cukup baik. Akan tetapi, apabila dilihat secara ekonomi dari jumlah penghasilan yang dicapai anak, maka telah terjadi proses penurunan penghasilan jika dibandingkan dengan jumlah penghasilan ayah. Dalam hal ini, ayah mereka adalah seorang pedagang besar yang memiliki beberapa buah toko (ada yang memiliki sampai 11 buah) dalam berbagai jenis usaha, sehingga secara otomatis berimbas terhadap jumlah penghasilan yang diperolehnya. Sedangkan mereka sebagai anak yang juga bekerja sebagai pedagang, tetapi hanya memiliki satu atau dua buah toko saja, sehingga penghasilannya jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan ayah mereka. Dengan demikian, telah terjadi perubahan status sosial yang ditinjau secara ekonomi, yaitu dari status sosial tinggi yang dicapai ayah menjadi berstatus sosial rendah yang dialami mereka sebagai anak.

Kategori kedua adalah mereka yang bekerja sebagai pelayan toko, buruh angkat dan pedagang eceran. Mereka memiliki tingkat pendidikan yang bervariasi, yaitu ada yang tidak tamat SD, tamat SD, tamat SMP, tamat SLTA, bahkan tamat perguruan tinggi (sarjana). Pada umumnya mereka yang berpendidikan relatif rendah adalah yang bekerja sebagai buruh angkat, sedangkan yang berpendidikan menengah adalah mereka yang bekerja sebagai pelayan toko dan pedagang eceran. Khusus mereka yang berpendidikan tinggi, memilih

berdagang sebagai profesi, karena dua faktor penyebab, yaitu bakat dagang yang dimilikinya dan kesempatan yang tidak ada untuk memperoleh jenis pekerjaan lain.

Sementara itu, pekerjaan ayah mereka adalah petani pemilik lahan. Profesi sebagai pelayan toko yang bekerja pada orang lain (tergantung pada majikan) dianggap pekerjaan yang berstatus lebih rendah jika dibandingkan dengan pekerjaan sebagai petani pemilik lahan. Kemudian pekerjaan sebagai buruh angkat dianggap berstatus sosial rendah, karena selain merupakan pekerjaan kasar yang hanya mengandalkan tenaga, juga disebabkan pekerjaan tersebut sangat tergantung kepada orang lain. Ketergantungan tersebut terutama kepada majikan mereka sebagai pedagang dan pemilik toko, kemudian tergantung juga kepada pelanggan atau pembeli yang memerlukan jasa mereka untuk mengangkat atau memindahkan barang yang dibelinya dengan upah yang relatif rendah. Sementara itu, pekerjaan sebagai pedagang eceran (pedagang kaki lima atau pedagang di tenda-tenda plastik) memiliki jumlah penghasilan yang tidak tentu. Selain itu, lokasi berdagang pun sering berpindah tempat, karena tidak memiliki tempat atau kios sendiri yang tetap. Dengan demikian telah terjadi perubahan jenis pekerjaan yang mengakibatkan terjadinya mobilitas vertikal turun.

Perubahan jenis pekerjaan antara seorang anak dan seorang ayah sebagian besar disebabkan jumlah saudara mereka yang cukup banyak, sehingga lahan pertanian yang mereka terima menjadi relatif sempit. Keadaan lahan pertanian yang kurang luas tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, sehingga dengan terpaksa mereka mencari pekerjaan lain. Pekerjaan yang mereka peroleh di kota tentu saja berbeda dengan pekerjaan mereka di desa. Pada awalnya pekerjaan di kota tersebut sebagai pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan. Akan tetapi, ada juga yang menjadikan pekerjaan yang diperoleh di kota sebagai pekerjaan utama, karena lahan pertanian yang sempit tersebut telah dijualnya untuk keperluan mereka pergi ke kota. Dengan demikian, telah terjadi

perubahan status sosial antara ayah dengan anak, yaitu dari status sosial tinggi ke status sosial rendah disebabkan oleh perubahan jenis pekerjaan.

Kategori ketiga adalah mereka yang bekerja sebagai pengusaha dan pelayan toko. Pada umumnya mereka berasal dari luar kota Bukittinggi dan telah lama menjadi penduduk kota. Pelaku mobilitas yang bekerja sebagai pengusaha industri kecil dalam penelitian ini berpendidikan setingkat sekolah menengah atas. Mereka memiliki latar belakang keluarga yang cukup baik secara sosial ekonomi. Orang tua mereka berpendidikan cukup tinggi, yaitu pendidikan setingkat sarjana. Sedangkan pekerjaan yang dimiliki ayah mereka adalah pengusaha/pedagang besar. Profesi ayah mereka sebagai pengusaha/pedagang yang memiliki beberapa buah perusahaan dalam beberapa bidang usaha, secara otomatis mempengaruhi jumlah penghasilan yang diperolehnya. Apabila dibandingkan dengan jumlah penghasilan mereka yang hanya memiliki satu atau dua perusahaan yang termasuk ke dalam perusahaan kecil, maka jauh lebih kecil dengan penghasilan yang diperoleh ayah mereka.

Sementara itu, mereka yang bekerja sebagai pelayan toko mempunyai pendidikan yang setingkat sekolah menengah atas. Seperti pelaku mobilitas sebelumnya, mereka juga secara umum berasal dari luar kota Bukittinggi dan telah menjadi penduduk kota. Kemudian latar belakang keluarga mereka juga merupakan keluarga yang bestatus sosial tinggi apabila ditinjau secara sosial ekonomi. Orang tua (ayah) mereka bekerja sebagai pensiunan pegawai negeri yang memiliki jabatan cukup tinggi dalam birokrasi pemerintahan. Sedangkan pendidikan yang berhasil ditamatkannya adalah pendidikan tinggi setingkat sarjana. Kondisi tersebut juga sangat mempengaruhi kepada jumlah penghasilan yang diperoleh, baik yang diperoleh anak maupun yang diperoleh ayah. Seorang anak yang bekerja sebagai pelayan toko tentu saja memiliki penghasilan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan penghasilan ayah yang

bekerja sebagai pegawai.

Dengan melihat uraian tersebut, maka tampak dengan jelas telah terjadi perubahan status sosial antara anak dengan ayah, yaitu status sosial tinggi berubah menjadi status sosial rendah. Dengan demikian, telah terjadi mobilitas sosial vertikal turun yang disebabkan oleh perubahan jenis pekerjaan, tingkat pendidikan dan jumlah penghasilan.

### **3.3.3. Mobilitas Vertikal Tetap**

Mobilitas vertikal tetap dalam penelitian ini diukur berdasarkan perubahan jenis pekerjaan yang dialami oleh seorang anak jika dibandingkan dengan pekerjaan ayah. Secara umum, jenis pekerjaan mereka memang berbeda, tetapi masih berada dalam level atau derajat yang sama. Dalam hal ini terdapat 2 kategori pelaku mobilitas tetap sebagai berikut:

1. Jenis pekerjaan sama dalam level yang sama.
2. Jenis pekerjaan berubah, tetapi tetap berada dalam level yang sama.

Kategori pertama adalah mereka yang bekerja sebagai pedagang, baik pedagang eceran maupun pedagang grosir dengan tingkat pendidikan yang bervariasi, mulai dari mereka yang berpendidikan sekolah dasar sampai yang berpendidikan setingkat sekolah menengah atas. Latar belakang keluarga mereka juga beraneka ragam, ada yang cukup baik ditinjau secara sosial ekonomi, ada juga yang termasuk ke dalam keluarga yang kurang mampu. Dalam hal ini, pekerjaan yang dimiliki ayah mereka adalah pedagang juga dengan tingkat pendidikan yang rata-rata setingkat sekolah dasar.

Dengan bekal keahlian dan bakat dagang yang diturunkan orang tuanya, mereka melanjutkan usaha dagang orang tuanya.

Dengan demikian, bekerja sebagai pedagang karena faktor bakat dan keturunan. Selain itu, ada juga yang memilih dagang sebagai profesi bukan hanya karena faktor tersebut, tetapi karena keadaan yang memaksanya untuk meneruskan pekerjaan yang telah dirintis orang tua. Penyebab utamanya adalah tidak ada kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan lain, karena ketidakmampuan bersaing dengan orang lain. Kondisi ini disebabkan terutama oleh tingkat pendidikan yang relatif rendah atau kurang tinggi jika dibandingkan dengan pesaing-pesaing lain. Juga karena tidak memiliki keahlian lain untuk membuka usaha lain.

Kategori kedua adalah mereka yang bekerja sebagai buruh angkat, yang sebagian besar tingkat pendidikan mereka relatif rendah. Demikian juga dengan orang tua mereka, pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah, yaitu tidak tamat sekolah dasar, bahkan ada beberapa orang yang tidak pernah sekolah. Pekerjaan mereka adalah buruh tani dengan upah yang sangat rendah, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari apabila tidak dibantu oleh pekerjaan lain sebagai tambahan penghasilan.

Pekerjaan sebagai buruh angkat banyak digeluti oleh penduduk pinggiran kota (desa-desa di sekitar Kota Bukittinggi) dan daerah-daerah yang termasuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Agam. Pada awalnya sebagian besar dari mereka bekerja sebagai petani. Sehubungan dengan bertambahnya biaya hidup dan semakin terbatasnya lahan pertanian yang tersedia, maka untuk menambah penghasilan menjadi buruh angkat merupakan pilihan terbaik dalam pandangan mereka. Dasar pikiran ini adalah ketika mereka melihat orang-orang sekeliling yang bekerja sebagai buruh mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Perubahan jenis pekerjaan dari buruh tani sebagai pekerjaan yang dimiliki ayah mereka menjadi buruh angkat sebagai pekerjaan mereka sebagai anak, memiliki level atau derajat yang sama.

Walaupun mungkin secara ekonomi lebih baik, tetapi peningkatan yang dialami relatif sangat kecil, sehingga pandangan orang tetap tidak berubah. Dengan demikian, antara ayah dengan anak tidak mengalami perubahan status sosial, walaupun telah berganti pekerjaan dari buruh tani di desa menjadi buruh angkat di kota.

Apabila kita melihat jumlah penghasilan yang hanya berubah sedikit, para pelaku mobilitas tetap ini hanya dapat mengubah nasibnya dengan bekerja di berbagai sektor. Hal ini pun sulit untuk dilakukan, karena tenaga yang mereka miliki sangat terbatas dan jenis usaha lain pun memerlukan modal lebih dari sekedar tenaga.

### **3.4. Dampak Mobilitas Sosial Penduduk**

#### **3.4.1. Tata Lingkungan Kota**

Mobilitas sosial penduduk di Kota Bukittinggi, baik mobilitas horisontal maupun mobilitas vertikal, berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat dan terhadap keberadaan kota secara umum. Dampak yang ditimbulkan berupa dampak positif dan dampak negatif yang mempengaruhi perubahan di berbagai bidang kehidupan, baik perubahan yang bersifat fisik maupun perubahan non-fisik. Akan tetapi, dalam tulisan ini dampak mobilitas yang akan diterangkan dibatasi kepada dua hal saja, yaitu terhadap tata lingkungan kota dan pariwisata. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa kenyataan yang ada di lapangan lebih mengarah terhadap dua hal tersebut. Kondisi Kota Bukittinggi yang tidak memiliki lahan yang cukup luas untuk pemekaran kota menyebabkan lingkungan kota sulit ditata dengan baik. Sedangkan kajian terhadap bidang pariwisata sangat sesuai dengan potensi wisata yang dimiliki Kota Bukittinggi.

Dampak mobilitas sosial terhadap tata lingkungan kota meliputi kondisi pasar, kondisi jalan dan lokasi perkantoran serta kondisi pemukiman penduduk kota. Dampak mobilitas sosial sangat tampak pengaruhnya terutama terhadap kondisi pasar, baik Pasar

Atas, Pasar Bawah maupun Pasar Aur Kuning. Banyaknya pedagang di Pasar Atas menyebabkan semakin sempitnya lahan untuk tempat berjualan. Kondisi ini mengakibatkan Pasar Atas tidak bisa lagi menampung para pendatang untuk berjualan di sana. Demikian juga dengan Pasar Bawah. Kondisi Pasar Atas dan Pasar bawah sudah tidak memadai lagi untuk menampung pedagang baru, karena kedua pasar tersebut sudah penuh sesak, becek dan kotor<sup>28</sup>.

Kondisi Pasar Aur Kuning sebagai pasar grosir dan pusat konveksi juga sudah penuh sesak oleh toko-toko atau petak-petak los yang berdempetan, sehingga dirasakan sudah tidak nyaman lagi, baik yang dirasakan langsung oleh para pedagang maupun oleh para pembeli yang datang dari berbagai kota. Dalam hal ini, yang menjadi sebab ketidaknyamanan tersebut adalah masalah pelayanan Pemda Kota Bukittinggi terhadap para pedagang sekaligus terhadap para pembeli. Salah satu contoh kongkritnya adalah di Pasar Aur Kuning sampai sekarang, langkah-langkah penertiban yang dilakukan Pemda kurang tepat, sehingga belum membawa hasil yang baik<sup>29</sup>. Selain itu, banyaknya pendatang dari luar kota yang bertujuan untuk berdagang di Pasar Aur Kuning, menyebabkan kondisi pasar menjadi penuh sesak karena pedagang pendatang tersebut susah diatur, sehingga melahirkan kesemrautan.

Lebih lanjut diharapkan Pasar Aur Kuning dibongkar untuk dibangun kembali dengan penataan ruang yang punya konsep. Konsep pembangunan pasar dilakukan dengan tujuan untuk keamanan dan kenyamanan. Rasa aman dan nyaman dapat diwujudkan apabila ada jarak tertentu antara deretan los yang satu dengan yang lainnya, sehingga ada ruang kosong untuk bernapas dan bisa dimasuki mobil besar (pemadam kebakaran) apabila terjadi

<sup>28</sup> Wawancara dengan salah seorang pedagang batik di Pasar Aur Kuning, tanggal 6 Mei dan 10 Juni 2001.

<sup>29</sup> Hal ini seperti diungkapkan oleh salah seorang tokoh masyarakat Bukittinggi dan Agam, H. Asbir: yang juga salah seorang anggota Badan Pertimbangan Kadin Sumatera Barat dalam percakapannya dengan Haluan, dalam "Pedagang Konveksi di Pasar Aur Kuning Kini Merasakan Tidak Nyaman Lagi", Haluan, 7 Maret 2001).

kebakaran di tengah-tengah pasar. Selain itu, pasar sebagai pusat pertukaran uang dan perputaran modal dapat dijadikan aset daerah terpenting sebagai pendapatan asli daerah<sup>30</sup>.

Pasar Aur Kuning sebagai salah satu pasar grosir terbesar di Sumatera, hendaknya menjadi perhatian Pemda setempat karena dapat mendatangkan keuntungan yang cukup besar, terutama setiap hari pasar, Rabu dan Sabtu. Pada hari-hari pasar tersebut terjadi perputaran modal yang cukup tinggi. Hal penting yang menjadi prioritas utama dan perhatian Pemda kota ini, terutama menyangkut masalah penataan ruang.

Dari uraian tersebut, apabila dihubungkan dengan mobilitas sosial yang terjadi, dapat dikatakan bahwa para pelaku mobilitas yang datang ke Kota Bukittinggi dengan tujuan untuk berdagang menjadi masalah baru bagi para pedagang lama. Kondisi pasar di Bukittinggi yang sudah padat dengan banyaknya jumlah pedagang lama terasa bertambah padat dengan adanya pedagang baru yang memerlukan perhatian serius dari Pemda setempat, terutama menyangkut tata ruang los-los yang berdiri di Pasar Aur Kuning.

Seperti diketahui bahwa para pelaku mobilitas di Kota Bukittinggi dari tahun ke tahun bertambah banyak jumlahnya. Beberapa dari mereka bekerja sebagai pedagang grosir di Pasar Aur Kuning, yaitu sebagai pedagang konveksi atau industri kerajinan rumah tangga. Daya tampung pasar sebenarnya sudah tidak dapat memberikan tempat lagi bagi pedagang baru yang ingin mendirikan toko atau kios di sana. Akan tetapi, dengan berbagai cara mereka dapat menempati lorong-lorong di dalam bangunan pasar yang sedianya untuk lalu lalang orang, baik pedagang sendiri maupun para pembeli. Bangunan baru yang mereka dirikan tentu saja mendapat izin dari Pemda setempat. Di lorong-lorong yang tidak begitu luas

<sup>30</sup> Lebih lanjut dikatakan oleh H. Asbir dalam **Haluan**, 7 Maret 2001.

didirikan bangunan baru tanpa memperhatikan tata letak dan tata ruang dalam bangunan pasar secara keseluruhan. Bahkan lorong sempit yang hanya mempunyai lebar 1 meter pun dipaksaksakan untuk dijadikan tempat berjualan<sup>31</sup>.

Pada dasarnya masalah tata ruang yang terjadi di Pasar Aur Kuning disebabkan tidak adanya ketegasan dari Pemda setempat untuk tidak memberi izin bangunan. Ketidaktegasan ini menimbulkan pemikiran bahwa aparat Pemda setempat tidak lagi memikirkan kondisi pasar dalam jangka panjang, tetapi lebih berorientasi kepada besarnya jumlah uang yang mereka terima dengan mengeluarkan izin bangunan baru kepada pedagang baru. Pemda juga tidak memikirkan akibat lebih lanjut dari berdesak-desakannya toko atau kios di dalam pasar, yaitu akan menyulitkan mobil petugas pemadam kebakaran untuk masuk ke dalam pasar apabila terjadi kebakaran. Masalah kesemrautan pasar tersebut seperti diungkapkan oleh beberapa pedagang sebagai berikut:

“Kunjungan pejabat setempat ke pasar-pasar di Kota Bukittinggi, seperti kunjungan para anggota dewan lebih berkesan formalitas saja. Tujuannya hanya untuk melihat lokasi pasar, melihat lahan kosong untuk didirikan bangunan baru. Bangunan baru untuk berdagang bagi para pendatang baru dari berbagai daerah di luar Kota Bukittinggi. Tidak memikirkan tata lingkungan pasar lagi, yang penting uang masuk saja. Letak kios-kios sudah tidak teratur lagi, sehingga terasa sumpek dan semraut”<sup>32</sup>

Banyaknya para pendatang yang berprofesi sebagai pedagang baru di pasar pernah menimbulkan konflik dengan pedagang lama. Hal ini terutama disebabkan oleh bangunan toko atau kios baru yang dibangun menutupi toko atau kios lama milik

<sup>31</sup> Diolah dari hasil wawancara para pedagang grosir di Pasar Aur Kuning, tanggal 6 Mei dan 10 Juni 2001.

<sup>32</sup> Diolah dari hasil wawancara para pedagang grosir di Pasar Aur Kuning, tanggal 6 Mei dan 10 Juni 2001.

pedagang lama. Para pedagang lama yang merasa dirugikan melapor ke aparat yang berwenang, tetapi tidak pernah ditanggapi secara serius. Kondisi tersebut berlalu begitu saja, sehingga semakin hari pembangunan toko atau kios baru bertambah banyak dan kondisi pasar semakin tidak teratur.

Para pedagang lama yang peduli dengan kondisi pasar hanya bisa mengeluh saja. Pejabat dinas tata kota yang pernah mereka hubungi tidak menggubris keluhan mereka. Dengan demikian, kondisi pasar tidak mengalami perubahan ke arah kebaikan yang menimbulkan kenyamanan dan keamanan, baik bagi pedagang maupun bagi pembeli.

Masalah tata lingkungan kota juga disebabkan oleh banyaknya pedagang eceran (pedagang kaki lima). Pedagang eceran yang tidak memiliki tempat tetap untuk berjualan menimbulkan kesemrawutan kota. Lahan yang disediakan untuk mereka sudah tidak bisa menampung lagi pedagang baru, sehingga mereka berdagang di sembarang tempat pada tiap-tiap sudut kota<sup>33</sup>.

Lebih lanjut dikatakan bahwa Kota Bukittinggi adalah kota tua yang memiliki lahan yang tidak luas. Dengan banyaknya pendatang semakin mempersulit dalam pengaturan kota. Seperti masalah pelebaran lahan untuk pedagang kaki lima tersebut. Kemudian rencana pelebaran jalan pun menjadi sulit dilakukan, karena terpaksa harus mengambil halaman rumah penduduk kota yang tidak mudah pula untuk dilakukan.

Lokasi pemukiman penduduk yang sulit ditata dengan baik adalah satu hal yang juga menjadi masalah penting. Pemukiman penduduk yang ada tidak lagi mengikuti standar kehidupan yang layak. Dalam pengertian bahwa kondisi rumah penduduk tidak

<sup>33</sup> Wawancara dengan Bapak H. Akmal Sidik, wakil ketua DPRD Kota Bukittinggi, tanggal 9 Mei 2001.

mengikuti standar kesehatan dan kebersihan. Selain itu, pengaturan lokasi perkantoran yang letaknya di dalam kota (pusat kota) juga sudah tidak bisa dilakukan, karena lahan yang ada sudah tidak memungkinkan lagi dilakukan pengaturan. Pengaturan lokasi perkantoran bisa dilakukan dengan membuka daerah-daerah baru atau memindahkannya ke pinggiran kota yang belum diisi. Misalnya di Belakang Balok, di Birugo dan di Gulai Bancah. Akan tetapi, hal ini baru bisa dilakukan dengan terlebih dahulu memindahkan lokasi perumahan atau pemukiman penduduk. Dalam melakukan proses pemindahan pemukiman penduduk perlu memperhatikan beberapa hal, seperti menyediakan tanah kosong, membuat rumah baru, dan memenuhi segala keperluan yang menunjang kehidupan di lokasi baru. Dengan demikian, proses pemindahan tersebut tidak akan menimbulkan masalah baru dan penduduk mau pindah dengan aman dan nyaman. Salah seorang pejabat tinggi Kota Bukittinggi mengungkapkan hal tersebut sebagai berikut:

“Lokasi untuk pemukiman di pusat Kota Bukittinggi sudah tidak memungkinkan lagi. Ruang kota sangat terbatas, sehingga untuk penataan kota sangat sulit dilakukan”<sup>34</sup>.

Apabila kita melihat kondisi jalan, kondisi jalan yang normal dan baik memiliki standar yang jelas, yaitu jarak jalan besar dengan rumah penduduk hendaknya berjarak kira-kira 24 meter dari as jalan. Jarak tersebut terbagi ke dalam 12 meter dan ke luar 12 meter. Kondisi jalan di Kota Bukittinggi yang mendekati kondisi ideal seperti itu hanya ada di lokasi perkantoran di Birugo (Kantor Walikota dan Kantor Pos). Lokasi perkantoran tersebut pun saat ini sudah tidak bagus lagi, karena tidak adanya perawatan kebersihan kota yang memadai<sup>35</sup>.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Usman Amir, Ketua Bappeda Kota Bukittinggi, tanggal 10 Mei 2001.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bapak H. Akmal Sidik, wakil ketua DPRD Kota Bukittinggi, tanggal 9 Mei 2001.

Selain masalah-masalah yang telah diuraikan tersebut, masalah sampah di Kota Bukittinggi menjadi masalah yang berat dan perlu mendapat penanganan khusus. Dahulu tempat pembuangan sampah akhir berada di lokasi Padang Hijau dan Panorama Baru. Masyarakat atau penduduk yang bermukim di daerah-daerah tersebut pada awalnya setuju daerahnya dijadikan lokasi pembuangan sampah akhir. Akan tetapi, mereka mengajukan syarat sebagai berikut: Pertama, sampah yang diangkut dan dibuang di lokasi tersebut, selama proses pengangkutan di perjalanan harus ditutup, sehingga bau tidak sedap yang ditimbulkannya tidak begitu tercium dan mengganggu pernapasan. Kedua, setelah sampai di lokasi pembuangan, sampah tersebut langsung dibakar atau ditimbun dengan tanah untuk dijadikan pupuk buatan (kompos). Akan tetapi, syarat-syarat tersebut tidak terealisasi dengan baik, sehingga pada perkembangan selanjutnya, penduduk setempat menolak daerah mereka dijadikan lokasi pembuangan sampah akhir. Oleh karena itu, sampah-sampah kota yang bertumpuk di tiap-tiap sudut kota, terutama di lokasi pasar tradisional, menjadi suatu timbunan besar yang berbau busuk. Selain tidak sedap dipandang mata karena mengotori kota, juga menimbulkan polusi udara yang mengganggu saluran pernapasan. Kondisi tersebut seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pegawai Pemda sebagai berikut:

"Para pedagang dari *hinterland* kota tersebut datang ke sini untuk berdagang. Mereka adalah petani di desanya dan berjualan ke kota untuk menjajakan hasil kebunnya, seperti jual kacang rebus, jual daun pisang, jual jaring dan lain-lain. Nah, para pedagang inilah yang banyak membuang sampah di sini. Datang cari uang ke kota dan pulang meninggalkan sampah. Pernah suatu ketika, penduduk Padang Hijau dan Panorama Baru menolak daerahnya dijadikan lokasi pembuangan sampah akhir (TPA), sehingga sampah di sini bertimbun sampai berton-ton"<sup>36</sup>.

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Faisal Basir, pegawai Pemda Kota Bukittinggi, tanggal 14 dan 15 Mei 2001.

Masalah sampah tersebut secara langsung merusak ketertiban dan keindahan kota. Oleh karena itu, penataan lingkungan yang dilakukan oleh Pemda setempat hendaknya terlebih dahulu memperhatikan masalah kebersihan tersebut. Dengan demikian, perluasan kota yang akan dilakukan seperti yang telah direncanakan, bisa dilakukan dengan mengurangi timbunan sampah di sudut-sudut kota, sehingga kota terasa lebih lapang dan luas. Timbunan sampah dapat dikurangi dengan mengurangi jumlah penduduk yang ada di dalam kota atau mengalihkan perhatian para pendatang dari pusat kota ke daerah-daerah pinggiran kota. Caranya dengan memperbaiki fasilitas di pinggiran kota, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat pendatang tersebut tidak harus pergi ke pusat kota.

### **3.4.2. Pariwisata**

Kota Bukittinggi memiliki potensi wisata yang cukup potensial dan dapat berkembang dengan baik di masa yang akan datang, apabila mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah setempat. Objek wisata yang ada sangat beraneka ragam, dengan udara yang sejuk dan nyaman, sehingga Kota Bukittinggi dapat dijadikan daerah tujuan wisata yang penting di Pulau Sumatera.

Daerah tujuan wisata adalah daerah yang memiliki objek-objek wisata yang ditunjang oleh sarana wisata dan usaha-usaha pariwisata serta masyarakat<sup>37</sup>. Objek-objek wisata yang ada di Kota Bukittinggi berupa wisata alam, wisata budaya dan wisata sejarah, seperti yang telah diungkapkan dalam uraian sebelumnya. Sedangkan sarana wisata yang menunjang keberadaan objek wisata tersebut adalah berupa penginapan atau hotel-hotel, losmen-losmen dan lain-lain. Kemudian rumah-rumah makan atau restoran, café-café dan kantin-kantin atau warung-warung makan dan minum di tenda-tenda/kaki lima. Selain itu, tersedia juga sarana angkutan umum, baik angkutan modern maupun angkutan tradisional (bendi, becak, dan lain-lain).

<sup>37</sup> Dirjen Pariwisata, *Pengantar Wisata Indonesia*, Jakarta: Dirjen pariwisata, 1976, hlm. 4).

Sementara itu, usaha-usaha pariwisata yang dilakukan Pemda setempat berupa perbaikan dan pemeliharaan serta pengembangan wisata dan sarana-sarana wisata yang mendukungnya. Tujuan pengembangan pariwisata adalah untuk memperkenalkan kebudayaan, keindahan alam dan kepribadian bangsa Indonesia, sekaligus membantu meningkatkan pendapatan masyarakat<sup>38</sup>.

Dengan adanya usaha dari pihak Pemda setempat diharapkan tujuan pariwisata di Kota Bukittinggi dapat tercapai. Harapan tersebut akan terwujud apabila didukung oleh masyarakat kota, baik yang terlibat langsung dalam bidang pariwisata maupun masyarakat umum. Salah satu usaha masyarakat adalah menjaga kebersihan kota dan tidak merusak fasilitas kota, khususnya fasilitas pariwisata. Selain itu, juga selalu menjaga sikap dan perilaku, sehingga dapat memberi rasa aman dan nyaman. Seperti yang disebutkan dalam intruksi Presiden RI No. 9 tahun 1969 bahwa wisatawan (*tourist*) adalah setiap masyarakat yang bepergian dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ke tempat lain dengan menikmati perjalanan dari kunjungan itu. Selanjutnya disebutkan bahwa wisatawan (mancanegara) adalah pengunjung sementara yang tinggal sekurang-kurangnya 24 jam di negara yang dikunjungi dan maksud tujuan perjalanannya dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Pesar (*leisure*), yaitu untuk keperluan rekreasi, liburan, kesehatan, studi, keagamaan dan olah raga.
2. Hubungan dagang, hubungan sanak keluarga, handai taulan, konfrensi dan misi<sup>39</sup>.

Dengan demikian, wisatawan yang berkunjung ke Kota Bukittinggi tidak terlepas dari kedua tujuan tersebut. Oleh karena itu, keamanan dan kenyamanan selama mereka berada di daerah tujuan wisata perlu mendapat perhatian khusus dari Pemda setempat.

<sup>38</sup> Ibid, hlm. 6.

<sup>39</sup> Ibid, hlm. 9-11.

Pada umumnya masyarakat yang berada di luar Sumatera, mengenal daerah Sumatera Barat dengan keberadaan Jam Gadang. Jam Gadang yang berdiri di pusat kota menjadi daya tarik Kota Bukittinggi yang sangat kuat. Hal ini terungkap dari pernyataan salah seorang pejabat Pemda setempat bahwa hampir setiap orang yang datang ke Sumatera Barat selalu menyempatkan diri untuk berkunjung ke Bukittinggi. Perjalanan menjadi tidak lengkap kalau melewatkan Kota Bukittinggi untuk disinggahi. Hal ini dirasakan bukan hanya oleh pendatang yang berasal dari luar daerah Sumatera, tetapi juga oleh mereka yang berasal dari dalam daerah Sumatera<sup>40</sup>. Misalnya, pendatang dari Jakarta yang orang tuanya berasal dari Payakumbuh, tidak menginap di rumah orang tuanya, tetapi menginap di hotel yang ada di Bukittinggi. Selain bertujuan untuk mengunjungi orang tua di Payakumbuh, juga sekalian berlibur dan bersenang-senang. Dengan demikian, Kota Bukittinggi selalu menjadi tujuan untuk berwisata dan hotel-hotel di sana tidak pernah sepi dari pengunjung.

Banyaknya pengunjung atau wisatawan ke Kota Bukittinggi menimbulkan dampak bagi perkembangan pariwisata, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif yang jelas terlihat adalah besarnya pendapatan dari hasil penjualan karcis masuk ke objek-objek wisata. Pendapatan tersebut dapat mendukung biaya perawatan tempat-tempat wisata. Juga dapat menyerap tenaga kerja yang bergerak di bidang pariwisata. Selain itu, pendapatan yang diperoleh dari bidang pariwisata ini dapat meningkatkan pajak penghasilan yang berguna menambah pendapatan daerah.

Seperti yang telah disebutkan bahwa sarana pariwisata yang sangat mendukung adalah hotel-hotel atau tempat-tempat penginapan, baik yang berkelas tinggi maupun yang sederhana. Dari sini pemerintah setempat juga dapat menarik pajak sebagai

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bapak H. Akmal Sidik, wakil ketua DPRD Kota Bukittinggi, tanggal 9 Mei 2001.

pemasukan yang cukup tinggi bagi anggaran daerah. Selain itu, banyaknya pengunjung berakibat positif bagi keberadaan café-café dan restoran-restoran. Para pemilik restoran dapat meraih keuntungan yang cukup besar. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dapat menarik pajak restoran. Menurut penurunan pejabat setempat, pajak restoran ini adalah pajak yang paling besar dibandingkan dengan pajak dari bidang lain<sup>41</sup>.

Selain dampak positif yang ditimbulkan oleh banyaknya pendatang, juga terdapat dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang dirasakan langsung oleh mereka yang bergerak di bidang pariwisata adalah kondisi objek wisata yang kotor dan banyak yang mengalami kerusakan akibat para pengunjung yang berlaku tidak bertanggung jawab. Semakin lama pengunjung ke tempat wisata semakin ramai, sehingga sampah pun semakin bertambah banyak. Kurangnya kesadaran dari para pengunjung untuk membuang sampah pada tempatnya, mengakibatkan sampah-sampah berserakan di mana-mana.

Kondisi tempat wisata yang kotor mengakibatkan ketidaknyamanan dan kurang enak dipandang mata. Hal ini dirasakan langsung, baik oleh penduduk setempat maupun oleh para pengunjung sendiri. Kondisi ini terutama terjadi pada saat libur Hari Raya dan liburan sekolah.

Selain masalah kebersihan yang tidak dijaga dengan baik, juga faktor keamanan menjadi masalah penting. Para pendatang atau pengunjung sering kehilangan dompet atau uangnya, ketika mereka sedang belanja atau jalan-jalan.. Kejadian tersebut terjadi di berbagai tempat, baik di lokasi objek-objek wisata maupun di tempat-tempat perbelanjaan (pasar). Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pendatang di Pasar Aur Kuning sebagai berikut:

<sup>41</sup> Wawancara dengan Bapak H. Akmal Sidik, wakil ketua DPRD Kota Bukittinggi, tanggal 9 Mei 2001.

“Saya sedang berjalan di Simpang Aur menuju Pasar Aur Kuning untuk belanja. Tiba-tiba ada seseorang yang menubruk saya. Mulanya saya acuhkan saja. Tetapi, pada saat saya mau membayar, tas saya sudah sobek dan dompet saya tidak ada”

Demikian juga yang dialami oleh pengunjung di Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan. Pada saat mereka sedang berjalan-jalan dan melihat-lihat aneka jenis binatang, mereka pernah kehilangan dompet atau uangnya tanpa mereka sadari. Kemudian ada juga yang sedang duduk-duduk, tas yang mereka letakkan di samping tubuhnya, posisinya sudah berubah dan saat dilihat isinya, dompet atau uang telah hilang. Kejadian tersebut bukan hanya satu atau dua kali terjadi dalam sehari, tetapi berkali-kali. Pernah ada yang melapor ke aparat keamanan setempat. Pihak aparat menerima laporan tersebut tanpa ada tindak lanjutnya, sehingga kejadian pencopetan tersebut tetap terjadi dan bisa menimpa siapa saja.

Di lokasi-lokasi objek wisata, banyak pengunjung liar yang sebagian besar datang dari pedesaan di sekitar Kota Bukittinggi. Mereka adalah anak-anak jalanan yang bertujuan meminta belas kasihan atau mengemis dari para wisatawan. Sebagian besar usia mereka relatif masih sangat muda, bahkan anak-anak yang berusia sekolah dasar. Dalam kondisi baju yang kotor dan compang-camping, mereka mengulurkan tangannya meminta uang dengan diiringi kata-kata keluhan dan permohonan belas kasihan. Beberapa diantara mereka bersikap wajar, tetapi ada juga yang memaksa dengan cara mengikuti terus para wisatawan, menarik-narik bajunya, bahkan ada yang mengeluarkan kata-kata kurang baik apabila tidak dikasih uang. Hal ini tentu saja sangat mengganggu keamanan dan kenyamanan mereka.

Banyaknya para pengemis kecil sebagai pengunjung liar objek wisata menunjukkan bahwa pendatang ke Kota Bukittinggi bukan hanya mereka yang bertujuan berusaha dan berdagang. Pada umumnya latar belakang mereka adalah keluarga yang kurang mampu dan datang ke kota sebagai penduduk miskin yang tidak punya pekerjaan yang jelas. Kemiskinan kota ini dapat dirasakan sebagai gangguan terhadap ketertiban dan keindahan serta keamanan lingkungan, terutama di lokasi-lokasi objek wisata.

Selanjutnya kemiskinan kota tersebut berakibat langsung terhadap kejahatan yang terjadi di kota berupa kejahatan kecil seperti pencopetan dompet. Kejahatan-kejahatan kecil yang terjadi di tempat wisata didukung oleh banyaknya wisatawan yang dianggap punya uang banyak dan tidak adanya tindakan tegas dari aparat keamanan setempat.

Dari beberapa kenyataan tersebut dapat dikatakan bahwa keamanan dan kenyamanan di lokasi wisata perlu mendapat perhatian serius. Pihak Pemda, khususnya Dinas Pariwisata dan Aparat Keamanan serta masyarakat pada umumnya hendaknya peduli kepada kondisi tersebut. Selain dapat memberi kesan negatif bagi para wisatawan, juga akan berakibat buruk bagi perkembangan pariwisata Kota Bukittinggi di masa yang akan datang. Hal ini bisa merugikan berbagai pihak, baik bagi Pemda sendiri maupun bagi masyarakat setempat. Kesan negatif tentang kondisi keamanan dan kenyamanan bisa mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung ke Kota Bukittinggi. Dengan kata lain, kondisi kota secara umum dan kondisi lokasi objek wisata secara khusus, yang kotor dan tidak terawat juga bisa berakibat lebih lanjut kepada berkurangnya kunjungan para wisatawan.

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Mobilitas sosial penduduk yang terjadi di Kota Bukittinggi disebabkan oleh faktor yang bersifat fisik dan non-fisik. Faktor yang bersifat fisik meliputi daya tarik kota (daerah tujuan) dan daya dorong desa (daerah asal). Daya tarik daerah tujuan antara lain keberadaan pasar, keberadaan sekolah, tersedianya sarana transportasi, terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan industri dan kemajuan pendidikan, serta informasi tentang keberadaan kota. Sedangkan daya dorong daerah asal adalah fasilitas hidup di daerah asal yang relatif terbatas, seperti jumlah sekolah yang sedikit, lapangan kerja yang sempit dan jenis pekerjaan yang tidak bervariasi.

Keberadaan pasar telah menarik minat masyarakat luar Kota Bukittinggi untuk melakukan mobilitas sosial, baik permanen maupun non-permanen. Kemudian keberadaan pasar tersebut telah meningkatkan taraf sosial ekonomi para pendatang, yaitu secara sosial statusnya meningkat karena memiliki usaha dan secara ekonomi usaha tersebut telah meningkatkan pendapatan. Kemudian, keberadaan sekolah dalam jumlah besar yang identik dengan kemajuan di bidang pendidikan dengan adanya berbagai fasilitas sekolah yang memadai, telah mendorong para pendatang untuk

menyekolahkan anak-anaknya di kota. Selanjutnya, adanya sarana transportasi berupa jalan-jalan yang menghubungkan luar kota dan pusat kota dan angkutan umum yang jumlahnya bertambah dari tahun ke tahun, telah mempermudah arus lalu lintas, baik orang maupun barang.

Daya dorong desa berupa lapangan kerja yang sempit dan jenis pekerjaan yang tidak bervariasi, karena kondisi desa dengan fasilitas hidup yang minim tidak mungkin tercipta lapangan pekerjaan lain selain bertani. Dengan semakin banyaknya penduduk mengakibatkan lahan pertanian pun bertambah sempit, sehingga untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sangat sulit dilakukan. Dengan demikian, penduduk dari daerah pedesaan tersebut terdorong untuk mencari pekerjaan di kota yang lebih menguntungkan.

Adapun faktor non-*push* adalah tradisi merantau dalam budaya Minangkabau yang masih berlaku sampai saat ini, termasuk bagi masyarakat Kota Bukittinggi dan sekitarnya. Kemudian perubahan mental atau perubahan pola pikir termasuk ke dalamnya keinginan yang kuat untuk mencari pengalaman di kota dan membebaskan diri dari keterikatannya dengan tanah pertanian. Dalam hal ini, telah terjadi perubahan sikap mental yang menyimpang dari kebiasaan yang telah ada, sehingga terjadi perubahan gaya hidup dan orientasi masa depan. Selanjutnya adalah adanya perbedaan persepsi, kepentingan, intelektual dan kesadaran tentang kondisi suatu daerah. Perbedaan-perbedaan ini terutama dalam nilai-nilai kehidupan yang dipahami menyangkut perbedaan nilai kefaedahan wilayah (*place utility*) antara daerah asal dan tujuan.

Proses mobilitas sosial penduduk yang terjadi di Kota Bukittinggi terdiri dari mobilitas sosial horisontal dan mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial horisontal meliputi mobilitas permanen, mobilitas sirkuler dan mobilitas ulang alik. Sedangkan mobilitas sosial vertikal meliputi mobilitas vertikal naik, vertikal turun dan vertikal tetap.

Sebagian besar para pelaku mobilitas melakukan mobilitas bertujuan untuk mencari pekerjaan dan mengembangkan usaha. Selain itu, ada juga beberapa orang yang melakukan mobilitas karena alasan pribadi, seperti pernikahan.

Adanya mobilitas sosial horisontal, baik permanen maupun non-permanen menunjukkan bahwa Kota Bukittinggi mengalami perkembangan yang relatif pesat, sehingga menarik banyak pendatang dari berbagai daerah. Apabila dilihat dari bentuk mobilitas yang terjadi, maka mobilitas ulang alik (*commuting*) lebih banyak daripada mobilitas permanen dan sirkuler. Hal ini terjadi karena adanya kekuatan (*forces*) yang menyebabkan seseorang untuk tetap tinggal di daerah asal yang disebut kekuatan sentripetal. Kemudian adanya kekuatan yang menarik seseorang untuk pergi ke daerah tujuan atau meninggalkan daerah asalnya yang disebut kekuatan sentrifugal.

Konsep mobilitas sosial secara teoritik dapat digunakan sebagai landasan dalam mengukur proses perkembangan kota dan pertumbuhan penduduknya. Proses tersebut mempunyai implikasi terhadap tingkat kemakmuran penduduk dan kemajuan kota itu sendiri. Selama ini, kemajuan suatu kota sering diidentifikasi dengan banyaknya gedung-gedung tinggi yang megah, tersedianya sarana hidup yang canggih dan lengkap, adanya fasilitas hiburan yang beraneka ragam, dan kemudahan-kemudahan lainnya. Sedangkan kemakmuran penduduk sering ditafsirkan dengan tingginya pendapatan mereka atau secara ekonomi kehidupannya mengalami peningkatan. Pada kenyataannya kondisi tersebut justru melahirkan masyarakat kota yang kurang manusiawi dan kurang berbudaya, apabila tidak didukung oleh peningkatan kualitas hidup dalam segi mental dan spiritual.

Perkembangan kota dan pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi mengakibatkan sirkulasi antar golongan masyarakat, baik ditinjau dari segi social maupun ekonomi. Sirkulasi ini menyangkut

perubahan yang terjadi diantara mereka, seperti perubahan pekerjaan yang berimplikasi kepada perubahan pendapatan. Perubahan pekerjaan atau okupasi antar generasi terutama terjadi karena adanya sarana dan kesempatan yang mendukung. Diantara sarana yang utama yang ada di Kota Bukittinggi adalah keberadaan pasar, terutama setelah didirikannya Pasar Aur Kuning yang menarik minat para pendatang dari daerah-daerah di luar Kota Bukittinggi. Keberadaan pasar memperbanyak okupasi pada bidang jasa dan penjualan, sehingga terjadi proses mobilitas sosial vertikal.

Adanya proses mobilitas vertikal menunjukkan bahwa stratifikasi masyarakat Bukittinggi dapat dikatakan relatif terbuka. Apabila dilihat dari naik turunnya mobilitas sosial, maka terlihat bahwa mobilitas ke atas (*social climbing*) lebih banyak dari mobilitas ke bawah (*social sinking*). Sementara itu, yang posisinya tetap (*social staying*) relatif cukup banyak juga. Hal ini terjadi karena semakin banyaknya pekerjaan di sektor informal.

Konsep mobilitas vertikal dapat digunakan sebagai salah satu indikator penting dalam mengukur keadilan sosial. Keadilan sosial mempunyai dimensi horisontal (gender, agama, suku) dan dimensi vertikal (okupasi). Selama ini keadilan sosial sering ditafsirkan sebagai kesejahteraan sosial (*welfare*), keadilan hukum (*legal justice*) atau keadilan distribusi dalam ekonomi.

Keadilan sosial antara lain kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan. Akan tetapi, tanpa perlindungan pendidikan hanya akan "mencerdaskan bangsa" tanpa "mengadilkan bangsa". Misalnya, jika dahulu seorang buruh tani tidak mempunyai pendidikan, maka sekarang anaknya memperoleh pendidikan (misalnya SMP atau SMU), karena program inpres atau wajib belajar. Namun, tanpa bantuan perlindungan dari pemerintah, maka pekerjaannya dapat saja tetap sebagai buruh tani. Secara ekonomi tidak akan terjadi perbaikan, walaupun secara sosial si anak akan merasa bangga atau malah merasa frustrasi karena pendidikan yang dicapainya tidak

mengubah nasibnya.

Hal tersebut bisa terjadi pada pelaku mobilitas tetap (*social staying*) yang mana seorang anak telah mengecap pendidikan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pendidikan ayahnya. Akan tetapi, pada kenyataannya pendidikan yang telah dicapai tidak berimplikasi kepada perubahan jenis pekerjaan. Kondisi ini bisa disebabkan tidak adanya kesempatan untuk melakukan mobilitas vertikal (naik), baik jarak dekat maupun jarak jauh. Lebih lanjut disebabkan oleh banyaknya penduduk usia kerja (usia produktif), sedangkan lapangan kerja yang tersedia relatif sedikit.

Mobilitas sosial penduduk mempunyai dampak terhadap tata lingkungan kota dan pariwisata, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif terhadap tata lingkungan kota adalah berdirinya bangunan-bangunan baru untuk berbagai keperluan, seperti perumahan baru, gedung-gedung sekolah baru, hotel-hotel baru dan lain-lain. Sedangkan dampak negatifnya adalah lingkungan yang tidak teratur dan semraut. Tidak adanya rasa aman dan nyaman yang berakibat langsung kepada ketertiban lingkungan kota.

Sementara itu, dampak positif terhadap pariwisata adalah banyaknya pengunjung ke lokasi-lokasi objek wisata, sehingga mendatangkan keuntungan yang besar. Keuntungan tersebut dialami juga oleh sarana pendukung pariwisata, seperti rumah-rumah makan dan hotel-hotel serta tempat-tempat hiburan lainnya. Selanjutnya berimplikasi kepada pajak yang dipungut Pemda setempat yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Sedangkan dampak negatifnya adalah kebersihan yang tidak terjaga dan faktor keamanan yang terabaikan, sehingga berakibat kepada turunnya minat wisatawan untuk berkunjung ke Kota Bukittinggi di masa yang akan datang. Selain itu, rusaknya berbagai fasilitas yang ada di lokasi objek wisata akibat ulah para pengunjung yang tidak bertanggung jawab, menimbulkan kerugian yang cukup

besar.

## **4.2. Saran**

Studi mengenai mobilitas sosial yang bersifat kuantitatif perlu dilakukan secara berkesinambungan, sehingga akan menghasilkan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi masyarakat serta keadilan sosial di Kota Bukittinggi. Kemudian studi ini perlu dilakukan secara lebih terarah dan terfokus dengan sampel yang lebih representatif. Dapat dilakukan penelitian secara makro yang memerlukan waktu yang cukup panjang dan pendanaan yang lebih memadai, sehingga akan menghasilkan data yang lebih tepat dan akurat.

Informasi yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang lebih meningkatkan usaha-usaha mencapai masyarakat yang lebih adil dan pembangunan kota yang lebih manusiawi. Selanjutnya dilakukan juga studi yang dibarengi dengan analisis isi tentang kebijakan pemerintah setempat, sehingga dapat diidentifikasi usaha perbaikan mobilitas telah dilakukan. Selain itu, perlu juga analisis isi pada berbagai produk kebijakan pemerintah yang berkaitan, baik mendorong maupun menghambat proses mobilitas sosial.

Dalam hal ini, perlu juga dilakukan studi kualitatif lebih lanjut yang dapat menganalisis secara mendalam dampak para pelaku mobilitas, terutama mobilitas vertikal, pada status barunya. Adaptasi mereka pada pemberian makna, sosialisasi, perilaku dan afiliasi politik merupakan bidang kajian yang penting, baik secara teoritik maupun kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Asy'ari, Sapari Imam. 1993. *Sosiologi Kota dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional.

Badan Pusat Statistik Kotamadya Bukittinggi. 1998. *Bukittinggi Dalam Angka 1998*.

Burger, D.H. 1962. *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia. Jilid I*. Terjemahan Prajudi. Djakarta: Pardnja Paramita.

Daldjoeni. 1978. *Seluk Beluk Masyarakat Kota; Pusparagam Sosiologi Kota*. Bandung: Penerbit Alumni.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1987. *Sejarah Kota Padang*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

-----, 1993. *Sejarah Sosial Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta; Mobilitas Sosial DI Yogyakarta Periode Awal Abad Duapuluh*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

Enar, Fatimah. Et al. 1978. *Sumatera Barat 1945-1949*. Padang: Pemda Sumbar.

Evers, Hans-Dieter. 1995. *Sosiologi Perkotaan; Urbanisasi dan Sengketa Tanah di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: LP3ES.

Goldthorpe, J.E. 1992. *Sosiologi Dunia Ketiga; Kesenjangan dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Hadjerat, Mohamad. 1947. *Sejarah Negeri Kurai V Jorong*. Bukittinggi.

Kartodirdjo, Sartono. 1982. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia; Suatu Alternatif*. Jakarta: Gramedia.

----- . 1992. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900; Dari Emporium Sampai Imperium. Jilid I*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.

Koesoemahatmadja. 1986. *Peranan Kota Dalam Pembangunan*. Bandung: Binacipta.

Lubis, Nina H. dkk. 2000. *Sejarah Kota-Kota Lama di Jawa Barat*. Bandung: Alqaprint.

Loir, Henri Chambert dan Hasan Muarif Ambang (Ed.). 1999. *Panggung Sejarah; Persembahan Kepada Prof. Dr. Denys Lombard*. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan Yayasan Obor Indonesia.

Lee, Everett S. 1991. *Mobilitas Penduduk Sirkuler Dari Desa Ke Kota Di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada.

Mantra, Ida Bagus. 1991. *Teori Migrasi. Seri Terjemahan No. 3*. Diterjemahkan oleh Hans Daeng dan Ditinjau Ulang Kembali Oleh Ida Bagus Mantra. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada.

Pardoko, R.H. 1987. *Mobilitas Migrasi dan Urbanisasi*. Bandung: Angkasa.

Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1993. *Sejarah Nasional Indonesia. Jilid III*. Jakarta: Balai Pustaka.

Rusli, Amran. 1985. *Sumatera Barat Plakat Panjang*. Jakarta: Sinar Harapan.

\_\_\_\_\_. 1993. *Sejarah Nasional Indonesia. Jilid IV*. Jakarta: Balai Pustaka

Soekanto, Soerjono. 1998. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

T, Moeljarto. 1995. *Politik Pembangunan; Sebuah Analisis Konsep, Arah, dan Strategi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Zed, Mestika. 1997. *Pemerintah Darurat Republik Indonesia; Sebuah Mata Rantai Sejarah Yang Terlupakan*. Jakarta: Graffiti.

Zulqaiyyim. 1996. "Sejarah Kota Bukittinggi (1837-1942)". *Tesis*. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada.

## **B. Makalah**

Alvarez Z, Eko. 1998. "Bukittinggi, The City of Hundred Mosques (The Transformation of Minangkabau Cities)". *Makalah*. Present for International Symposium And Workshops on Historic Cities in Islamic Societies, Yogyakarta 21-23 April 1998.

Naim, Mochtar. 1973. "Perkembangan Kota-Kota di Sumatera Barat". *Prisma* No. 3/II.

Zed, Mestika. 2000. "Dimensi Sosial-Budaya Dan Politik Dari Pembangunan Kota Padang; Beberapa Catatan Pengantar". *Makalah*. Risalah Pengantar disampaikan pada Semiloka BMP (Bantuan Manajemen Pendamping, Program Peningkatan Kemampuan Pemerintah Kota Padang, Kamis, 9 Nopember 2000.

## **C. Koran**

Alam, Dipo. 1993. "Kriteria Pembangunan Yang Terlupakan". *Kompas*. 15 April 1993.

Budiharjo, Eko. 1994. "Penjungkirbalikan Rencana Kota". *Kompas*. 21 Februari 1994.

Budiharjo, Sudanti. 1992. "Dari Metropolis ke Ecopolis". *Kompas*. 13 November 1992.

Firman, Tommy. 1992. "Partisipasi Dalam Pembangunan Kota". *Kompas*. 15 Desember 1992.

Kusaeni, Akhmad. 1993. "Membangun Kota agar Lebih Manusiawi". *Haluan*. 29 Januari 1993.

Rachman Wiriosudarmo. 1986. "Cara Melihat Kemiskinan". *Kompas*. 17 Mei 1986.

Soesilo, Nining I. 1993. "Lunturnya Daya Tarik Pusat Kota". *Kompas*. 29 Juli 1993.

Tobing, Elwin PL. 1994. "Tantangan Revolusi Perkotaan". *Kompas*. 1 Agustus 1994.

"Sampah di Bukittinggi Dimusnahkan Dengan Mesin". *Haluan*. 8 Maret 2001.

"Seluruh Sarana dan Prasarana Objek Wisata di Sumbar Harus Dibenahi". *Haluan*. 1 Maret 2001.

"Pedagang Konveksi di Aur Kuning Kini Merasakan Tidak Nyaman Lagi". *Haluan*. 7 Maret 2001.

"Pemda Perlu swastanisasi Pengelolaan Objek Wisata". *Mimbar Minang*. 2 Maret 2001



## DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Banaili St. Bandaro  
Umur : 49 Tahun  
Pendidikan : Tidak Tamat SD  
Pekerjaan : Buruh Angkat  
Alamat : Kamang Mudik
2. Nama : Hanafi Rais Rj. Sulaeman  
Umur : 27 Tahun  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Pelayan Toko  
Alamat : Tarok
3. Nama : Rio Tanjung  
Umur : 24 Tahun  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Buruh Angkat  
Alamat : Simpang Mandiangin
4. Nama : Bustaman Pakih Muncak  
Umur : 55 Tahun  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Buruh Angkat  
Alamat : Kamang
5. Nama : Hendri St. Rangkayo Mulia  
Umur : 28 Tahun  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Tigo Baleh

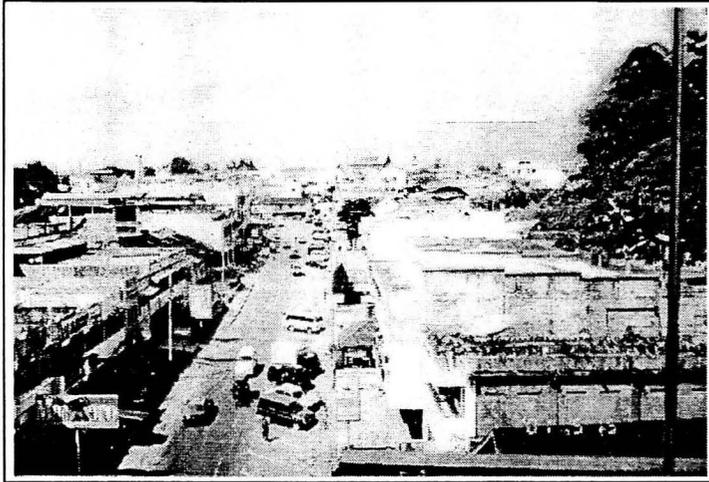
6. Nama : Siska Sulistia  
Umur : 27 Tahun  
Pendidikan : Sarjana  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Jl. Bermawi
7. Nama : Fauzi St. Mudo  
Umur : 41 Tahun  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Pengrajin / Pengusaha  
Alamat : Simpang Aur
8. Nama : Erwin  
Umur : 38 Tahun  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Pengrajin / Pengusaha  
Alamat : Garegeh
9. Nama : Yesi Harnati  
Umur : 34 Tahun  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Pengusaha  
Alamat : Jl. Puskesmas
10. Nama : Jonalis  
Umur : 36 Tahun  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Pelayan Toko  
Alamat : Empat Angkat Candung
11. Nama : Naro Nuriswan  
Umur : 43 Tahun  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Jl. Tengah Sawah
12. Nama : Novrizal  
Umur : 27 Tahun  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Simpang Aur

13. Nama : Armes  
Umur : 24 Tahun  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Jl. Tengah Sawah
14. Nama : Dadiarti  
Umur : 40 Tahun  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Inkorba
15. Nama : Syamsu Wirman  
Umur : 28 Tahun  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Pasar Pagi Tembok
16. Nama : Misridawati  
Umur : 40 Tahun  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Banto Laweh
17. Nama : Sisnawati  
Umur : 40 Tahun  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Pengrajin/Pedagang  
Alamat : Kamang
18. Nama : Drs. Usman Amir  
Umur : 49 Tahun  
Pendidikan : Sarjana  
Pekerjaan : Ketua Bappeda Kota Bukittinggi  
Alamat : Komplek Diklatwil I DepdagriBaso
19. Nama : H. Akmal Sidiq  
Umur : 69 Tahun  
Pendidikan : Sarjana  
Pekerjaan : Ketua DPRD Kota Bukittinggi  
Alamat : Jl. Panorama

20. Nama : Drs. Faisal Basir  
Umur : 53 Tahun  
Pendidikan : Sarjana  
Pekerjaan : Pegawai Pemda Bag. Pemerintah  
Alamat : Jl. Tengah Sawah
21. Nama : Drs. Antoni Samawil  
Umur : 35 Tahun  
Pendidikan : Sarjana  
Pekerjaan : Pegawai Pemda Bag. Pemerintahan  
Alamat : Belakang Balok
22. Nama : Syamsu Nauman  
Umur : 42 Tahun  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Pegawai Dinas Pasar  
Alamat : Simpang Kapau
23. Nama : Zainal Abidin  
Umur : 44 Tahun  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Buruh Angkat  
Alamat : Kamang
24. Nama : Halim Fransisco  
Umur : 17 Tahun  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Buruh Angkat  
Alamat : Kamang
25. Nama : Darwis  
Umur : 44 Tahun  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Buruh Angkat  
Alamat : Kamang
26. Nama : Syahrial  
Umur : 46 Tahun  
Pendidikan : Tidak Tamat SD  
Pekerjaan : Buruh Angkat  
Alamat : Kamang

27. Nama : B. Labai Sati  
Umur : 50 Tahun  
Pendidikan : Tidak Tamat SD  
Pekerjaan : Buruh Angkat  
Alamat : Kampung Manggis
28. Nama : Nasir St. Muncak  
Umur : 48 Tahun  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Buruh Angkat  
Alamat : Kampung Manggis
29. Nama : Dahdir  
Umur : 45 Tahun  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Buruh Angkat  
Alamat : Kampung Durian
30. Nama : Wis  
Umur : 52 Tahun  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Kamang
31. Nama : Anwar  
Umur : 45 Tahun  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Jl. Mandiangin
32. Nama : Syafril  
Umur : 44 Tahun  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Padang Panjang
33. Nama : Sofinal  
Umur : 42 Tahun  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Tigo Baleh

34. Nama : Helmiyanto  
Umur : 35 Tahun  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Sungai Puar
35. Nama : Rudi  
Umur : 25 Tahun  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Buruh Angkat  
Alamat : Aur Atas



**Gambar 1.**  
Salah satu sudut kota Bukittinggi



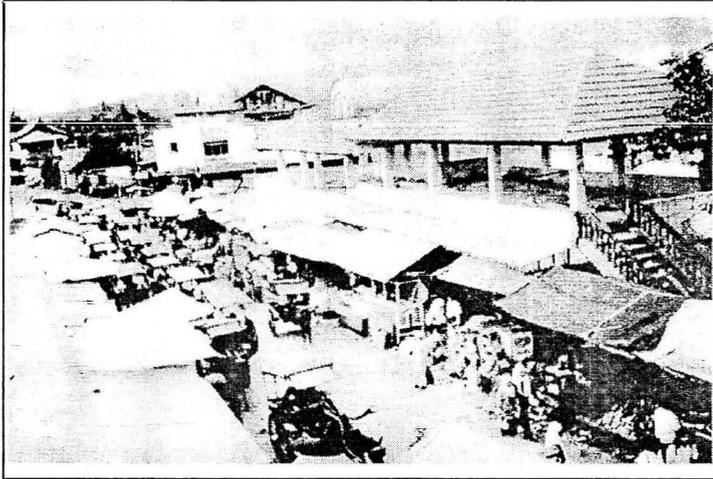
**Gambar 2.**  
Terminal dan Pasar Aur Kuning yang dibangun pada tahun 1980



**Gambar 3.**  
Pasar Atas Blok E kota Bukittinggi



**Gambar 4.**  
Hasil-hasil kerajinan tangan yang dijual di kaki lima  
Pasar Atas Blok A kota bukittinggi



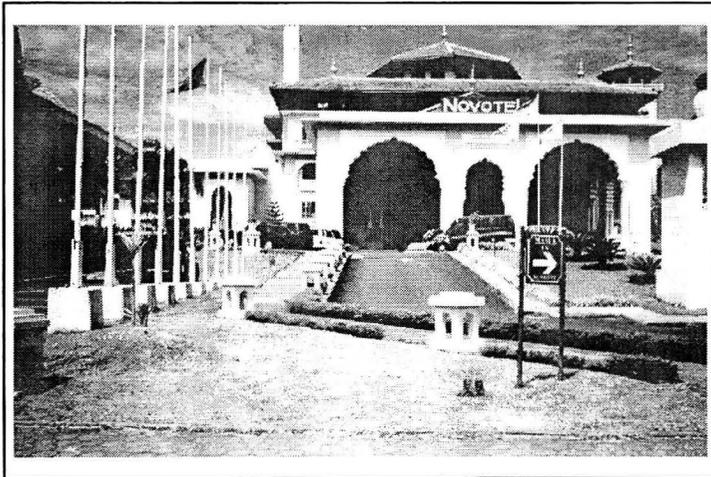
**Gambar 5.**  
Suasana Pasar Bawah Kota Bukittinggi bagian Barat  
(Jl. Tengah Sawah) tampak dari Jenjang Gantung (Viaduct)



**Gambar 6.**  
Suasana Pasar Bawah Kota Bukittinggi bagian Timur  
(Jl. A. Yani) tampak dari Jenjang Gantung (Viaduct)



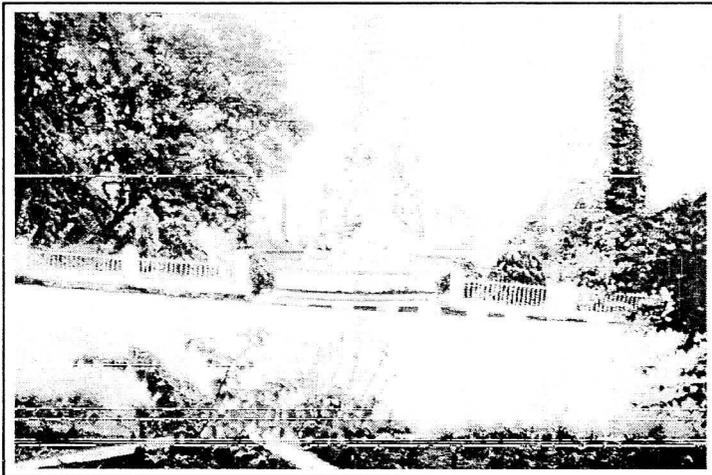
**Gambar 7.**  
Salah satu Mesjid Raya yang terletak di pusat kota Bukittinggi



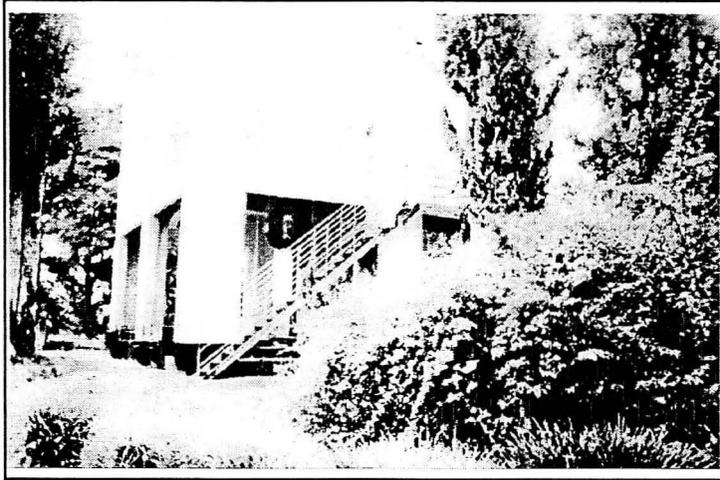
**Gambar 8.**  
Salah satu hotel berbintang di pusat kota Bukittinggi yang sering digunakan oleh wisatawan domestik dan mancanegara



**Gambar 9.**  
Tugu "Jam Gadang" di pusat kota yang dijadikan lambang kota Bukittinggi dan merupakan kebanggaan masyarakat setempat

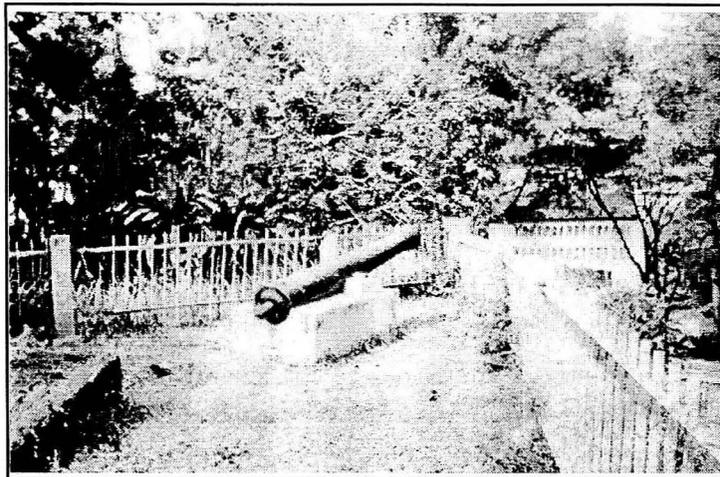


**Gambar 10.**  
Monumen pahlawan tidak dikenal di pusat kota Bukittinggi



**Gambar 11.**

Benteng *Fort de Cock* yang terletak di atas Bukik Jirek. Didirikan pada tahun 1926 oleh Kapten Bauer yang berfungsi sebagai Benteng pertahanan dan pengintai jarak jauh melawan kaum Paderi. Dibangun pada zaman Komandan de Roepen dan wakil gubernur Hindia Belanda Baron Hendrick Marcus de Cock



**Gambar 12.**

Salah satu bekas "Meriam" yang terletak di salah satu sudut lokasi Benteng *Fort de Cock*



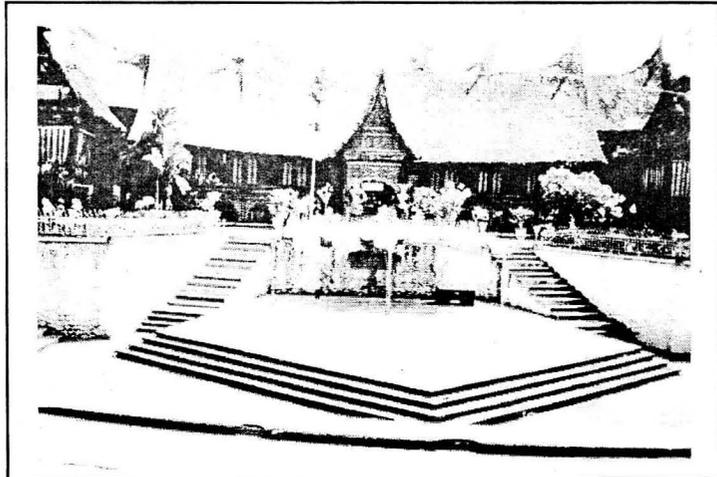
**Gambar 13.**  
Jembatan Gantung yang disebut Jembatan Limpapeh tampak dari bawah  
di sekitar Jl. Pemuda



**Gambar 14.**  
Pintu gerbang masuk Jembatan Limpapeh dari arah Cubadak Bungkok



**Gambar 15.**  
Pintu gerbang masuk Taman Margasatwa dan Budaya "Kinantan" kota Bukittinggi

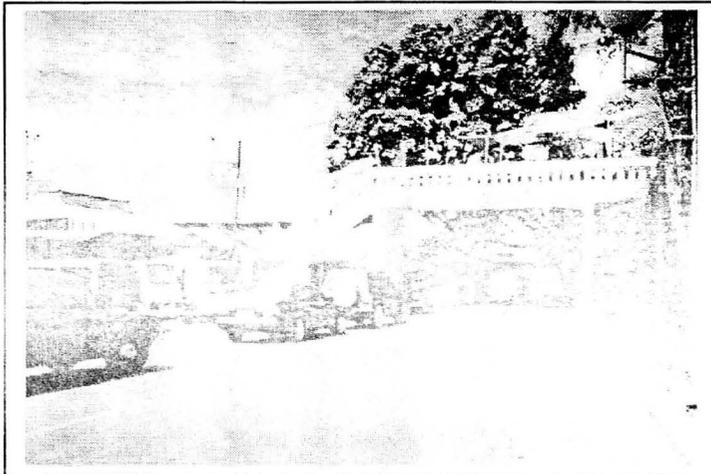


**Gambar 16.**  
Prototype rumah adat Minangkabau, "Rumah Adat Baanjuang", yang sekaligus berfungsi sebagai museum. Terletak di dalam lokasi Taman Margasatwa dan Budaya "Kinantan"



**Gambar 17.**

Sederetan anak tangga yang disebut Jenjang 40 adalah salah satu sarana yang menghubungkan Pasar Atas, Pasar Lereng, dengan Pasar Bawah dan Pasar Banto. Dibangun pada tahun 1908 pada masa Asisten Agam Westeneek



**Gambar 18.**

Jembatan gantung yang disebut Jenjang Gantung (Viaduct) yang menghubungkan Pasar Atas, Pasar Lereng dengan Pasar Bawah. Dibangun pada tahun 1932 sewaktu Catur, Controleur Agam Tuo berkuasa.



**Gambar 19.**  
Bapak H. Akmal Siddik, Wakil Ketua DPRD kota Bukittinggi



**Gambar 20.**  
Bapak Drs. Faisal Basir, Pegawai Pemda kota Bukittinggi Bag. Pemerintahan



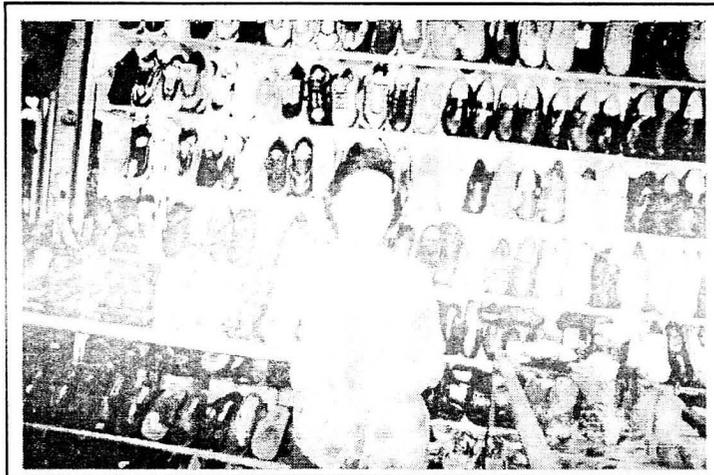
**Gambar 21.**  
Siska Sulistia, pedagang batik di Pasar Aur Kuning kota Bukittinggi



**Gambar 22.**  
Nisridawati, pedagang sandal/sepatu di kaki lima Pasar Atas Blok A kota Bukittinggi



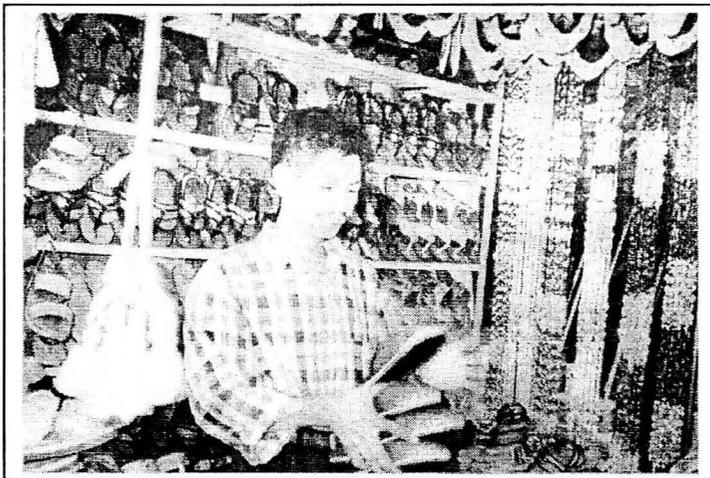
**Gambar 23.**  
Sisnawati, pedagang/pengrajin bordir dan sulaman di toko Pasar Atas Blok A lantai 2 kota Bukittinggi



**Gambar 24.**  
Didiarti, pedagang sandal/sepatu di toko Pasar Atas Blok A lantai 1 kota Bukittinggi



**Gambar 25.**  
Naro Nuriswan, pedagang aneka kerajinan tangan di kaki lima Pasar Atas Blok A kota Bukittinggi



**Gambar 26.**  
Novrizal, pedagang sandal di kaki lima Pasar Atas Blok A kota Bukittinggi



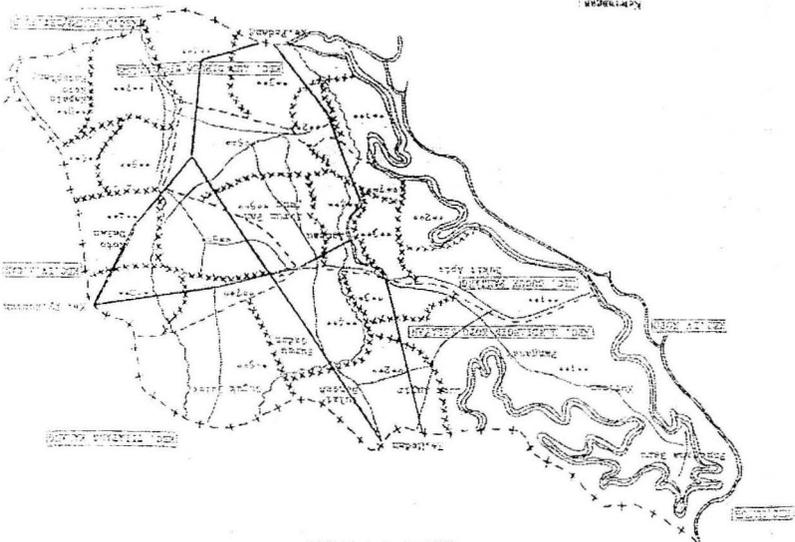
**Gambar 27.**  
Armes, pedagang aneka topi di kaki lima Pasar Atas Blok A kota Bukittinggi



**Gambar 28.**  
Syamsu Wirman, pedagang sepatu/sandal di toko Pasar Atas Blok A lantai 1 kota Bukittinggi

PETA KOTA BUKITTINGGI

Skala : 1 : 30.000

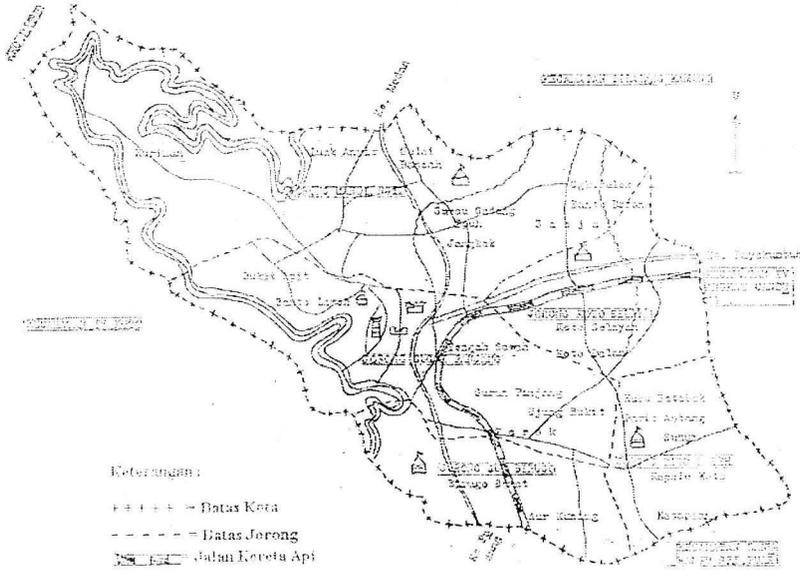


- Keterangan:
- 1. Batas Kota
  - 2. Batas Kecamatan
  - 3. Jalan Perkeretaapian
  - 4. Jalan
  - 5. Jalan Air
  - 6. Kertirukan
- Kecamatan Bukittinggi:
1. Bukit Aji
  2. Kayu Kulu
  3. Bawang Puc. Atas
  4. Pangah Bawah
  5. Puluhan Kiri
  6. Puluhan Tigo
  7. Kayu Kulu
  8. Bukit Aji
- Kecamatan Ayo Hitam Tigo Batak:
1. Bukit Aji
  2. Nagran
  3. Bunge
  4. Ayo Hitam
  5. Lumbuk Cakab
  6. Puluhan Atas
  7. Puluhan Bawah
  8. Kayu Tanjung
- Kecamatan Bontang in Kota Delapan:
1. Puluhan Atas
  2. Puluhan Bawah
  3. Bukit Aji
  4. Bukit
  5. Campang (Sg. Batak)
  6. Campang
  7. Campang
  8. Campang
  9. Campang

Disusun dan Dibuat oleh Kantor Kemukiman Bukittinggi  
 Disusun pada tanggal 1981

# PETA KOTA BUKITTINGGI

Skala : 1 : 30.000



**Keterangan:**

- = Batas Kota
- = Batas Jerong
- = Jalur Kereta Api
- ==== = Jalan Besar
- ==== = Jalan Kecil
- ~~~~ = Batang Air

-  = Kantor Balai Kota
-  = Kantor Kepala Jerong
-  = Jam Besar
-  = Pasar Bertingkat

Sumber : Kantor Sensus dan Statistik Kotamadya Bukittinggi Bukittinggi Dalam Angka 1975.

# PETA KOTA BUKITTINGGI

Skala: 1 : 30.000



Sumber: Kantor Sensus dan Statistik Kotamadya Bukittinggi  
Bukittinggi Dalam Angka 1979.



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BKITTINGGI**

KERHOBIANAN PERSERIKATAN HARI JADI KOTA BKITTINGGI

Bahwa perserikatan Hari Jadi Kota sangat penting sebagai satu-satunya wadah masyarakat Kota dan Kecamatan Kota tersebut, karena dengan perserikatan Hari Jadi Kota bertujuan untuk memelihara hubungan-hubungan kekeluargaan antara kota, untuk memelihara nilai-nilai ideal yang terkandung dalam pengalambatan kelahiran kota, untuk memelihara identitas kehadiran kota dipondok, sebagai daya untuk mendapatkan hubungan ideal dalam masyarakat hari dengan perkembangan kota.

Sebagi semangat memula dalam program Hari Jadi Kota BKITTINGGI berkesesuaian dari kebijakan Pemerintah Daerah dan di lingkungan masyarakat untuk memulak masa baru Kota yang lebih baik, sesuai dengan kenyataan politik kota maupun kebudayaan masyarakatnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas Pemerintah Daerah Kota BKITTINGGI Kepala Daerah Tingkat II BKITTINGGI telah membentuk Panitia Hari Jadi Kota BKITTINGGI, dengan mengundang partisipasi yang luas dengan tokoh-tokoh masyarakat, terakhir mengadakan seminar atau kerja sama Pemerintah Daerah Tingkat II BKITTINGGI dengan Universitas Andalas dengan melibatkan para pakar dan ahli-ahli sejarah di Tingkat Daerah dan Tingkat Nasional.

Berdasarkan seminar yang telah digelar mengenai sejarah dan sejarah yang tertuang dalam "Rumusan dan Rekomendasi Hari Jadi Kota BKITTINGGI", maka perserikatan "Hari Jadi" harus dapat dipertanggungjawabkan oleh suatu sejarah serta peristiwa-peristiwa yang bersangkutan.

- a. Nilai historis; "hari jadi" kota hendaknya dapat memperlakukan berbagai aspek dan golongan masyarakat kota yang sudah ada.
- b. Nilai integratif; dapat memberi inspirasi dalam semangat bakti yang dibudhi kota dimana kecerdasan dan yang akan datang.
- c. Nilai aspiratif; mampu menumbuhkan semangat bangsa melalui berbagai kota, sehingga menjadi pendorong di lain hal.

d. Nilai.....



## WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BUKITTINGGI

- 2 -

d. Nilai patriotisme dan nasionalisme, yang dapat menjadi -  
salah satu model dalam pembinaan mental warga kota sebagai  
bagian integral dari Republik Indonesia.

Dari nilai - nilai yang terkandung diatas terungkap -  
dalam hasil seminar bahwa " hari jadi " kota Bukittinggi di -  
mulai pada tanggal 22 Desember 1784 dengan dasar - dasar -  
pertimbangan sebagai berikut :

- (1). bahwa tanggal 22 Desember 1784 adalah merupakan hari dan  
tahun yang dapat dikaitkan dengan fungsi, peranan dan ke -  
beradaan kota Bukittinggi yang memenuhi kriteria, inte -  
gratif, aspiratif, inspiratif dan patriotisme ;
- (2). bahwa pada tanggal 22 Desember 1784 telah dikeluarkan -  
dewan yang memberlakukan hukum agama untuk mengatur ke -  
hidupan perdagangan, dimana Bukittinggi menjadi pusat -  
dan mata nyalai kegiatan perdagangan ;
- (3). bahwa pada tanggal 22 Desember 1784 telah memunculi kait -  
an yang bernilai integratif yang mempersembahkan potensia -  
ekonomi dan sosial kemasyarakatan ;
- (4). bahwa pada tanggal 22 Desember 1784 secara alamiah telah  
menunjukkan dinamika kota baik keberadaan secara lokas -  
dan fisik kota maupun sebagai lokus jalinan sosial di -  
Jalur Agas dan Luluh Dan Tiga ;
- (5). bahwa pada tanggal 22 Desember 1784 tersebut telah meme -  
nuhi kriteria yang bernilai integratif yang menunjukkan  
peranan dan fungsi kota dalam ujud memperjilahkan dimensi  
ment intelektual terhadap kompleksitas - mata dan bangsa ;

Dari Rangkaian Hari Jadi Kota Bukittinggi yang diuraikan, setelah  
dipelajari dan dibahas oleh Panitia Rhymsa Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi adalah merupakan -  
hasil yang maksimal sampai saat ini, maka DPRD Kotamadya Daerah -  
Tingkat II Bukittinggi dalam Surat Keputusannya No. 10/SK-11/DPDR  
/ 1988 tanggal 15 Desember 1988 dapat menyepakati tanggal 22 Desem -  
ber 1784 sebagai Hari Jadi Kota Bukittinggi.



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BUKITTINGGI

- 3 -

Berdasarkan Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bukittinggi No.188.45-117-1989 tanggal 17 Desem-  
ber 1989 ditetapkan Hari Jadi Kota Bukittinggi tanggal -  
22 Desember 1784.-

Demikianlah kronologis penetapan Hari Jadi Kota Bukit-  
tinggi.-

BUKITTINGGI, 22 DESEMBER 1989.-

 W. KOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BUKITTINGGI. <i>Rusd</i> (RUMEDI AGUS) HIK. A-3964/D	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BUKITTINGGI. <i>H. Annuh Nurdid</i> (H. ANNUH NURDID)
---	--

**Perpustakaan  
Jenderal**

3